



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2 Seri : E;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG**

dan

BUPATI KARAWANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2016-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretarian DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

16. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
38. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
46. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
47. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

48. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
50. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
52. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 bertujuan:
 - a. visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja OPD.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA DAERAH
 - BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 - BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 - BAB XI : PENUTUP
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan secara langsung pada tahun 2015.
- (2) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- (3) Pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan yang berkaitan dengan RPJMD diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 9

Segala ketentuan peraturan daerah terdahulu yang mengatur perihal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 15 Agustus 2016



CELLICA NURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR: 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI
JAWA BARAT : (8/146/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan pengaturan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Periodisasi RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 disusun dengan berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 selanjutnya menjadi pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta prioritas pembangunan daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen yang menyajikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Karawang selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar sektor, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Nomor 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD KabupatenKarawang 2005-2025 dan memperhatikan RTRW KabupatenKarawangtahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang.

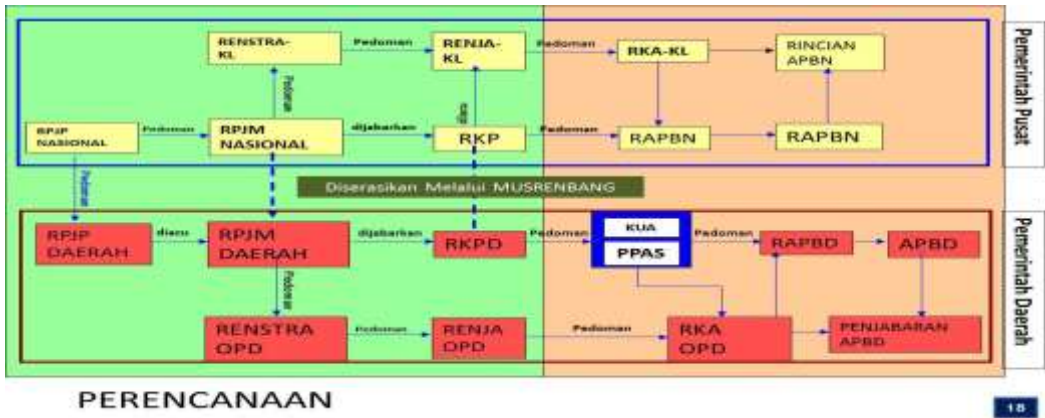
Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMN, RPJPD Kabupaten Karawang dan RTRW Kabupaten Karawang, penyusunan RPJMD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk **memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program** serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara Skematis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.4.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Karawang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2021, harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karawang.

RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025, memiliki visi **“Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri”**, dengan Misi, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab** adalah : Upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal social dimana individu

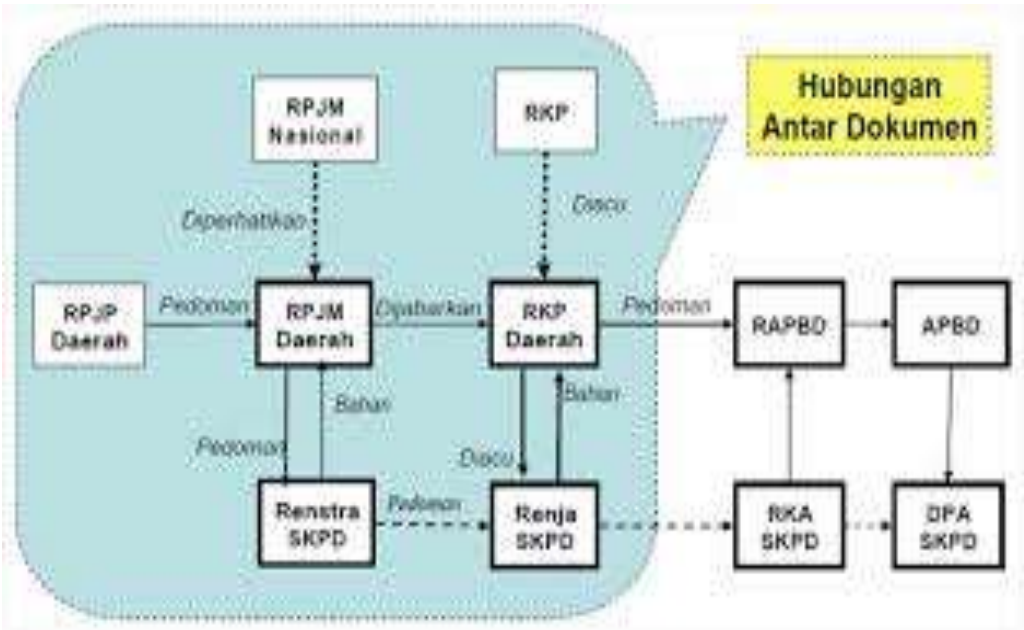
masyarakat yang berkualitas dimaksud, secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama, norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi.

- 2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdayasaing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri** adalah : upaya membangun perekonomian secara makro dan aktifitas ekonomi masyarakat karawang guna memperoleh pendapatan secara layak yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari sektor industri dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif disertai dengan upaya penumbuhan budaya dan pola konsumsi yang sehat dan seimbang.
- 3. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari** adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan

memperhatikan nilai estetika, daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah** adalah upaya membangun sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, transparan dan akuntabel yang mampu mewadahi keterlibatan swasta dan masyarakat secara partisipatif dengan mengandalkan pada seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh ketersediaan aparatur yang handal dan kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat secara optimal sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

Gambar 1.2
 Skemaketerkaitanantara RPJPD 2005 -2025 dan
 RPJMD KabupatenKarawang2016-2021

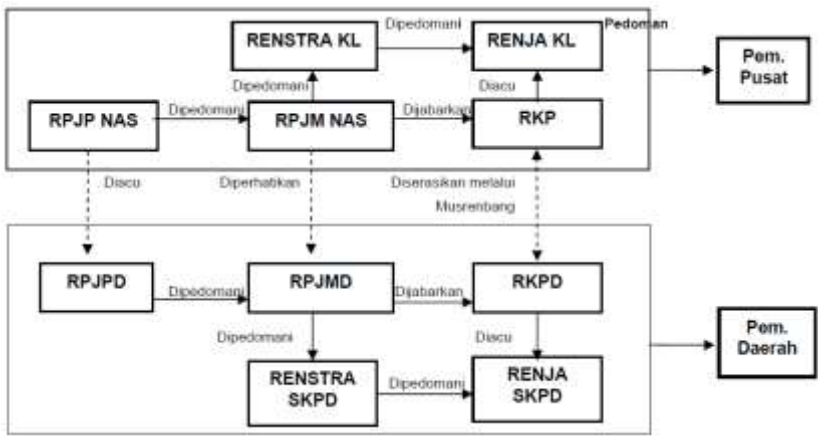


1.4.2. RPJMD dan RTRW KabupatenKarawang

Penyusunan RPJMD KabupatenKarawangtahun2016-2021, jugaharusberpedomanpadaberbagaipoladanstrukturtataruang yang telahditetapkandalam RTRW KabupatenKarawangsebagaidasaruntukmenetapkanlokasi program pembangunan yang berkaitandenganpemanfaatanruangdaerah di KabupatenKarawang. Dalammenyeimbangkankebutuhan (*demand*) danketersediaan(*supply*) ruang agar mendekatikondisi optimal,makapendekatanperencanaandilakukandenganmensera sikankegiatanantarsektordengankebutuhanruangdanpotensisu mberdayaalam yang berasaskankelestarianlingkunganmenujupembangunan yang berkelanjutan.

1.4.3. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Karawang. Dengan demikian kondisi kesinambungan, konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana skema di bawah ini:



1.4.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah

Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD, serta merupakan hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan.

1.4.5. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senadadengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi statistik dan deskripsi kondisi umum Kabupaten Karawang, yang dimaksudkan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi Kabupaten Karawang dalam jangka waktu lima tahun kedepan pada berbagai aspek terutama yang berkenaan dengan potensi perekonomian.

BAB 3. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memaparkan tentang perkembangan pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Karawang, yang meliputi penerimaan: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan. Belanja: baik belanja langsung maupun tidak langsung, serta proyeksi dan kerangka pendanaan.

BAB 4. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memaparkan permasalahan pembangunan Kabupaten Karawang yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum serta

mengindikasikan dalam isu-isustrategis baik global, nasional, provinsi maupun kabupaten di KabupatenKarawang.

BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengutarakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaranRPJMD 2016-2021 dengan berpedoman pada tahapan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025.

BAB 6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB 8. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang indikasi rencana program prioritas Bupati/Wakil Bupati Karawang periode 2016-2021 disertai kerangka pendanaannya

BAB 9. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat Indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan.Hal ini ditunjukan

dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB 10. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat pernyataan bahwa RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD pada masa transisi tahun 2021 dan tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) pada periode berikutnya (tahun 2022)

BAB 11 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 02' - 107^{\circ} 40'$ BT dan $5^{\circ} 56' - 6^{\circ} 34'$ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 270 C. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuaya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, Sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan – bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama

dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yaitu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan | 16. Kecamatan Telagasari |
| 2. Kecamatan Tegalwaru | 17. Kecamatan Majalaya |
| 3. Kecamatan Ciampel | 18. Kec. Karawang Timur |
| 4. Kec.Telukjambe Tmr | 19. Kec. Karawang Barat |
| 5. Kec. Telukjambe Brt | 20. Kecamatan Rawamerta |
| 6. Kecamatan Klari | 21. Kecamatan Tempuran |
| 7. Kecamatan Cikampek | 22. Kecamatan Kutawaluya |
| 8. Kecamatan Purwasari | 23. Kec. Rengasdengklok |
| 9. Kec. Tirtamulya | 24. Kecamatan Jayakarta |
| 10. Kecamatan Jatisari | 25. Kecamatan Pedes |
| 11. Kecamatan Banyusari | 26. Kecamatan Cilebar |
| 12. Kecamatan Kotabaru | 27. Kecamatan Cibuaya |
| 13. Kec Cimalaya Wetan | 28. Kecamatan Tirtajaya |
| 14. Kec Cilamaya Kulon | 29. Kecamatan Batujaya |
| 15. Kec Lemahabang | 30. Kecamatan Pakisjaya |

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Karawang



Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,8^o celcius sampai dengan 27,7^o celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (gateway city) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti: banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun (Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, Green Canyon), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen

Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pertanian Padi Sawah 94,075 Ha
 2. Pekarangan dan Bangunan 22,609 Ha
 3. Tegal/Kebun 12,300 Ha
 4. Ladang/Huma 7,705 Ha
 5. Penggembalaan Padang Rumput 10,460 Ha
 6. Hutan Rakyat
 7. Rawa
 8. Tambak 10,570 Ha
 9. Kolam/Empang 1,935 Ha
 10. Hutan Negara 10,650 Ha
 11. Perkebunan 0,793 Ha
 12. Kawasan Industri dan Zona Industri 2,459 Ha
 13. Lain-lain 1,239 Ha
- Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

2.1.1.Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.077.267 jiwa, tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013, berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.903.115 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,04%. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.059.742 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,61 %.

Untuk melihat data secara rinci dapat kami sampaikan pada tabel sebagai berikut ;

LAJU PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN 2009 s/d 2013*				
TAHUN	RELAKHIRAN (Pertumbuhan Alam)	MIGRASI (Pendatang)	JUMLAH PENDUDUK	LPP (%)
	2	3	4	5
2009	54.158	3.994	2.007.701	2,90
2010	52.638	12.598	2.003.164	3,26
2011	51.256	15.985	2.077.267	3,24
2012	54.330	10.051	1.948.015	3,77
2013	60.019	15.480	2.075.748	3,64
2014	57.044	19.929	1.903.115	4,04
2015	68.514	26.466	2.059.742	4,61
Rata-Rata	56.851	16.216		3,87

Keterangan :
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan DAIR (Daftar Agregat Kependudukan)
*Data Migrasi Tahun 2009 mulai Bulan Agustus



- Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kelahiran tertinggi pada tahun 2012 seiring dengan bertambahnya migrasi (pendatang) ke Kabupaten Karawang dengan jumlah migrasi sebanyak 15.051 jiwa.
- Rata-rata pertahun angka kelahiran mencapai 49.109 jiwa.
- Kabupaten Karawang yang wilayahnya didominasi oleh sektor industri menyebabkan banyak penduduk dari luar Kabupaten Karawang yang datang ke Kabupaten Karawang.
- Terlihat bahwa jumlah migrasi (pendatang) setiap tahunnya bertambah dengan rata-rata pertahun jumlah migrasi (pendatang) sebanyak 11.885 jiwa.
- Seiring dengan bertambahnya jumlah pendatang setiap tahunnya menyebabkan jumlah penduduk di Kabupaten Karawang meningkat.
- Menurut data di atas Jumlah Penduduk terbanyak sebesar 2.077.267 jiwa yaitu pada tahun 2011 sedangkan rata-rata pertahun jumlah penduduk sekitar 1.996.852 jiwa.
- Untuk Laju Perkembangan Penduduk setiap tahunnya meningkat yaitu sebesar 3,05 %.

2009	54.158
2010	52.638
2011	51.256

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi (bersifat multidimensional) adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sektor swasta (*privat sektor*), dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik

di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah. Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan (ketimpangan) wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan. Beberapa perbedaan antara wilayah dapat dilihat dari beberapa persoalan seperti, potensi wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi (domestik dan asing), luas wilayah, konsentrasi industri, transportasi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa

yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi secara makro dengan melihat besaran laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk digunakan pendekatan Pendapatan perkapita, semakin besar pendapatan perkapita dapat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Laju pertumbuhan ekonomi juga sering dijadikan asumsi dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
LPE dengan Migas (%)	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
LPE tanpa Migas (%)	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber: BPS Kab. Karawang
*) = angka sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB

dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Bila dilihat berdasarkan sektor, bahwa terdapat 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor (terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang), yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Perusahaan. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2015

No	INDIKATOR	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	PDRB dengan Migas					
	• Harga Berlaku (juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
	• Harga Konstan (juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8

Sumber : BPS Kab. Karawang* = angka sementara

Sedangkan Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas harga konstan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

PDRB per Kapita Tahun 2011-2015*

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB perkapita ADHB (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
PDRB perkapita ADHK (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63

Sumber : BPS Kab. Karawang PDRB
 * = angka sementara

2. Angka Kemiskinan

a. Penduduk Miskin

BPS mendefinisikan bahwa Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar berikut ini ;

Uraian	2011	2012*)	2013*)	2014*)
Persentase Penduduk Miskin	11,80%	11,10%	10,82%	10,15%
Garis Kemiskinan (Rp)/bulan	288.001	311.123		344.477
Jumlah Penduduk Miskin	256.700	244.100	240.786	228.993

Sumber : BPS Kab. Karawang

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka

partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan tren meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada, belum mencapai target dan standar yang ditetapkan.

Pada penghitungan model baru IPM berlaku pula indicator angka usia harapan pendidikan. Untuk melihat perkembangan indicator makro Kabupaten Karawang sebagai focus kepada kesejahteraan social tahun 2014 s.d. 2015 dapat kami sajikan pada tabel berikut ;

Capaian Indikator Makro Kabupaten Karawang Tahun 2014

No	Indikator Makro	Capaian 2014*)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) • AHH (thn) • AMH (%) • RLS (thn) • PPP (Rp 000/kapita)	71,98 68,18 93,49 7,45 641,70
2	LPE *)	7,87
3	PDRB*) • Harga Konstan (Juta Rp) • Per Kapita (ADHK)	29.498.263,30 13.109.640
4	Inflasi	8,90
5	Jumlah Penduduk	2.250.120
6	LPP (%)	1,11
7	Ketenagakerjaan • Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) • Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa) • Pengangguran (%)	1.021.461 912.864 114.004 (11,10)

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang, Capaian IPM Pendekatan Metode Moderat Estimate Tahun 2014
BPS Kabupaten Karawang, Indikator Sosial Ekonomi 2014

Capaian Indikator Makro Kabupaten Karawang Tahun 2015

NO	URAIAN	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,60
	• AHH (thn)	71,50
	• EYS (thn)	11,67
	• MYS/RLS (thn)	7,09
	• Pengeluaran (Rp 000/kapita)	9.818,38
2	LPE *)	4,62%
3	PDRB*)	
	• Harga Konstan (Juta Rp)	131.207.042,8
	• Per Kapita (ADHK)	57.709.471,6
4	Inflasi	3,2%
5	Jumlah Penduduk	2.273.579
6	LPP (%)	1,04%
7	Ketenagakerjaan	

	• Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	1.056.041
	• Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)	930.590
	• Pengangguran (%)	11,88%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Indikator Makro 2015
 *)= angka sementara

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan wajib di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2015 kami sampaikan sebagai berikut ;

Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Ada beberapa indikator pendidikan diantaranya angka transisi, angka *drop out*, angka repetisi, angka partisipasi, dan lain-lain. Indikator angka

partisipasi umumnya berkaitan dengan keberhasilan suatu daerah dalam mendorong anak usia sekolah agar dapat bersekolah.

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni).

APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta

peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angkapartisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Tabel. 2.1
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/Sederajat	108,89	108,8	107,34	107,73	107,24*
APM SD/Sederajat	96,86	96,8	95,84	97,06	96,02*
APK SLTP/Sederajat	90,62	94,96	95,61	98,80	96,72*
APM SLTP/Sederajat	66,09	65,98	65,79	73,80	69,81*

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang. *=angka sementara

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SLTP selama periode tahun 2012 adalah sebesar 563 orang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah tingkat SD dan SLTP pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunandan total angka putus sekolah pada tahun 2013 adalah 560 orang.Angka putus sekolah tahun 2014 sebanyak416orang. Sedangkan angka putus sekolah pada tahun 2015 sebanyak 497.

Persentase Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP
Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	0,2%	0,1%	0,09%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,32%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

Tabel 2.2 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SLTP yang melanjutkan sekolahnya. Semakin meningkatnya presentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SLTP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SLTP tiga tahun berikutnya dengan asumsi bahwa lulusan SD melanjutkan ke SLTP. Tahun 2011 untuk SD angka kelulusan sebesar 96.60%, dan kelulusan di SLTP tahun 2013 sebesar 72,8% terdapat selisih 23.8% . Apakah dengan selisih angka tersebut ada lulusan SD yang tidak melanjutkan, pindah ke luar kabupaten atau mereka yang sekolah adalah penduduk di luar Kabupaten Karawang. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Persentase Lulusan SD dan SLTP yang Melanjutkan Sekolahnya
Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	96,60%	96,75%	97,72%	98,64%	97,72%
2.	SMP/MTs	67,58%	72,80%	75,58%	80,62%	86,09%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.3 menggambarkan hasil persentase SD dan SLTP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Persentase SMP yang Terakreditasi
Tahun 2011 – 2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	90,01%	91%	92%	92,29%	97,97%
2.	SMP/MTs	81,11%	76,84%	77,40%	77,84%	82,12%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.4 menggambarkan jumlah peserta ujian pada jenjang SD dan SLTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2011/2012 sampai dengan 2014/2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Peserta UjianTahun 2010/2011-2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 menggambarkan Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SLTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Angka Lulus SekolahTahun 2010/2011 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698	39.524
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983	37.023

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.7 Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011 s.d 2015/2016						
No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 2.8 Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs(Lokal) Tahun 2011 s.d 2015					
Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	57	1.402	460	357	175
SMP/MTs	36	535	598	194	78

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.9 Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016						
NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
	TK	4.195	5.306	5.184	6.613	6.553
	RA	6.599	7.121	7.327	8.161	8.730
	SD/MI	261.513	260.168	260.581	261.260	255.951
	SDLB	173	181	167	171	77
	SMP/MTs	105.186	113.740	116.535	117.598	117.573
	SMPLEB	37	37	36	37	38

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2011 -2015

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	259 : 1	260:1	259 : 1	255 : 1	245:1
2	SMP/MTs	525 : 1	527:1	560 : 1	565 : 1	567:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel.2.11
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 – 2015

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	38 : 1	40:1	39 : 1	37 :1	37:1
2	SMP/MTs	49 : 1	49:1	47 : 1	44 : 1	40:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

2) Program Pendidikan Menengah

Pencapaian APK dan APM SLTA sederajat pada tahun 2011-2015 lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Tahun 2011 s.d. 2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK SLTA Sederajat (%)	56,51	62,84	63,79	66,74	68,36
APM SLTA Sederajat (%)	38,31	42,36	45,44	50,28	53,13

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SLTA selama periode 2011 dan 2012 adalah sebesar 508 orang menjadi 463 orang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah tingkat SLTA pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011

mengalami penurunan.Sedangkan total angka putus sekolah pada tingkt SLTA pada periode 2013 adalah 458 orang, tahun 2014 sebanyak 392 orang dan tahun 2015 sebanyak 477.

Tabel 4.13 menggambarkan hasil persentase lulusan pada jenjang SLTA Sederajat yang melanjutkan sekolahnya. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Persentase Lulusan SLTA Sederajat
yang Melanjutkan Sekolahnya Tahun 2011 – 2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SLTA Sederajat	69,42%	80,89%	82%	82%	83%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.14
Persentase SMA/SMK/MA Terakreditasi
Tahun 2011 – 2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA	97,22%	100%	94,60%	94,60%	97,97%
2	MA	94,11%	88,88%	88,88%	94,73%	94,73%
3	SMK	85,71%	83,10%	85%	84,94%	86,31%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.15, 2.16, dan 2.17 menggambarkan hasil persentase kelulusan jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Karawang pada tahun 2010/2011 sampai dengan 2014/2015. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Peserta Ujian Tahun 2010/2011s.d. 2014/2015

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.096	19.308	20.414	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kaupaten Karawang

Tabel 2.16
Angka Lulus Sekolah Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.096	19.308	20.414	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.17
Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015

No	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	99,98%	99,98%	99,99%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.18
Persentase Peserta Didik Jenjang SLTA yang Putus Sekolah Tahun 2011-2015

No	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	0,87%	0,7%	0,63%	0,47%	0,5%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana penunjang telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah dan rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan maupun ruang praktek sekolah untuk SMA/SMK/MA, dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel. 2.19
Pembangunan Unit Sekolah, Rehabilitasi Ruang Kelas Sarana Prasarana Penunjang SMA/SMK/MA (Lokal) Tahun 2011 s.d 2015

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SMA/SMK/MA	150	129	181	158	96

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Karawang salah satunya

digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, rasio murid terhadap ruang kelas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Rasio Murid terhadap Sekolah Tahun 2011-2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	515 : 1	517:1	502 : 1	531 :1	603:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel.2.21
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	55 : 1	43:1	44 : 1	53 : 1	44:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.22
Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012-2015/2016

	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	SMA/SMK/MA	63.838	66.253	71.776	74.660	83.210
2	SMALB	16	7	9	16	17

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

3) Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal dan informal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2012 AMH Kabupaten Karawang mencapai 93,25, berarti mengalami peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf, bila dibandingkan dengan AMH tahun 2011, yaitu sebesar 93,22.

AMH pada tahun 2014 sebesar 93,49*,(angka sangat sementara) artinya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 93,27. Sedangkan Angka Melek Huruf pada tahun 2015 berubah menjadi 93,27 atau angka harapan mengikuti pendidikan

mencapai sebesar 11,67 tahun artinya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan paket A, B dan C, seperti tercantum dalam Tabel 4.23 adalah merupakan salah satu bagian dari program pendidikan non formal.

Tabel. 2.23
Perkembangan Program Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2011-2015

No	Kegiatan	Jumlah Warga Belajar				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Paket A Setara SD	607	737	1.630	660	352
2	Paket B Setara SMP	7.487	2.082	4.771	3.175	2.546
3	Paket C Setara SMA	1.932	2.063	2.490	4.280	4.022

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.24
Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PKBM	103	70	70	65	56
2	Jumlah PKBM yang mempunyai nomor lembaga (NILEM)	47	47	47	47	46
3	Jumlah LKP	53	67	70	56	69
4	Jumlah Tutor	535	540	553	510	511

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD, SMP dan

SMA yang berkualifikasi S1. Jika dilihat dari perkembangan jumlah guru di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013terdapat penambahan jumlah guru. Pada tahun 2011 jumlah keseluruhan guru di Kabupaten Karawang sebanyak 18.405 orang sedangkan pada tahun 2012jumlah guru menjadi 18.902 orang, tahun 2013 jumlah guru adalah 19.351 orang, tahun 2014 jumlah guru sebanyak 20.148 orang dan tahun 2015 jumlah guru sebanyak 20.457.

Tabel. 2.25
Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242
2	SMP/MTs	4.835	4.522	4.737	5.012	4.966
3	SMA/MA/SMK	3.336	3.585	4.035	4.147	4.249
1	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan. Jumlah guru yang sudah dan belum mendapat kualifikasi dan sertifikasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel .2.26
Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang
hingga Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
SD/MI	11.242	9.105	1.150	987
SMP/MTs	4.966	4.560	47	359
SMA/SMK/MA	4.249	3.908	16	325
Jumlah	20.457	17.573	1.213	1.671

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.671 orang. Pada tahun 2014 jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sebanyak 1.741 orang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.27.

Tabel .2.27
Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang
hingga Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
SD/MI	10.989	8.824	1178	987
SMP/MTs	5.012	4.429	152	431
SMA/SMK/MA	4.147	3.816	8	323
Jumlah	20.148	17.069	1.338	1.741

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.28
Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
1	SD/MI	9.105	6.313	2.792
2	SMP/MTs	4.560	1.956	2.604
3	SMA/SMK	3.908	1.169	2.739
Jumlah		17.069	9.438	7.631

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.29
Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
1	SD/MI	8.824	6.458	2.366
2	SMP/MTs	4.429	2.303	2.126
3	SMA/SMK/MA	3.816	1.186	2.647
Jumlah		17.069	9.930	7.139

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan olehrasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel.2.30 Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2011 – 2015						
No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	27 : 1	25:1	26 : 1	24 :1	23 : 1
2	SMP/MTs	25 : 1	26:1	24 : 1	24 :1	24 :1
3	SMA/SMK/MA	21 : 1	18:1	18 : 1	18 : 1	18 :1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.31 Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2011 – 2015						
No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10 : 1	11:1	11 : 1	10 :1	11 : 1
2	SMP/MTs	21 : 1	21:1	22 : 1	24 :1	24 : 1
3	SMA/SMK/MA	24 :1	28:1	28 : 1	28 : 1	28 : 1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan

pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)*.

Tabel 2.32
Jumlah Sekolah Tahun Ajaran 2011/2012 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	119	123	147	155	155
2	RA	156	165	172	173	186
3	SD	878	885	885	887	890
4	SDLB	2	2	2	3	3
5	MI	131	134	137	137	140
6	SMP	135	146	149	148	149
7	SMPLB	2	2	2	2	2
8	MTs	58	57	57	58	59
9	SMA	37	36	37	37	43
10	SMALB	2	1	1	1	1
11	MA	16	18	18	19	20
12	SMK	69	82	88	93	95

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.33
Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2011/2012 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	257	349	459	379	372
2	RA	330	407	361	548	526
3	SD	8.076	7.126	7.133	7.455	7.465
4	SDLB	2	4	4	6	13
5	MI	1.141	929	967	1.000	1.007
6	SMP	2.026	2.117	2.250	2.238	2.310
7	MTs	427	484	539	593	555
8	SMPLB	5	2	3	3	2
9	SMA	640	730	693	691	769
10	SMALB	3	2	2	2	2
11	MA	108	126	124	143	145
12	SMK	733	882	929	979	1447

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.34
Ruang Kelas Milik (RKM)
Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	TK	263	41	22	254	33	15	334	36	2
2	RA	325	9	69	339	128	2	383	128	2
3	SD	4.076	1.227	875	4.194	1.245	814	4.233	1.286	587
4	SMP	1.647	248	76	1.863	260	80	1.583	421	122
5	SMA	659	71	8	496	76	32	265	431	47
6	SMK	672	98	31	692	84	48	516	511	134
7	MI	563	211	135	534	248	75	533	286	81
8	MTs	306	102	42	295	141	58	333	141	48
9	MA	92	24	3	67	33	11	97	46	8

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang
Keterangan : Kategori Kondisi Sekolah : B (Baik), RR (Rusak Ringan) dan RB (Rusak Berat).

Pada Tabel 2.33 s.d. 2.34 secara keseluruhan memperlihatkan kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang

meliputi jumlah sekolah, jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas milik mulai dari tahun 2011/2012 s.d. 2015/2016.

5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan minat baca dikalangan murid-murid, di sekolah disediakan fasilitas perpustakaan sekolah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.35 Jumlah Perpustakaan Sekolah Tahun 2011 – 2015						
No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	219	224	316	355	369
2	SMP/MTs	127	128	128	132	159
3	SMA/SMK/MA	71	78	100	102	98

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

6) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Karawang, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.

Tabel 2.36 Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Tahun 2011 – 2015						
No.	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PAUD Formal	119	123	147	155	155
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Formal	444	582	729	635	704
3	Jumlah Peserta Didik PAUD Formal	4.400	5.953	6.589	6.613	6553

4	Jumlah PAUD Non Formal	497	614	827	877	881
5	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Non Formal	1.449	1.672	2.621	2.742	2742
6	Jumlah Peserta Didik PAUD Non Formal	15.481	20.482	26.893	30.145	38.088
4	Jumlah PAUD Non Formal	497	614	827	877	881

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Kesehatan

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.37
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	168	128	309	307	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	40,38	41,18	52	46,91	52,73
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	66,36	67,68	21,3	84,80	81,9
4.	Perrsentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	36,68	50,6	46	49,40	36,92
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	93	104	116	145	102
6.	Jumlah Posyandu Purnama	569	698	721	721	656
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	85	114	84	77	136

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

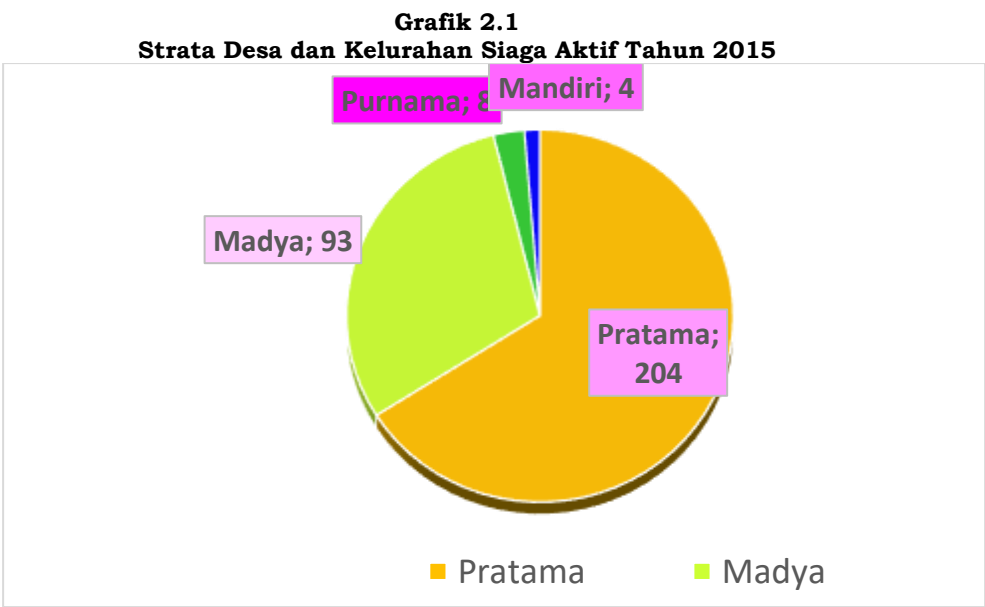
Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa dan Kelurahan siaga Aktif tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator seperti di bawah ini :

1. Terbitnya Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahn 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
2. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 140.05/Kep.662-Huk/2015 Tentang Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.

3. Masuknya Kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran APBDesa dengan Rentang Biaya Rp. 5 Juta Rupiah per desa di wilayah Kabupaten Karawang.
4. Masuknya Kegiatan Pembinaan Desa Tingkat Kecamatan dalam Anggaran Tiap Kecamatan dengan rentang biaya Rp. 20 juta per kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang.
5. Adanya komitmen seluruh camat yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
6. Adanya komitmen seluruh kepala desa yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
7. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 4 desa yaitu :
 - 1) Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 2) Desa Kertamulya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 3) Desa Laban Jaya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 4) Desa Kondang Jaya Kec Karawang Timur Wilayah Binaan PKM Adiarsa
8. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 8 desa yaitu :
 - 1) Desa Sindangmulya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutawaluya
 - 2) Desa Kutakarya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutamukti
 - 3) Desa Jatimulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 4) Desa Kertaraharja Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 5) Desa Payungsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 6) Desa Rangdumulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 7) Desa Cibuaya Kec. Cibuaya Binaan PKM Cibuaya

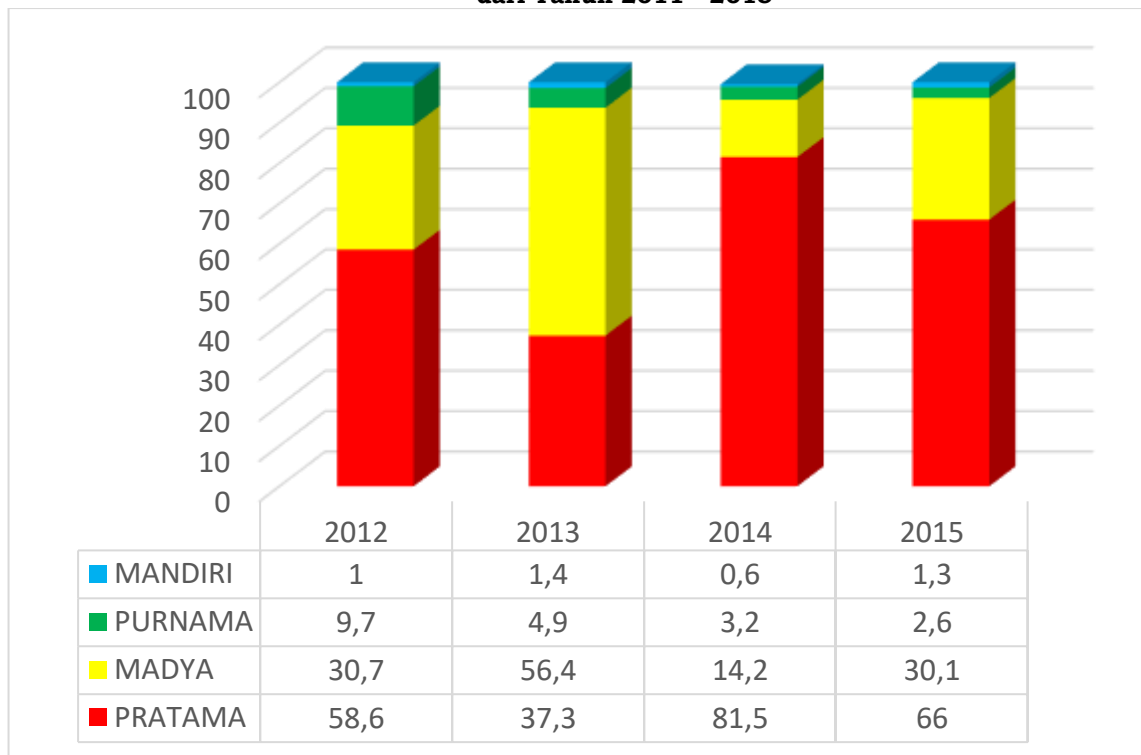
8) Desa Malangsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes

Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik- grafik di bawah ini yang membandingkan antara target program dengan realisasi dari capaian program pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015.



Dari grafik di atas masih terlihat bahwa secara umum capaian desa dan kelurahan siaga aktif sudah 100 % yang artinya sudah seluruh desa menjadi desa dan kelurahan siaga aktif. Akan tetapi ketika kita tinjau berdasarkan capaian strata desa dan kelurahan siaga aktif strata pratama masih mendominasi dibanding strata lainnya. Namun jika dibanding dengan capaian desa dan kelurahan siaga aktif tahun 2014, maka tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibuktikan dengan penurunan jumlah desa siaga strata pratama yang pada tahun 2014 berjumlah 252 desa sedangkan tahun 2015 jumlah desa siaga strata pratama berjumlah 204 desa.

Grafik 2.2
Trend Perkembangan Desa Siaga (desi)/ Kelurahan Siaga (Lusi) Aktif Berdasarkan Strata
dari Tahun 2011 - 2015



Grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan strata desa dan kelurahan siaga aktif ke arah yang lebih baik, terlihat dari pergerakan desa dan kelurahan siaga aktif strata madya yang menggantikan keberadaan desa dan kelurahan siaga aktif pratama.

Pada grafik di atas juga terlihat ada peningkatan strata mandiri dari 0.6 % di tahun 2014 menjadi 1.3 % pada tahun 2015. Tetapi ternyata dampak pemilihan kepala desa pada tahun 2015 juga memiliki dampak yang cukup signifikan terlihat pada strata purnama yang pada tahun 2014 3.2 % turun menjadi 2.6 % di tahun 2015.

Pada tahun 2015 Persentase rumah tangga sehat mengalami kenaikan cakupan dari 46,91 (tahun 2014) menjadi 52,73 (tahun 2015) yang merupakan cerminan dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga. Dari 10 indikator PHBS, cakupan yang paling rendah adalah jumlah

bayi dan balita yang menimbang di posyandu sebesar 51 % dan rumah tangga yang merokok di dalam rumah adalah 52,73 %.

Persentase sekolah yang ber-PHBS pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam cakupannya dari 84,80 % (tahun 2014) menjadi 81,9 % (tahun 2015). Berikut rincian capaian sekolah ber-PHBS sesuai strata :

- a. Sekolah dengan PHBS pratama capaian PHBS-nya hanya 27,3 % dengan hanya memenuhi 8 indikator PHBS.
- b. Sekolah dengan PHBS Madya capaian PHBS-nya hanya 36,7 % dengan hanya memenuhi 12 indikator PHBS.
- c. Sekolah dengan PHBS utama capaian PHBS-nya hanya 18,0 % dengan hanya memenuhi 14 indikator PHBS.

Dilihat dari data tersebut diatas, bahwa di Kabupaten Karawang sekolah yang belum memenuhi strata pertama PHBS hanya 18,1 % di tahun 2015.

Persentase fasilitas umum yang ber PHBS di tahun 2015 mengalami penurunan seperti halnya sekolah yang ber-PHBS, yaitu mengalami penurunan sekitar 12,48 % dari tahun 2014 menjadi 36,92 %. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya puskesmas yang belum melaporkan hasil kegiatan PHBS-nya ke Dinas Kesehatan. Dari 7 indikator PHBS di tatanan Fasilitas Umum, cakupan yang paling rendah adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umum.

Grafik 2.3

Sarana Pelayanan Kesehatan



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Dilihat dari jumlah sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

2) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Tabel 2.38
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
pada Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	684.638	684.638	684.638	857.446	856.845
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	551.261	551.261	551.261	-	551.261
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	48	50	50	132	-
4.	Jumlah PNS gol I dan II serta pensiunan yg memanfaatkan pelayanan kesehatan (<i>cost sharing</i>)	0	0	0	73.561	-
5.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18	19	22	22	-
6.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	-	-	-	1.200.565	1.459.880

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawan
Ket.:Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini diambil berdasarkan

data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Jumlah Peserta Jamkesda masih berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 585/Kep.645-Huk/2010 tentang Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang, dan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan SK yang terbaru. Untuk jumlah PNS yang golongan I dan II serta Pensiunan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan (*Cost Sharing*) saat ini tidak ada datanya, hanya ada data *Cost Sharing* untuk Pelayanan Jamkesmas. Dalam tabel juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Tabel 2.39
Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin
Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten)
Tahun 2014-2015

No.	Rumah Sakit	2014		2015	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	10.441	9.777.538.422	6.505	7.205.849.800
2.	RS Islam Karawang	7.290	4.678.742.709	5.235	2.821.707.700
3.	RS. Karya Husada	205	197.800.699	164	153.840.170
4.	RS. Fikri Medika	40	54.171.808	71	113.954.794
5.	RSIA Citra Sari Husada	2.635	1.971.195.213	986	821.164.470
6.	RS. Delima Asih	42	15.456.505	5	2.363.000
7.	RS. Bayukarta	13	15.998.000	17	10.832.000
8.	RSB. Dr. Joko	85	102.235.376	3	8.292.529

	Pramono				
9.	RS. Proklamasi	1.255	1.217.159.707	660	688.853.580
10.	RS. Izza	433	368.854.679	492	483.061.809
11.	RS. Dewi Sri	39	49.660.229	18	10.745.793
12.	RS.Cito	96	79.635.000	-	-
13.	RS. Lira Medika Center	-	-	-	-
14.	Puskesmas	-	-	-	-
15.	RSUPN Cipto	978	2.381.951.486	274	680.640.562
16.	RSUP Hasan Sadikin	2.243	3.267.295.422	441	827.173.300
17.	RS. Marzoeeki Mahdi	69	172.710.133	20	100.459.341
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	21	30.339.967	7	10.892.800
19.	RS. Saraswati	18	11.251.580	9	1.046.400
20.	RS. Puri Asih	408	842.859.760	637	1.016.493.104
21.	RS. Kusta Sintanala	6	14.857.875	3	1.223.085
22.	RS. Cicendo	59	48.613.520	12	19.276.000
23.	RS. Mitra Family	2	6.514.474	-	-
24.	RS. Titian Bunda	25	39.582.766	171	255.871.524
	Jumlah	26.403	25.344.425.330	15.730	15.233.741.761

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data diatas, jumlah kunjungan pasien yang ada berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan sekitar 10.673 pasien dan juga mengalami penurunan jumlah dana klaim yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 10.110.683.569,-. Ada kemungkinan ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS.

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Tabel 4.40
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

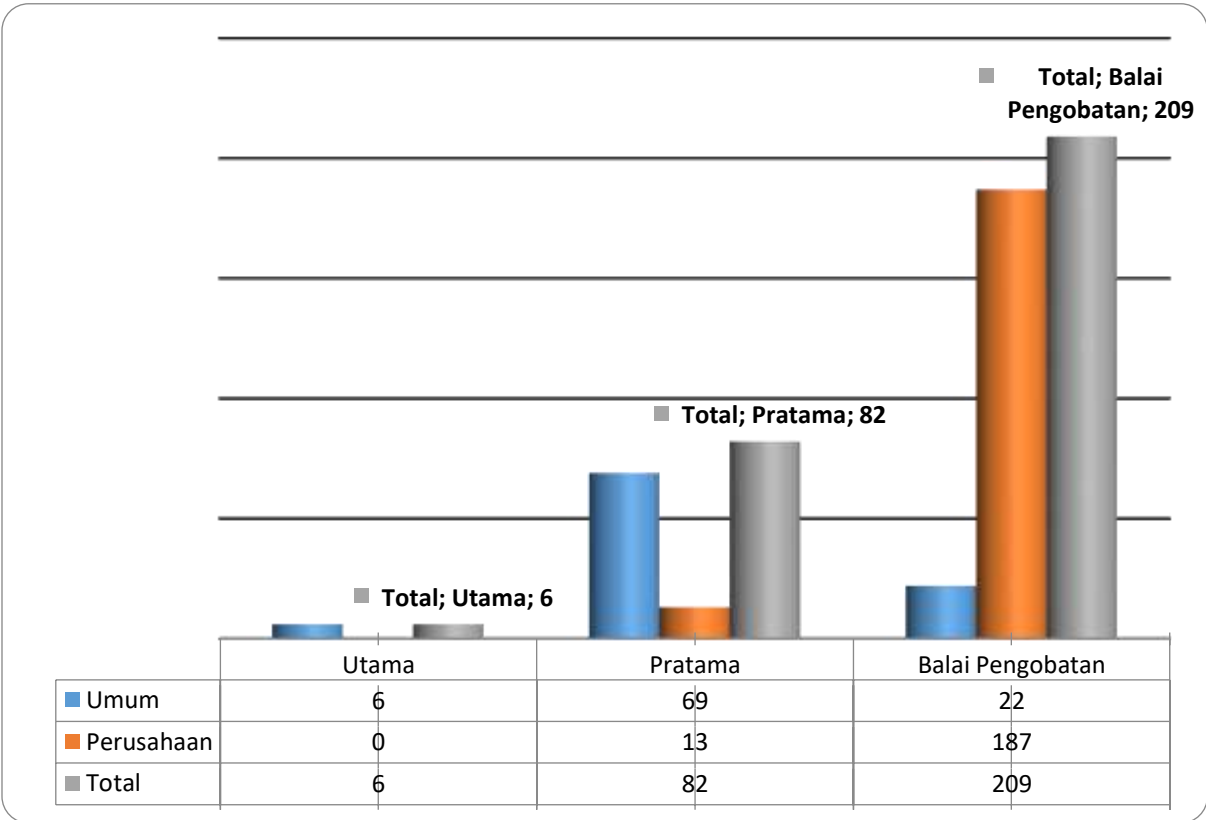
No	Sarana	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	15	15	16	18	19
3	RS Bersalin	1	2	1	1	0
4	Puskesmas	48	50	50	50	50
5	Pustu	69	69	69	70	71
6	Pusling+ kend. Operasional	94	99	111	373	388
7	PONED	10	19	28	28	28
8	Posyandu	2.218	2.227	2.233	2.255	2.271
9	Rumah bersalin	38	38	38	0	0
10	Apotik	179	190	246	248	260
11	Balai Pengobatan Mata	2	1	1	1	1
12	Balai Pengobatan Khusus	3	1	8	2	0
13	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	222	181	449	291	261
14	Balai Pengobatan Perusahaan	12	28	44	0	35
15	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari grafik diatas terlihat jumlah klinik di kabupaten karawang sebanyak 297 sarana dengan rincian Klinik Umum (Balai Pengobatan/BP) : 187 sarana, klinik pratama : 69 sarana, klinuk utama (Klinik dokter spesialis) : 6 sarana, dan klinik perusahaan : 35 sarana, serta klinik pratama : 13 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 260 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, dan juga Rumah Bersalin (RB, bila ijin sarana sudah habis masa berlaku RB maka harus mengurus kembali perijinannya menjadi Klinik atau kembali menjadi praktek bidan perorangan) terdapat 38 buah, Puskesmas 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) mengalami penambahan dari tahun

sebelumnya yang hanya 69 pada tahun 2013 dan 70 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi berjumlah 71 buah.

Grafik 2.4
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015



Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat jumlah klinik di Kabupaten Karawang sebanyak 297 klinik. Dari grafik diatas terlihat ada beberapa kategori klinik. Sebelum terbitnya Permenkes No.28 tentang klinik yang terbit pada tahun 2011, Kategori klinik disebut dengan istilah balai pengobatan. Dari tabel diatas jumlah balai pengobatan baik umum maupun perusahaan sebanyak 209 buah. Setelah terbitnya Permenkes No 28 tahun 2011 dan kembali terbitnya Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang KLinik, Kategori klinik dibagi menjadi dua jenis yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan menteri Kesehatan No 9 tentang Klinik Tahun 2014 Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Sehingga dari tabel diatas dapat disimpulkan jumlah klinik yang memiliki ijin di Kab. Karawang sebanyak 297 klinik terdiri dari 6 klinik utama, 82 Klinik Pratama (Umum dan Perusahaan), serta 209 Balai Pengobatan (umum dan Perusahaan).

Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014*	2015*
1	Dokter Umum	608	728	889	106	113
2	Dokter Spesialis	156	158	160	0	0
3	Dokter Gigi	81	87	108	46	47
4	Perawat	1.600	1.900	1.600	265	281
5	Sanitasi	42	46	46	25	32
6	Perawat Gigi	35	93	81	23	24
7	Bidan	813	815	1.086	694	725
8	Farmasi	37	62	265	28	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Ket:*=data pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Dari data tersebut diatas jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2014 dan 2015 adalah petugas kesehatan yang bekerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan), baik yang berstatus sudah PNS atau pun yang masih menjadi Pegawai Tidak Tetap. Data dari luar Lingkungan Dinas Kesehatan sulit di dapatkan sehingga jumlahnya sedikit. Tidak seperti halnya tahun 2011-2013 jumlah tenaga bisa didapatkan dengan mudah karena adanya penerbitan ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga pergeseran dan perpindahan dari tenaga kesehatan masih bisa diketahui, sehingga

jumlahnya pun bisa dengan mudah didapatkan.

4) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Tabel 2.42
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Tahun 2012-2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kasus Kematian Bayi	225	187	170	189
2	Kasus Kematian Ibu	55	64	59	68
3	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	83,13	82,45	44,15	47,91
4	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	76,85	75,56	70,33	80,02
5	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,44	91,54	87,12	90,57
6	Persentase pelayanan Ibu Nifas (%)	87,13	90,84	85,90	91,35
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	67,07	73,74	47,01	55,96
8	Persentase KN1 (Kunjungan Neonatal 1) (%)	93,45	96,46	91,55	95,74
9	Persentase kunjungan bayi (%)	82,89	89,91	91,77	97,66
10	Persentase pelayanan kesehatan anak balita (%)	71,43	79,16	82,16	80,03
11	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	10	28	28	12
12	Jumlah RS di Kabupaten Karawang yang melaksanakan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel. 2.43
Hasil Cakupan Program KIA di Kabupaten Karawang Tahun 2013 – 2015

No	Indikator	Target 2013 (%)	2013			2014			2015		
			SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%
1	K. 1	99	65.553	61.618	94,00	68.212	60.432	88,59	62.749	58.429	93,12
2	K. 4	98	65.553	59.440	90,67	68.212	58.042	85,09	62.749	56.175	89,52
3	LINAKES	96	62.573	57.282	91,54	65.112	56.725	87,12	59.896	54.248	90,57
4	N. 2	96	59.593	57.109	95,83	62.012	56.612	91,29	57.044	54.572	95,67
5	Kunjungan Bayi	96	59.593	53.578	89,91	62.012	56.907	91,77	57.044	55.712	97,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.44
**Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang
Tahun 2012-2015**

No	Penyebab	2012	2013	2014	2015
1	Ekslampsi/Preeklam si Berat	22	20	20	34
2	Pendarahan	12	18	12	17
3	Infeksi	0	5	3	6
4	Lain-lain	21	21	24	11
	Jumlah	55	64	59	68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.45
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	BBLR	56	83	74	63	64
2	Tetanus Neonatorum	2	2	1	0	0
3	Infeksi	9	3	3	6	8
4	Penyebab lain	19	16	15	19	23
5	Asfiksia	53	55	47	41	47
6	Kelainan Kongenital	32	37	20	21	18
7	Diare	4	4	3	2	3
8	Bronchopneumoni	4	6	5	6	6
9	Kelainan Saluran Cerna	0	0	1	1	0
10	Kelainan Syaraf	0	0	0	1	0
11	Lain-lain	13	19	18	10	20
	Jumlah	192	225	187	170	189

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tabel 2.46
Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2011-2015

No	Jenis Imunisasi	2011	2012	2013	2014	2015
1	HB 0-7 bulan	47.464	51.686	50.772	54.427	53.076
2	BCG	53.225	56.885	56.971	56.532	56.103
3	DPT HB 3	51.529	55.653	52.588	55.029	53.938
4	Campak	51.645	554.495	53.223	55.082	54.025
5	POLIO 4	50.406	54.854	53.905	56.029	54.364

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.47
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	12	12	15	184	215
2	Persentase Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	82,20	65,28	93	93,2	80,6%
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis</i>) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	13	13	13	15	17
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	22	26	10	11	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.48
Cakupan Imunisasi Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	BCG	53.225	90	56.971	96	56.532	95	56.103	98
2	DPT. 3	51.529	96	52.588	88	56.029	96	53.938	95
3	POLIO. 3	50.360	94	53.905	90.4	55.087	96	55.106	97
4	CAMPAK	51.645	90	53.223	89.3	55.082	95	54.025	95

5	HEPATITIS B.3	47.464	88	50.772	85	54.427	94	53.076	93
6	TT. 2	61.539	104	59.006	90	33.441	49	30.002	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Cakupan semua jenis imunisasi yang belum tercapai adalah imunisasi hepatitis B usia 0-7 hari (target 95%), karena bayi yang lahir di klinik atau Rumah Sakit terlambat untuk diimunisasi hepatitis B pada usia 0-7 hari.

Imunisasi TT 2+ tidak tercapai karena status TT di skrining berdasarkan jumlah imunisasi TT yang sudah didapat.

Tabel 2.49
Hasil Cakupan Program P2PL Tahun 2011-2015

No	Program	2011	2012	2013	2014	2015
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	2.098	2.562	2.484	2.609	2.118
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,1	1,7	1,8	1,7	1,6
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	39	41	72	92	104
	- Penemuan AIDS	-	0	10	55	101
4	P2 DIARE :					
	- Penemuan Kasus Diare	68.987	76.314	69.805	70.301	72.313
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	12.979	17.314	15.944	14.397	15.112
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	249	495	758	301	569
	- Kematian 4 (CFR)	2	4	7	2	4
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	11,5	22,8	35.00	13,3	25,7
7	P2 FILARIASIS	34	39		46	
	- Penemuan Kasus			43		51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tabel 2.50
Cakupan Sarana Air Bersih, Jamban Keluarga dan TPM Tahun 2011-2015

No	Nama Sarana	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Ledeng	49.092	9,32	50.396	9,61	49.955	9,40	58.749	10,37
	Sumur Pompa	86.891	16,49	76.897	14,67	74.957	14,10	70.834	12,51

	Tangan (SPT)								
	Sumur Gali (SGL)	70.317	13,35	63.340	12,08	65.334	12,29	64.676	11,42
	Penampungan Mata Air (PMA)	2.069	0,39	2.069	0,39	2.337	0,44	2.337	0,41
	Penampungan Air Hujan (PAH)	1.566	0,3	1.554	0,30	1.488	0,28	1.534	0,27
	Pompa Listrik	224.309	42,57	238.535	45,50	245.474	46,18	274.094	75,88
B.	Jamban Keluarga	318.418	60,44	328.380	62,64	340.446	64,05	358.565	63,30
C.	Tempat Pengolahan Makanan (TUPM) yang diperiksa	4.426	62,56	5.205	73,24	5.184	71,79	5.042	66,47
	TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	3.425	77,38	4.006	76,96	4.057	78,26	.958	78,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tabel 2.51
Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
Tahun 2012-2015

No	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan	2012	2013	2014	2015
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)	9.950.505.200	10.097.208.801	15.139.661.913	14.577.565.864

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 2.52
Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Apotik yang dipantau	30	50	70	100	50
2	Jumlah Toko Obat yang dipantau	20	15	20	20	25
3	Jumlah pedagang makanan yang dipantau	831	1.306	1.378	2.094	1.8 76
4	Jumlah Produsen makanan yang dipantau	728	906	669	1.138	1.132
5	Persentase Sediaan Farmasi yg sesuai Peraturan Perundang-undangan	-	-	8	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tabel 2.53
Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Balita yang ditimbang berat badannya	154.200	145.783	147.492	153.056
2	Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	8.634	16.480	18.172	20.269
3	Anak usia 6-59 bulan menadapatkan kapsul	187.247	136.091	178.725	182.414
4	Kasus Gondok (GAKY) yang ditangani	-	-	-	-
5	Jumlah Puskesmas melaksanakan surveilans gizi	50	50	50	50
6	Kecamatan yang memiliki data status gizi balita	30	30	30	30
7	Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	669	415	395	281
8	Jumlah Balita gizi kurang yang ditangani	15.274	7.908	7.496	7.477

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.54
Kegiatan Distribusi Tablet Tambah Daerah pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas Tahun 2012-2015

No	Distribusi	2012		2013		2014		2015	
		Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%
1	Fe 1 Ibu Hamil	60.862	94,49	59.206	90,32	60.645	88,91	58.307	92,92
2	Fe 3 Ibu Hamil	58.096	90,2	57.208	87,27	59.290	86,92	56.424	89,92
3	Fe Ibu Nifas	51.049	83,03	49.015	78,33	50.363	77,35	54.452	90,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.55
Hasil Cakupan Kegiatan Penimbangan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	Partisipasi Masyarakat (D/S)	63,82	75,13	70,69	65,77	67,96
2	Cakupan Program (K/S)	69,65	85,92	84,05	79,53	81,45
3	Keberhasilan Program (N/S)	49,00	54,54	43,16	40,80	46,06
4	Efek Program (N/D)	76,91	72,59	61,06	60,80	62,06
5	Kelangsungan Program (D/K)	91,39	87,44	84,11	82,95	83,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak mengalami peningkatan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, selain cakupan program yang mengalami peningkatan, kasus kematian pun ikut naik dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya, yaitu pada kematian ibu dan kematian bayi.

Penyebab terbanyak kasus kematian ibu masih didominasi oleh kasus PEB dan perdarahan, sedangkan penyebab kematian bayi masih didominasi oleh BBLR dan asfiksia. Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus kematian ibu yaitu terjadi karena faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial. Faktor terlambat merujuk dan lama perjalanan sampai ke tempat tujuan rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografis. Selain itu juga kematian ibu mencerminkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan prenatal dan obstetri. Pada tahun 2015, di kabupaten Karawang terjadi 68 kasus kematian ibu yang tersebar di 35 puskesmas, dan terdapat 189 kasus kematian bayi yang tersebar di 40

puskesmas. Sebaran kematian tidak terganggu oleh akses kesehatan dalam hal ini jarak tempuh dari puskesmas ke fasilitas kesehatan tempat rujukan, karena semuanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya kasus kematian ibu yaitu :

- Faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial.
- Faktor terlambat merujuk dan sampai ke tempat rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender, dan geografis.
- Faktor kurangnya kem,ampuan SDM dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Pencapaian cakupan program kesehatan ibu dan anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun tahun ini masih belum memenuhi target yang diharapkan. Namun dengan kenaikan capaian sudah menunjukkan kinerja petugas kesehatan sudah cukup baik walaupun kedepan harus lebih ditingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel. 2.56
Distribusi Vitamin A pada Bayi dan Balita Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Pebruari)								
	a. Bayi	23.232	79,3	16.971	56,96	18.068	58,28	18.464	64,74
	b. Balita	145.320	99,1	136.091	92,81	144.996	89,37	146.969	88,66
2	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Agustus)								
	a. Bayi	21.763	74,28	15.145	50,82	15.851	51,13	16.981	59,54
	b. Balita	142.279	97,03	145.243	99,05	145.824	89,88	151.271	91,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.57
Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2011-2015

No	Status Gizi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gizi buruk (Sangat kurang)	0.80	0.91	0,51	0,41	0,39
2	Gizi kurang	6.29	8.51	4,19	3,9	3,79
3	Gizi baik	9 0.30	88.25	93,44	93,4	94,18
4	Gizi lebih	1.24	2.6	1,83	2,31	1,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data hasil Program perbaikan gizi masyarakat mengalami kenaikan dari semua kegiatan, mulai dari hasil kegiatan penimbangan balita di posyandu, cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan kapsul vitamin A, dan kegiatan distribusi tablet Fe untuk ibu hamil dan ibu nifas. Meskipun naik cakupannya jika dibandingkan dengan tahun lalu tapi belum dapat mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah sasaran riil dengan sasaran proyeksi yang ada.

Untuk kasus balita gizi buruk masih banyak ditemukan selama tahun 2015, yaitu sebanyak 281 kasus. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 395 kasus, jumlah penurunannya sebesar 114 kasus. Semua balita gizi buruk yang baru ditemukan semuanya sudah mendapatkan perawatan (100%) mulai dari dilakukannya validasi data anthropometri, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi sampai dengan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT-P). Pada tahun 2015 jumlah balita gizi kurang yang terjaring pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) sebanyak 7.477 anak. Dilihat dari tabel diatas persentase jumlah balita pada tahun 2015 (3,79%) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (3,9%).

Penurunan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang karena

Pemerintah Kabupaten Karawang sangat serius dalam penanganan masalah balita kurang gizi pada tahun 2015, hal ini terbukti dengan adanya klinik gizi rawat jalan yang berada di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas tentang gizi tentang konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan anak serta Pemberian Makanan Bayi dan Anak, dan juga dilakukan surveillance gizi, penyuluhan dan konseling gizi.

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan telah dilaksanakan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu serta jaringannya yang pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	3	9	20	0
2.	Pembangunan Gedung PONED (unit)	9	9	1	-
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	4	1	3	2
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	1	0	-	-
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.59
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan					
	a. Rumah Sakit	16	16	19	19	20
	b. Klinik	230	230	493	247	297
	c. Puskesmas	48	50	50	50	50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

12) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rujukan**

Tabel 2.60
Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rujukan
Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase BP Puskesmas yang mempunyai protap pengobatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan	85%	85%	87%	89%	87,3%
3.	Persentase pasien yang memanfaatkan rujukan puskesmas	2,05%	2,29%	3,20%	2,72%	2,85%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Semua puskesmas sudah memiliki protap pengobatan untuk pelayanan kesehatan dasar,tapi belum sesuai dengan standar permenpan atau permenkes sehigga tahun ini diadakan workshop sop sesuai dengan permenpan .Peserta terdiri dari perwakilan puskesmas yang mau diakreditasi tahun 2016 saat ini sedang tahap penyusunan SOP sesuai dengan standar yang ada dan disosialisasikan ke semua puskesmas dan akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan . sedangkan pengobatan gigi belum mempunyai protap pengobatan tahun ini akan dibuatkan sesuai dengan standar.

Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan hanya mencapai 87,3 % ada beberapa puskesmas memiliki data yang tidak lengkap ,alat yang tidak memadai , obat yang terbatas serta kompetensi SDM yang terbatas sehingga sejak tahun 2014 dan tahun 2015 semua dokter telah dilatih kegawat daruratan pemenuhan alat kesehatan dan obat dengan menggunakan dana kapitasi dibeberapa puskesmas.

13) Program Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.61
Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KK rawan dibuat asuhan Keperawatan (Askep)	8.692	3.680	6.358	7.558	8.348
2.	Jumlah keluarga mandiri (KM) Tingkat IV	5.342	2.337	3.615	4.815	4.850
3.	Jumlah pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta	65.353	68.358	70.105	71.305	90.534

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Jumlah KK rawan yang dibuat asuhan keperawatan (ASKEP) disetiap tahun terjadi peningkatan karena adanya dana BOK dan kapitasi sehingga perawat semangat membuat Askep melakukan kunjungan rumah keluarga rawan demikian juga pembinaan yang dilakukan perawat dengan tujuan keluarga yang dibina menjadi mandiri atau KM IV tetapi untuk menuju KM IV agak sulit dengan alasan indikator KM IV mengharuskan keluarga melakukan tindakan promotif secara aktif .

Jumlah Pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta walaupun terjadi peningkatan baru mencapai 6 % dari pengunjung total dipuskesmas hal ini dikarenakan banyak pasien yang tidak mau dirujuk ke ruang konseling masih beranggapan membutuhkan waktu yang lama ,belum memahami konsep pencegahan lebih baik dari mengobati dan pasien sehat tidak mau memanfaatkan klinik graha semesta karena masih memiliki pemahaman paradigma sakit bukan paradigma sehat sehingga dibutuhkan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan tentang manfaat graha semesta dan penyuluhan secara pribadi dengan menggunakan lembar balik serta contoh-contoh yang lebih lengkap.

b. RSUD

14) Program Jaminan Kesehatan Nasional

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam bidang kesehatan, dimana program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang sudah diberlakukan mulai tahun 2014, dengan pengelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), RSUD Karawang mulai bulan Januari 2014 melayani pasien BPJS yang terdiri dari pasien PBI (Jamkesmas) dan Non PBI (PNS,TNI,POLRI dan Perusahaan yang sudah tergabung).

Total pembayaran pasien BPJS selama tahun 2015 sebesar Rp.113.519.245.082,-(total pasien 111.977 orang), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Rawat Jalan	93.641	28.196.675.700
2.	Rawat Inap	18.336	85.322.569.382
	TOTAL	111.977	113.519.245.082

Sedangkan pasien maskin yang tidak terdaftar BPJS, ditanggung oleh program Karawang Sehat dengan rincian jumlah pasien dan pembayaran sebagai berikut :

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Rawat Jalan	5.743	1.415.272.300
2.	Rawat Inap	1.481	6.702.967.800
	TOTAL	7.224	8.118.240.100

Pekerjaan Umum

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Realisasi pembangunan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten sepanjang minimal 80 Km pertahunnya. Pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.62
Realisasi Program-program Peningkatan Jalan/Jembatan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa(Km)	100,84	173,79	331,14	209,42	202.19
2	Pembangunan Jalan Kabupaten (Km)	21,18	20,13	-	-	-
3	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Km)	-	0,07	0,03	0,14	0.55
4	Pembangunan Jembatan Kabupaten (Km)	0,119	0,404	0,772	-	1,09
5	Jumlah Pembangunan Jembatan, fly over, Underpass baru (unit)	-	16	24	3	54
6	Jumlah peningkatan Jembatan, fly over, Underpass (unit)	-	8	3	14	38
7	Panjang jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) (Km)	-	55,894	39,16	19,99	32.05
8	Jumlah jembatan penghubung lokasi strategis (unit) - Jemb. Pakisjaya	-	7	5	3	7

	- Pelebaran Jemb. Citarum Akses Tol Karawang Barat - Jemb. Ampera II - Jemb. Cigunungsari - Jemb. Sasak Loneng - Jemb. Ciderewak - Jemb. Cibulan-Bulan					
9	Jumlah pemeliharaan jembatan (unit)	-	4	26	23	36

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong minimal 2.000 M’ pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.63
Realisasi Program-program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan drainase/gorong-gorong (Km)	2,000	1,636	4,000	4,900	42.58

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pelaksanaan pembangunan turap/talud/bronjong minimal 1.000 M’ pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011- 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.64
**Realisasi Program-program Pembangunan Turap/Talud/
Bronjong Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Km)	1,889	13,081	13,500	11,754	64.81

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tabel 2.65
Realisasi Program-program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jalan (Km)	319,72	13,071	18,97	4,97	10,57
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan(Km)	-	60,374	75,40	24,23	21,28
	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jembatan, Fly over, Underpass (Km)	0,716	0,194	0,190	0,54	0,70

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

5) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.

Tabel 2.66
Realisasi Program-program Peningkatan Sasaran Perencanaan dan Data Base Jalan, Jembatan serta Pengairan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan perencanaan jalan, jembatan dan pengairan (paket)	452	1.120	1.540	1.884	2.487
2	Pembangunan system informasi/database jalan, jembatan dan pengairan (paket)	-	7	12	-	2
3	Penyusunan DED perencanaan fisik tertentu (paket)	-	23	47	20	32

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya.

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat bahkan nasional memiliki peran yang vital dalam program ketahanan pangan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap sektor pertanian, dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya minimal 40,00 km dan pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya minimal 40 km.

Beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga status Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat diantaranya adalah pengembangan, pengelolaan pada daerah irigasi sesuai kewenangan kabupaten yaitu dengan uasan dibawah 1.000 ha.

Tabel 2.67
Realisasi Program-program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Km)	13,88	13,327	14,00	15,87	2.92
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Km)	20,00	19,50	17,30	30,91	68,55

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

7) Program Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Jaringan Irigasi Pengairan.

Tabel 2.68
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Jaringan Irigasi Pengairan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan dan Pemutakhiran data base jaringan pengairan (paket)	-	1	1	-	-

8) Program Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai

Tabel 2.69
Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
1	Wilayah Pengendalian Banjir (Km)	-	-	-	-	-
2	Wilayah penanganan Abrasi di pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

9) Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya diperlukan untuk menjaga kelestariannya dalam rangka menjaga fungsinya untuk menyokong pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Karawang memiliki banyak sungai, situ serta sumber air tanah.

Tabel 2.70
Realisasi Program-program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Normalisasi saluran pembuang (Km)	10,77	69,001	15,00	32,68	4.48
2	Pembangunan pengamanan daerah pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

10) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Tabel 2.71
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan jalan poros desa (Km)	-	77,25	81,76	74,44	108,92
2	Pemeliharaan jalan poros desa (Km)	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tahun 2015 penanganan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan, dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya termasuk pembangunan gorong-gorong/box culvert.Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga membangun infrastuktur dalam bidang pengairan irigasi yang di dalamnya adalah pembangunan/rehabilitasi/normalisasi sejumlah saluran dari mulai

saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun bangunan lainnya seperti pintu air, embung/dam mini yang semuanya adalah untuk menunjang system pertanian, khususnya padi sawah yang sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh.

Tabel 2.81
Analisa Perbandingan Kinerja Sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten minimal 80 Km	100,48 Km	173,79 Km	199,50 Km	134,98 Km	202,28 Km
2	Terlaksananya rehabilitasi jalan dan bahu jalan kabupaten minimal sepanjang 40 Km	21,18 Km	93,575 Km	55,50 Km	4,97 Km	3,24 Km
3	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan kabupaten minimal 350 Km	319,72 Km	73,445 Km	46,50 Km	24,23 Km	21,28 Km
4	Terlaksananya pembangunan jalan desa (penyirtuan dan Rigid) minimal 100,00 Km	44,07 Km	20,13 Km	49,88 Km	74,44 Km	108,92 Km
5	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan / pelebaran/ penggantian jembatan minimal 4 Unit	4 unit/ 716 M'	8 unit/ 230,30 M'	26 unit/ 152 M'	37 unit/ 728 M'	36 unit/ 532,8 M'
6	Terlaksananya pembuatan turap/talud/bronjong	1.889 M'	13.081 M'	13.500 M'	11.754 M'	89.518,76 M'
7	Terlaksananya pembuatan/perbaikan assainerring/drainage minimal 2000 M	2.000 M'	1.636 M'	4.000 M'	4.900 M'	23.025,55 M'
8	Terlaksananya pembangunan jembatan minimal 8 unit	119 M'	16 unit/ 404 M'	772 M'	3 unit/ 147 M'	53 unit/ 1.094,3 M'
9	Terlaksananya pemeliharaan jaringan	20,00	19,50	17,30	30,91 Km	68,55 Km

	irigasi minimal 100,00 Km	Km	Km	Km		
10	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi minimal 25 Km	13, 88 Km	13,327 Km	14,00 Km	15,87 Km	2,92 Km
11	Terlaksananya pengerukan dan normalisasi jaringan irigasi minimal 10 Km	-	69,001 Km	15,00 Km	4,45 Km	202,16 Km
12	Terlaksananya pembuatan turap, talang air, pintu air, bangunan bagi, bending, saluran minimal 1 Km/ 6 unit dan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	6 unit	38 unit pintu air	25 unit pintu air	20 unit pintu air	16 unit pintu air
13	Terlaksananya rehabilitasi, pengerukan dan normalisasi sungai, saluran pembuang dan muara minimal 10 Km	10,77 Km	69,001 Km	15,00 Km	32,684 Km	71,470 Km
14	Terlaksananya pembangunan pengaman daerah abrasi pantai minimal 800 M'	-	600 M'	300 M'	-	697,5 M'
15	Terlaksananya rekrutmen waker sebanyak 400 orang ; terlaksananya pembinaan waker sebanyak 400 orang	400 orang	400 orang	450 orang	-	400 orang
16	Terlaksananya pengadaan alat berat (Excavator dan Mesin Gilas)	-	-	-	9 unit	2 unit

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Secara kuantitatif data kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pengairan/jaringan irigasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.82
Kondisi Jalan, Jembatan dan Pengairan/Jaringan Irigasi
di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2015

STATUS	VOLUME (KM)	KELAS (TONASE)	BAIK (KM)	SEDAN G (KM)	RUSAK (KM)	KET.
-Jalan Negara	69,516	I	51,22	10,97	7,32	
-Jalan Provinsi	47,927	III	33,55	9,59	4,79	
-Jalan Kabupaten	1.582,8	III	1.028,82	316,56	237,42	
-Jalan layang(Fly over)	2,8	III	2,52	0,28	-	
- Jalan Tol	37,495	Tol	36,37	1,12	-	
- Jalan Desa	1.057,23	-	475,75	264,31	317,17	
- Jembatan Negara	2,19		2,19	-	-	
- Jembatan Provinsi	0,16		0,16	-	-	
- Jembatan Kabupaten	2,55		1,61	0,61	0,33	
- Bendung	2,55		1,53	0,62	0,4	
- Bangunan Bagi/sadap dan bangunan lainnya	382		95	137	150	
- Saluran Induk	120		25	40	55	
- Saluran Sekunder	289,6		145,77	219,94	223,89	
- Citarum	60		51	6	3	
- Cibeet	35		-	-	-	
- Cigentis	20		-	-	-	
- Kali Cilamaya	30		-	-	-	
- Situ	12 buah		-	-	-	
- Saluran pembuang	912		182,40	456,00	273,60	
- Muara	27 buah		5	15	7	
- Pantai	76,42		1,31	30,00	45,1	

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Penataan Ruang

1) Program Perencanaan Tata Ruang

Tabel 2.83
Realisasi Kinerja Perencanaan Tata Ruang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah produk kebijakan tata ruang daerah yang dihasilkan	20 lokasi	29 lokasi	1. Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan dan DED Komplek Perkantoran. 2. Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Karawang 3. Penyusunan RDTR dan zoning Regulation Wilayah Kota Karawang. 4. Penyusunan Database Perumahan	1.Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation 2.Kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang 3.Pembuatan Peta Garis Kawasan Perkotaan Kab. Karawang	1.Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation, kawasan Cilamaya dan Rengasdengklok 2.Kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang 3.Kajian Teknis IPLT, RTH, Pengelolaan Sampah, Pemakaman 4.Penyusunan Juklak Juknis Akta Pemisahan, Pertelaan dan Sertifikat Laik Fungsi

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

2) Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.84
Realisasi Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah taman kota yang mendapat penataan dan pemeliharaan	14 lokasi	14 lokasi	15 lokasi yaitu : 1. Taman Tugu Udang 2. Taman Depan kantor Imigrasi 3. Ruas Jembatan alun-alun 4. Taman Dinas Kesehatan 5. Taman persimpangan Badami 6. Taman Veteran 7. Taman Playover 8. Taman Alun-alun 9. Median Depan Kantor CPM 10. Taman gardu alun-alun 11. Taman Lampu merah depan RMK 12. Taman Rengasdengklok 13. Taman Lampu Merah Tanjungpura 14. Taman Lampu Merah Klari 15. Taman Bunderan Pabrik Es	23 lokasi yaitu al : 1. Taman Sepandan Rel Kereta Api Depan Pertokoan Hero. 2. Taman Depan Kantor Dinas Cipta Karya 3. Taman Median Jalan Negara (Tugu batas Karawang – Bekasi s.d Jembatan Citarum) 4. Taman Median Jalan Negara (Jembatan Citarum – Lampu Merah Terminal Tanjungpura) 5. Taman Lampu Merah Tol Karawang Timur 6. Taman median Jembatan Gantung Telukjambe 7. Taman Jembatan Gantung Telukjambe 8. Taman Median Depan Pos Gatur Lantar Gempol 9. Tama Tugu Udang (lanjutan) 10. Taman Median Depan BJB 11. Taman Pos Lantas Gempol 12. Taman Sepadan Rel Kereta Api di bawah Fly Over 13. Taman Depan Terminal 163 14. Taman Bundaran Perumnas Telukjambe Depan Masjid Raya/Tiang Sutet 15. Taman Median Jl. Negara (Lampu Merah Terminal Tanjungpura – Lampu Merah Jl Alternatif Tanjungpura) 16. Taman Bundaran Air Mancur Pabrik Es (lanjutan) 17. Taman NNKBS (Lanjutan) 18. Taman Lampu Merah Jl. Alternatif Tanjungpura (lanjutan) 19. Taman Median Lampu Merah Klari (lanjutan) 20. Tamn Pintu Rel Kereta Api Jln. Otista 21. Penataan Taman Alun-alun. 22. Penataa RTH Jl. Pasundan 23. Penataan Taman Kota di pertigaaan Jl Menuju Terminal Cikampek	37 lokasi antara lain : 1. Pembangunan dan Penataan Taman Median Jl. Gempol Sepadan Rel Kereta Api dengan Pos Lantas Gempol 2. Penataan Taman Pulau Jalan Badami 3. Pembangunan Taman Pulau Jl Perumnas Telukjambe Blok L dan M, Penataan Taman Pulau Jl Bunderan Perumnas Arah Desa Wadas dan penataan Taman Median Perumnas Telukjambe (Bunderan Sutet Sampai Dengan Bunderan Wadas) 4. Pembangunan dan Penataan Taman Rawasari 5. Penataan Taman Ibu (Pertigaan DINKES) 6. Penataan Taman Seroja dan Taman Depan Engsiutong 7. Pembangunan dan Penataan Taman Sari Ayu 8. Taman Tugu Padi 9. Taman dibawah Flyover Karawang Barat 10. Taman Median Sasak Misran 11. Penataan Bundaran Air Mancur (Lanjutan) 12. Penataan Taman Sempada Jalan Depan Mega M 13. Taman Sempadan Jembatan Citarum Bank BJB 14. Taman Sempadan Jalan Depan Terminal 163 15. Taman Median Jalan Depan AB 16. Pemagaran Taman Ade Irma Suryani 17. Taman Median Depan Jembatan Purwasari Depan Gedung Bulog 18. Taman Pulau jalan Jembatan Gantung Telukjambe 19. Taman Sempadan jalan depan Sport Hall 20. Taman Pulau Adiarsa 21. Rehabilitasi Taman Veteran 22. Penataan Taman Median Jalan Tanjungpura 23. Pembangunan dan Penataan Taman Jl. Siliwangi dan Taman Sudut APIL DPRD dan

						Sudut APIL Kantor KEMENAG Kabupaten Karawang 24. PenataanTaman Interchange Tol Karawang Timur 25. Penataan Taman Gading Elok 26. Penataan Taman Situ Gempol 27. Penataan Taman Sempadan Jl. Depan Kupoh 28. Penataan Taman Lapang Serbaguna Kepuh 29. Penataan Taman Alun-alun Lanjutan 30. Penataan Taman Bunderan Peruri 31. Penataan Median Rel Kereta Api depan Kantor Dinas Cipta Karya (lanjutan) 32. Taman Bunderan Depan Mega Mall Karawang 33. Penataan Taman Rekreasi Lapang Karangpawitan 34. Penataan Taman Makam Pahlawan Pancawati 35. Taman Makam Pahlawan di Perumnas Telukjambe 36. Pembangunan dan penataan Taman Pulau Jalan Depan Plaza dan Median di bawah Fly Over Cikampek 37. Taman Median Jalan Jembatan Tamelang Cikampek
2	Jumlah lapangan olah raga masyarakat di pusat kegiatan	6 lokasi	6 lokasi	11 lokasi yaitu : 1. Lapang Desa Wargasetra Kec. Tegalwaru 2. Lapang Desa Kertasari Kec. Pangkalan 3. Lapang Desa Pangulah Utara kec. Kotabaru 4. Lapang Desa Pangulah Selatan Kec. Ktbaru 5. Lapang Desa Cengkong Kec. Purwsari 6. Lapang Desa Lemahkarya Dsn. Wagir Jengkol Kec. Tempuran 7. Lapang Desa Medan Karya Kec. Tirtajaya 8. Lapang Dsn. Kramat Jaya Kec. Batujaya 9. Lapang Bola Lampean 10. Ds. Wanci Mekar Kec. Kotabaru 11. Lapang Karangpawitan Karawang	Sarana Olah Raga : 12 lokasi 1. Pemb. Sarana Panjat Tebing 2. Pemb. Gedung Olah Raga Kec. Tirtajaya 3. Penataan Lapang Serba Guna (lanjutan) 4. Pengarugan Lapang Bola Perseto Dsn.Krajan Ds. Cialongsari Kec. Klari 5. Penataan Lapang Sepakbola Ds. Wancimekar Kotabaru 6. Penataan Lapang Bola Dsn. Sukatani Ds.Pangulah Utara Ktbr 7. Penataan lapang Bola Dsn. Gandoan Ds.Pangulah Selatan Kec. Kotabaru 8. Penurapan Lapang Sepak Bola Dsn. Lampean Ds. Kedawung Lemahabang 9. Pengarugan Lapang Bola Ds.	12 lokasi antara lain : 1) Penataan Lapang serba guna (lanjutan) 2) Emplacement Lapang Karangpawitan 3) Penataan Ruang Publik Perum Bumi Taruno Permai Adiarsa 4) Pengarugan Lapangan Sepak Bola Astana Cinangoh Gg. Beo Karawang Wetan 5) Pemagaran Lapangan Sepak Bola Raseta Kp. Buniagi Seri RT 02/RW 01 Karawang Timur 6) Penataan Lapangan Sepak Bola Perseto Cibalongsari Klari 7) Penataan lapangan Sepak Bola Tegal Renceng Kp. Kidang Ranggah, Cintaasih Pangklan 8) Penataan Lapangan Sepak Bola Dsn. Sukamaju, Cikampek Timur, Cikampek 9) Panataan Lapang Sepak Bola Kec. Kotabaru (Lanjutan), Wancimekar, Kotabaru.

					Lemahduhur Kec. Tempuran 10. Pengarugan Lapang Bola Ds. Bolang Trtjy 11. Penataan Lapang Olah Raga Perum Gading Elok Krw Timur 12. Pembuatan Tribun Lapang Bola Ds. Pangulah Selatan Ktbr	10) Pemagaran dan Drainase Lapangan Sepak Bola Pangulah Selatan, Kec. Kotabaru 11) Pemagaran Lapangan Sepak Bola, Pangulah Utara Kec. Kotabaru. 12) Pengarugan Lapangan Sepak Bola Dsn. Kelantarik, Lemahabang.
3	Jumlah bangunan yang memiliki nilai sejarah yang mendapat penataan	4 TPU bersejarah	4 TPU bersejarah	2 TPU bersejarah : 1. Makam Syech Jakaria Pakisjaya 2. Taman Makam Pahlawan Pancawati Kec. Klari	3 lokasi : 1. Penataan Komplek Makam Bupati Karawang, Manggungjaya Cikul 2. Penataan Taman Makam Pahlawan Pancawati 3. Makam Mbah Ru'biah Cikampek Pusaka Ckp	12 Lokasi yaitu : 1. Taman Makam Pahlawan Perumnas Telukjambe 2. Makam Pejuang Siliwangi Kec. Tegalwaru 3. Makam Mbah Nagasari, Kec. Karawang Barat 4. Makam Wirasaba, Kec. Telukjambe Timur 5. Makam Pejuang Kemerdekaan Kecamatan Rengasdengklok 6. Komplek Makam para Bupati Manggungjaya, Cilamaya Kulon 7. Makam Raden Anom Wirasuta Tegalwaru 8. Makam Mbah Jabig Ds.Cikampek Utara 9. Makam Mbah Timbel Cibungur, Krw Wetan, Krw Timur 10. Makam Jati Ugel Karangjaya Tirtamulya 11. Makam Mbah Dalem Adiarsa Karawang Barat 12. Makam Mbah Kirasimah Ciptasari Pangkalan
4	Jumlah kebijakan produk tata ruang daerah yang dihasilkan (IMB)	1.161 lembar	1.302 lembar	1. 880 rekomendasi IMB 2. 60 rekomendasi siteplan	1. 1.135 Rekomendasi IMB, 2. 50 Rekomendasi Siteplan	1. 1.365 Rekomendasi IMB 2. 148 Rekomendasi Siteplan untuk kegiatan perumahan dan non perumahan
5	Jumlah PJU yang dibangun	371 titik	764 titik	1.481 titik	1.085 Titik	1.200 Titik
6	Luas ruang terbuka hijau di Karawang	1.000 M'	1.000 M'	1.000 M'	23.699,15 M ²	30.966,6 M ²

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

Perencanaan Pembangunan

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tabel 2.85
Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi 2015
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Karawang	1 jenis buku (dicetak 60 eks)
2	Indeks Harga Konsumen (IHK)	1 jenis buku (dicetak 40 eks)
3	Indeks Nilai Tukar Petani (INTP)	1 jenis buku (dicetak 40 eks)
4	Penyusunan Proyeksi Penduduk Kab. Karawang	1 jenis buku (dicetak 60 eks)
5	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	1 jenis buku (dicetak 60 eks)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyediaan serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk bidang ekonomi maka disusunlah :

1. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menyediakan data indikator makro yang dapat dipakai untuk mengamati perekonomian Kabupaten Karawang. Data tersebut dapat dapat digunakan oleh para birokrat pemerintahan, peneliti dan masyarakat dalam mengevaluasi dan perencanaan perekonomian. Terutama untuk mengambil berbagai kebijakan pembangunan pada umumnya.
2. Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) disusun untuk menyediakan informasi mengenai indikator ekonomi perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dtujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat, seperti inflasi (tingkat kenaikan) dan

deflasi (tingkat penurunan) dari harga barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

3. Buku Indeks Nilai Tukar Petani (INTP) disusun untuk menyediakan informasi mengenai indikator ekonomi perkembangan tingkat daya beli petani di Kabupaten Karawang. INTP juga berguna untuk menghitung laju inflasi di pedesaan.
4. Buku Penyusunan Proyeksi Penduduk Kab. Karawang disusun untuk menyediakan informasi mengenai data perkembangan penduduk. Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu lalu dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada saat ini dan masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masingmasing

asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

5. Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah disusun untuk memberikan informasi mengenai potensi ekonomi daerah melalui pemetaan. Sistem pentransformasian data menjadi basis pengetahuan yang diharapkan mampu mendukung kebijakan pengembangan potensi ekonomi daerah bagi pencapaian kinerja kemajuan sesuai yang diharapkan. Pemetaan potensi ekonomi daerah dilakukan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu daerah menuju penciptaan daya saing dan merancang rencana serta menentukan strategi pembangunan ekonomi di Daerah untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya saing yang tinggi.

2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Tabel 2.86
Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya Tahun 2015

No	Uraian	2015
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	1 jenis buku (dicetak 10 eks)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Tabel 2.87
Realisasi Kinerja Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Tahun 2015		
No	Uraian	2015
1	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Tanjungpura-Badami Kabupaten Karawang	5 buku
2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Karawang	10 buku dan 5 CD
3	Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 jenis buku (dicetak 10 eks)
4	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 2	10 buku
5	Penunjang Water and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 2	1 jenis buku (dicetak 10 eks)
6	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Karawang	10 buku
7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana/Tata Ruang	1 jenis buku (dicetak 10 eks)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyediaan serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam maka disusunlah :

1. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Tanjungpura-Badami Kabupaten Karawang

Latar Belakang:

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Kabupaten Karawang berimplikasi pada kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya. Salah satu prasarana yang sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagaimana di atas adalah prasarana di sektor transportasi berupa jalan. Jaringan jalan sebagai salah satu prasarana angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau kawasan. Hampir 70% pergerakan lalu lintas angkutan orang dan barang dilakukan di jalan

(Priyambodo, 2012). Jalan atau sektor transportasi secara umum merupakan salah satu sektor yang mempunyai *trickle down effect* terhadap sektor-sektor yang lain. Hal ini berarti pembangunan sektor transportasi secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan sektor-sektor yang lain.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan dengan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Sejalan dengan aturan di atas, dalam rangka mewujudkan suatu sistem jaringan transportasi yang handal untuk menunjang pertumbuhan dan sebaran kegiatan ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 mengamanatkan perlunya pembangunan jalan baru Tanjungpura-Badami. Pembangunan Jalan Lingkar Tanjungpura-Badami diperlukan sebagai salah satu solusi dari persoalan kinerja jalan Tarumanegara (Akses Tol Karawang Barat) yang mulai jenuh dengan V/CR mendekati 1 (satu). Amanat sebagaimana RPJPD kemudian dipertegas dengan arahan tata ruang melalui RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.

Maksud :

Maksud dari kegiatan adalah untuk menghasilkan dokumen kelayakan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan

kebijakan, strategi dan program kerja untuk mewujudkan transportasi yang terpadu (efisien dan efektif).

Tujuan :

Tersedianya dokumen studi kelayakan jalan lingkar Tanjungpura-Badami sebagaimana amanat rencana pembangunan (RPJPD) dan rencana tata ruang (RTRW).

Sasaran :

Tersusunnya dokumen studi kelayakan sebagai pedoman pembangunan Jalan Lingkar Tanjungpura-Badami Kabupaten Karawang.

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Karawang.

Latar Belakang :

Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) menjadi instrumen penting untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang serasi antar sektor dan antara sektor dengan alokasi ruangnya, terutama yang terkait dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Sehubungan pelaksanaan kegiatan RPKPP, diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan sehingga diketahui sejauhmana pelaksanaan RPKPP sesuai dengan perencanaan. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka upaya mendapatkan formulasi terbaik sebagai bahan kebijakan pengembangan RPKPP di masa yang akan datang.

Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan RPKPP yang telah dikonsepskan

pada tahun 2013 sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana RPKPP.

Tujuan :

Menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan RPKPP sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.

Sasaran :

Sasaran penyusunan dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas ini adalah:

- Tahapan persiapan;
- Tahap identifikasi potensi permasalahan;
- Tahap perumusan rencana aksi program;
- Tahap perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1;
- Tahapan partisipatif;
- Tahapan kelembagaan;
- Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3. Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kabupaten Karawang

Latar Belakang :

Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah maka diperlukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Selain itu untuk penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Karawang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya, dan berkelanjutan, sesuai

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan untuk operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang. Lembaga ini bersifat *ad-hoc* dimana fungsi utama organisasi adalah untuk memudahkan upaya penyelesaian permasalahan dan/atau konflik penataan ruang di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah menjalin pelaksanaan tugas-tugas operasional baik di tahap perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan :

Menjamin implementasi kebijakan penataan ruang yang selaras dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan secara berjangka menurut tahapan-tahapan yang dirinci berdasarkan rencana kegiatan terperinci.

Sasaran :

Sasaran kegiatan Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Karawang ini adalah:

- Terwujudnya koordinasi dalam merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Karawang;
- Terwujudnya paduserasi antara rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten Karawang dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup;

- Tercapainya pengintegrasian, keserasian, dan keharmonisan rencanatataruang Kabupaten Karawang dengan rencana tataruang wilayah nasional, rencana tataruang pulau/ kepulauan, rencana tataruang kawasan strategis nasional, rencana tataruang wilayah provinsi, rencana tataruang kawasan strategis provinsi, danrencana tataruang wilayah kabupaten / kota yang berbatasan;
- Tersinerginya penyusunan rencana tataruang Kabupaten Karawang dengan Provinsi Jawa Barat dan antar kabupaten / kota yang berbatasan;
- Terkoordinasinya pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tataruang di Kabupaten Karawang kepada BKPRD Provinsi Jawa Barat;
- Terwujudnya optimalisasi peran masyarakat dalam penataan ruang.

4. Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP 2)

Latar Belakang :

Secara umum Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi/ *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) Phase 2, adalah keberlanjutan dari WISMP Phase 1, yang merupakan salah satu program yang dikembangkan dalam mewujudkan reformasi kebijakan pengelolaan sumberdaya air dan irigasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Ruang Lingkup Program WISMP-2 secara nasional yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (2011-2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDA Wilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan air bagi masyarakat;
- 2) Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang merupakan kelanjutan Program WISMP-1 dan NTB-WRMP, serta Daerah Irigasi kewenangan Pusat dengan pola PPSIP;
- 3) Melaksanakan ujicoba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi secara PPSIP pada Daerah Irigasi Jatiluhur (strategis nasional) untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan pemberian air dan keberlanjutan sistem irigasi;
- 4) Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, administrasi Kegiatan)

Penyesuaian lingkup program juga difokuskan pada upaya peningkatan kinerja terhadap perencanaan, pemrograman, manajemen investasi, pelaksanaan O&P, dan peningkatan produksi pertanian beririgasi pada Wilayah Sungai dan Sistem Irigasi yang terpilih.

Di Kabupaten Karawang, Program WISMP 2 dilaksanakan di 3 (tiga) OPD yakni Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tanhutbunnak dengan kegiatan yang telah ditentukan melalui *Rolesharing* yang telah ditetapkan oleh Bappenas Tahun 2008.

Tujuan dan Sasaran :

Tujuan Program WISMP-2 secara nasional adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan Beririgasi, yang merupakan kelanjutan dari Program WISMP 1.

Program WISMP di Bappeda Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan proses penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian peningkatan kinerja perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan sector sumber daya air dan irigasi serta untuk meningkatkan kemampuan koordinasi manajemen dan pendanaan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan daerah serta para Petani Pemakai Air demi menjaga keberlangsungan dan/atau keberlanjutan sektor sumberdaya air dan irigasi.

5. Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP 2)

Latar Belakang :

Secara umum Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi/ *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) Phase 2, adalah keberlanjutan dari WISMP Phase 1, yang merupakan salah satu program yang dikembangkan dalam mewujudkan reformasi kebijakan pengelolaan sumberdaya air dan irigasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Ruang Lingkup Program WISMP-2 secara nasional yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (2011-2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDA Wilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan air bagi masyarakat;
- 2) Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang merupakan kelanjutan Program WISMP-1 dan NTB-WRMP, serta Daerah Irigasi kewenangan Pusat dengan pola PPSIP;
- 3) Melaksanakan ujicoba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi secara PPSIP pada Daerah Irigasi Jatiluhur (strategis nasional) untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan pemberian air dan keberlanjutan sistem irigasi;
- 4) Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, administrasi Kegiatan)

Penyesuaian lingkup program juga difokuskan pada upaya peningkatan kinerja terhadap perencanaan, pemrograman, manajemen investasi, pelaksanaan O&P, dan peningkatan produksi pertanian beririgasi pada Wilayah Sungai dan Sistem Irigasi yang terpilih.

Di Kabupaten Karawang, Program WISMP 2 dilaksanakan di 3 (tiga) OPD yakni Bappeda, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tanhutbunnak dengan kegiatan yang telah ditentukan melalui *Rolesharing* yang telah ditetapkan oleh Bappenas Tahun 2008.

Tujuan dan Sasaran :

Tujuan Program WISMP-2 secara nasional adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan Beririgasi, yang merupakan kelanjutan dari Program WISMP 1.

Program WISMP di Bappeda Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan proses penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian peningkatan kinerja perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan sector sumber daya air dan irigasi serta untuk meningkatkan kemampuan koordinasi manajemen dan pendanaan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan daerah serta para Petani Pemakai Air demi menjaga keberlangsungan dan/atau keberlanjutan sektor sumberdaya air dan irigasi

6. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Industri Kabupaten Karawang

Latar Belakang :

Kegiatan industri dan kawasan industri, serta kegiatan ikutannya akan tumbuh pesat dan berkembang sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan di kawasan peruntukan industri ini akan membentuk struktur kegiatan yang berbeda dengan struktur kegiatan di bagian wilayah Kabupaten Karawang lainnya. Kegiatan yang mendominasi adalah industri serta kegiatan permukiman perkotaan ikutannya. Namun demikian kegiatan pertanian dan perdesaan lainnya masih tetap ada terutama kawasan atau daerah pinggiran (hinterland) kawasan. Sebagai contoh saat ini Kawasan perkotaan Cikampek secara

eksisting sudah berkembang dan dikenal pusat pengembangan industri di Kabupaten Karawang. Perkembangan Kawasan Perkotaan Cikampek ini disamping meliputi Kecamatan Cikampek sendiri, diperkirakan juga mempunyai wilayah pengaruh hingga ke sebagian kecamatan di sekitarnya.

RTRW Kabupaten Karawang, dalam menjabarkan visi pembangunan daerah secara spasial telah memberikan arahan pengembangan industri daerah dengan mengalokasikan Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karawang. Kawasan peruntukan industri tersebut meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari, Purwasari, Pangkalan, Karawang Timur, Karawang Barat, dan Rengasdengklok.

Pengertian Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Perwujudan tujuan penataan ruang dalam kawasan peruntukan industri tersebut merupakan penabaran dari arahan yang ada di RTRW Kabupaten Karawang. Pengembangan, pengelolaan dan penataan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karawang pada dasarnya tidak terlepas dari isu-isu

terkini terkait dengan pengembangan industri di Kabupaten Karawang, tentunya pada konteks keruangan, adalah :

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang sangat menarik bagi para pelaku usaha industri secara nasional bahkan global. Letak geografis, keberadaan jaringan transportasi primer serta rencana pengembangan pelabuhan dan bandara merupakan faktor penarik yang sangat besar. Namun demikian saat ini investasi yang masuk perlu diarahkan pada ruang atau aspek yang sesuai dengan kepentingan daerah. Pengembangan industri perlu diarahkan ke kawasan-kawasan dalam Kawasan Peruntukan Industri yang selama ini belum berkembang, sehingga industri tidak tertumpuk di kawasan-kawasan tertentu saja dan akhirnya beban keruangan dan perkembangan dapat lebih merata. Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Karawang perlu lebih menarik investasi pada sektor industri yang secara langsung terkait dengan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta sektor industri yang dalam rantai produksinya dapat melibatkan UKM atau IKM setempat

Saat ini masih banyak terdapat industri yang beroperasi di luar kawasan industri. Dalam jangka panjang maka secara bertahap seluruh industri (kecuali yang diizinkan oleh peraturan perundangan) akan dimasukkan ke kawasan industri, baik berpindah ke kawasan industri yang ada atau dengan mendorong industri-industri tersebut untuk mengembangkan kawasan industri. Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu mengembangkan strategi percepatan dan fasilitasi untuk

menjadikan seluruh industri di wilayahnya masuk ke dalam kawasan industri

Pengembangan industri di Kabupaten Karawang perlu dikendalikan agar tercipta keserasian dengan lingkungan di sekitarnya. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar lokasi industri tersebut merupakan upaya agar kualitas lingkungan yang ada dapat terjaga, termasuk menjaga agar perkembangan industri tidak mendesak keberadaan kawasan atau lahan pertanian

Saat ini sebagian dari kawasan industri yang telah beroperasi maupun telah mendapatkan izin lokasi, belum dimanfaatkan. Sebagian dari kawasan tersebut mempunyai nilai ekonomis untuk dialihkan penggunaannya untuk non industri

Sebagai kawasan industri saat ini rentan terhadap banjir, kurang memiliki dukungan aksesibilitas yang memadai serta terlalu dekat dengan kawasan permukiman

Oleh sebab itu maka diperlukan adanya konsep komprehensif untuk menjadikan industri secara efektif sebagai basis perkembangan daerah (disamping pertanian) dalam wadah ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Karawang. Konsep tersebut diharapkan memberikan tahapan strategis perwujudan struktur dan pola ruang dalam kawasan peruntukan industri sesuai arahan RTRW Kabupaten Karawang. Dalam konsep ini juga perlu mempromosikan kawasan-kawasan baru (dalam kawasan peruntukan industri) yang akan dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan industri, antara lain melalui penyediaan rencana rinci tata ruang.

Tujuan dan Sasaran :

Tujuan dari kegiatan ini adalah merumuskan strategi komprehensif dalam rangka mengefektifkan industri sebagai basis pengembangan Kabupaten Karawang melalui percepatan perwujudan struktur dan pola ruang di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan RTRW Kabupaten Karawang. Strategi ini diharapkan dapat mengikat dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Teridentifikasikan seluruh kawasan industri, zona industri dan lokasi industri (skala besar) yang tersebar di Kawasan Peruntukan Industri (Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari, Purwasari, Pangkalan, Karawang Timur, Karawang Barat, dan Rengasdengklok
2. Teridentifikasinya isu dan permasalahan pengembangan industri di Kawasan Peruntukan Industri khususnya pada konteks keruangan
3. Terumuskannya strategi pengembangan industri di Kawasan Peruntukan Industri yang mencakup arah perkembangan industri (kriteria dan jenis industri), konsep perwujudan struktur dan pola sesuai dengan arahan RTRW, program investasi serta berbagai aspek lain yang berkaitan
4. Terumuskannya strategi pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri, terutama untuk melindungi kawasan atau lahan pertanian dan kawasan permukiman
5. Tersusunnya roadmap pengembangan industri di Kawasan Peruntukan Industri

6. Terumuskannya RRTR pada kawasan yang dipromosikan sebagai kawasan pengembangan industri yang baru sebagai bagian dari mengurangi beban dari kawasan yang selama ini sudah berkembang dan cenderung sudah sangat padat

7. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana/Tata Ruang

Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Karawang bertujuan untuk mensinkronkan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Tata Ruang, dengan SKPD teknis terkait, diantaranya adalah : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan SKPD-SKPD terkait lainnya.

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah dalam bentuk laporan hasil koordinasi, pengendalian dan pemantauan perencanaan pembangunan di Bidang Prasarana dan Tata Ruang yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya.

5) Program Pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah

Tabel 2.88
Realisasi Kinerja Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tahun 2013-2015

No	Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014
1.	Penyusunan Buku LKPJ AMJ Bupati	3 jenis buku (@125 buah)	2 jenis buku (@125 buah)
2.	Buku Laporan Triwulanan	4 jenis buku (@110 buku)	4 jenis buku (@110 buku)
3.	Sistem Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (Sisrendalev)	1 jenis buku (@100 buku)	--
4.	Penyusunan Buku Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karawang	1 jenis buku (@100 buku)	1 jenis buku (@100 buku)
5.	Buku Karawang Dalam Angka	1 jenis buku dan 1 jenis CD (@150)	1 jenis buku dan 1 jenis CD (@150)
6.	Sinergitas dan Akurasi Data	1 jenis buku (@100 buku)	1 jenis buku (@100 buku)
7.	Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang	1 jenis buku dan 1 jenis CD (@400)	1 jenis buku dan 1 jen is CD (@330)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Perhubungan dan Komunikasi

1) Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tabel 2.88
Realisasi Kinerja Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	FS Terminal Tipe A berlokasi di Cikampek	-	1 Kajian	-	-	-
2.	Shelter / Halte	-	1 Unit (Jl. Pangkal Perjuangan	1 Unit (SMAN 1 Karawang)	1 Unit (SMAN 4 Karawang)	-
3.	Kajian Angkutan Masal Trans Karawang	-	1 Kajian	-	-	-
4.	Kajian Potensi PAD Parkir dan Penentuan Lokasi Wilayah Tempat Parkir	-	1 Kajian	1 Kajian	-	-
5.	Papan Sosialisasi dan Penetapan Retribusi Parkir	-	-	5 Buah	-	-
6.	Survey O/D Asal Tujuan Kabupaten Karawang	-	-	-	1 Kajian dan 45 Buku	-
7.	Pengadaan dan Pemasangan Papan Sosialisasi Lintas Trayek	-	-	-	10 Buah	-

8.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Radio dan Penerus Pancar Frekuensi di 4 Lokasi Terminal Wilayah I, II, III dan Kantor Dishubkominfo	-	-	-	4 Lokasi	-
9.	FS Kajian Pembangunan dan Pemasangan Variabel Messege Sign dan Jembatan Penyebrangan Orang	-	-	-	2 Kajian	-
10.	Pembuatan Pagar Depan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	1 Lokasi	-
11.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Tambahan	-	-	-	24 Unit	60 buah
12.	Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin dan Uji Asap Solar	-	-	-	2 Set Alat Uji Bensin 2 Set Alat Solar dan 2 Buah Genset	-
13.	Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan (Halte/RPPJ/Portal/Papan Sosialisasi Trayek/Deliniator/Guardrail/Road Stud)	-	-	-	-	7 macam
14.	Pendataan Kapal dan Pembuatan Tanda Pas Kecil Kapal 7 GT	-	-	2 Tempat Pelelangan Ikan	-	5 Tempat Pelelangan Ikan
15.	Master Plan Transportasi	-	-	-	-	1 kajian
16.	DED JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	-	-	-	1 kajian
17.	DED VMS (Variabel Messege Sign)	-	-	-	-	1 kajian
18.	DED Dermaga (Kapal) 7 GT Lokasi TPI Muara Mina Cilamaya	-	-	-	-	1 kajian
19.	Amdal Lalin Terminal dan Pasar Kaliwangi/ Rengasdengklok	-	-	-	-	1 kajian
20.	FS Terminal Type C	-	-	-	-	1 Kajian Tegalwaru/ Pangkala
21.	FS Terminal Depo Container	-	-	-	-	1 kajian
22.	Kajian Lalulintas One Way Rekayasa Lalu Lintas Johar - Lamarin	-	-	-	-	1 kajian
23.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Zebra Cross)	-	-	-	-	30 lokasi disekolah dan 30

						lokasi ditempat umum
24.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu terpasang pada Zebra Cross	-	-	-	-	30 unit di sekolah dan 30 unit ditempat umum
25.	Alat Uji Brake Tester	-	-	-	-	1 set lengkap
26.	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	-	-	-	-	1 set lengkap
27.	Andalalin Underpass Pawarengan	-	-	-	-	1 kajian
28.	Pengadaan Papan Visual/Running Text LED Display	-	-	-	-	1 set lengkap

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tabel 2.89
Realisasi Kinerja Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumah Jaringan Trayek yang dioperasikan - Angkutan Perkotaan	28	28	29	30	30
2.	Sosialisasi TIBLANTAS terhadap Siswa dan Siswi Pelajar	-	-	95 Siswa/Siswi SLTA Di Kab. Karawang	300 Siswa/Siswi SLTP di Kab. Karawang	-
3.	Pembuatan Peraturan Bupati yang terkait dengan Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perhubungan	-	-	-	1 Perda dan 16 Perbup	-
4.	Pemilihanan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lntas dan Angkutan Jalan Tingkat kabupaten Karawang	-	-	-	40 Orang Pelajar (SLTA)	20 orang Pelajar (SLTA)
5.	Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api beserta Rambu Perlintasan Kereta Api	-	-	-	14 Set Perlintasan tanpa Palang Pintu	-
6.	Pembinaan Masyarakat Peduli Lalu Lintas	-	-	125 Orang Peserta	45 orang Peserta Petugas Palang Pintu	-
7.	Legal Opinion Peraturan Bupati	-	-	-	-	1 kegiatan
8.	Pemantauan Pelaksanaan Tarif Penumpang Lokal	-	-	-	-	1 kegiatan
9.	Kajian Pengembangan Jaringan Trayek	-	-	-	-	1 kegiatan
10.	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban	-	-	-	-	1 kegiatan

	Lalulintas dan Angkutan					3 orang
11.	Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	-	-	-	-	3 orang pelajar (SLTA)
12.	Pendataan Angkutan Barang	-	-	-	-	1 kegiatan

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Tabel 2.90
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor	21.941 unit	24.535 unit	27.930 unit	29.762 unit	29.246 Unit
2.	Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor					
a.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Mobil Barang/Bis/Kendaraan Tempelan/Gandengan dan Kendaraan Khusus	-	-	-	23.112 unit	29.161 Unit
b.	Non Kendaraan Wajib Uji Mobil Penumpang/Sepedamotor	-	-	-	1.805 unit	158 unit

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data dari Januari s.d. Desember 2015)

- Pengujian Emisi terhadap Non Kendaraan Wajib Uji, mulai dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Terhitung mulai Bulan April 2014;
- Untuk Kendaraan Wajib Uji, Uji Emisi tidak berikut Buku Uji Emisi, karena wajib uji untuk Non Kendaraan Wajib Uji dengan mendapat legalitas ambang batas gas buang (Buku Uji Emisi).

3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tabel 2.91
Realisasi Kinerja Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Fasilitas dan Rambu jalan					
	a. <i>Traffic Light</i>	1 Paket (tiga kaki) Ciranggon	1 Paket (empat Kaki) Talagasari	1 Paket Simpang Tiga Karasak	1 Paket Simpang Telukjambe	-
	b. Rambu Lalu Lintas					
	- Rambu Peringatan	38 buah	4 buah	28 buah	85 buah	8 buah
	- Rambu Larangan	13 buah	-	93 buah	19 buah	12 buah
	- Rambu Perintah	-	-	111 buah	31 buah	8 buah
	- Rambu Petunjuk	21 buah	8 buah	10 buah	-	9 buah
	- Papan Rambu Tambahan	-	-	64 buah	4 buah	-
	- RPPJ Portal	-	-	1 buah (Jl.Tuparev)	-	10 unit
	c. Marka Jalan	1.865 ml	-	10.714,4 ml	42.837,29 ml	21.747 ml
	d. Marka Jalan ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	-	-	7.137 ml Depan SMAN 1 Karawang & SMPN 5 Karawang	-	-
	e. <i>Guard Rail</i>	80 m	-	-	-	260 m (PON XIX)
	f. Paku Jalan (<i>Road Stud</i>)	-	497 buah	913 buah	-	-
	g. Deliniator	-	185 buah	-	-	-
	h. Water Barrier	-	-	10 buah	70 buah	100 buah
	i. Mobile Concrete Barrier (MCB)	-	-	10 buah	70 buah	80 buah
	j. Traffic Cone	-	-	10 buah	73 buah	100 buah
	k. Kunci Gembok Parkir Sembarangan	-	-	10 buah	-	-
	l. Timbangan Kendaraan Portable 10-80 Ton	-	-	1 unit	-	-
	m. Warning Light	-	-	-	4 unit	6 unit
	n. Cermin Tikungan	-	-	-	-	2 unit
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang	4 triwulan/1 6 kali	4 triwulan/1 6 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali
3	Pengendalian Gatur Lintas Anggota Dalops	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari
4	Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor	-	-	-	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari (Natal dan Tahun Baru=108 unit)	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari (Natal dan Tahun Baru=108 unit)

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
5	Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang	-	-	-	4 Triwulan / 20 kali	4 Triwulan / 20 kali

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tabel 2.92
Jumlah Dokumen Kependudukan yang Dikeluarkan
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	KTP WNI	284.000	234.278	58.280	122.051	79.222
2.	KTP WNA	5	3	0	0	0
3.	KK WNI	108.000	121.759	83.427	191.121	247.147
4.	KK WNA	0	0	0	0	0
5.	Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	803	798	687	1.175	837
6.	Surat Ket. Tinggal Sementara (SKTS)	1.663	1.488	2.129	3.096	807
7.	Surat Ket. Pindah Luar Daerah (SKPLD)	6.865	13.069	8.073	11.329	14.598
8.	Surat Ket. Datang Luar Daerah (SKDLD)	9.856	12.435	10.696	19.929	26.466
9.	Surat Ket. Pindah Luar Negeri (SKPLN)	-	-	1	0	0
10.	Surat Ket. Datang Luar Negeri (SKDLN)	278	126	212	285	255

Sumber: Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Penerapan KTP elektronik (KTP-el) adalah Program Strategis Nasional yang mulai dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari awal bulan April 2012 sampai dengan Desember 2013. Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan data per bulan Juli 2011 sebanyak 1.525.478 jiwa yang tersebar di 30 Kecamatan, dan KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk

yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Sampai dengan bulan Desember 2013, dari target Penduduk Wajib KTP-el sebanyak 1.525.478 jiwa, telah terekam sebanyak 1.350.865 jiwa dan sampai dengan 31 Desember 2014 (data WKTP dari DKB semester II 2014) hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan mencapai 1.272.130. Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.93
Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerbitan SP NIK (KK)		682.542	-	-	-
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP (yang telah melakukan perekaman KTP-el)		1.302.955	1.350.865	*)1.272.130	1.251.835
	a. Laki-laki (orang)		661.210	686.528	648.943	632.670
	b. Perempuan (orang)		641.745	664.337	623.187	619.165

Sumber: *) Data WKTP s.d 31 Desember 2014 dari DKB Semester II 2014 dengan hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

2) Program Pencatatan Sipil

Salah satu produk unggulan dari Program Pencatatan Sipil yang sudah dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang adalah Pelayanan Akta Kelahiran *one-day service*, pelayanan akta kelahiran di tempat/desa, yaitu berupa Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran satu hari selesai. Jumlah Akta yang dikeluarkan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.94
Jumlah Akta yang Dikeluarkan pada
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Jenis Akta	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Akta Di Kantor	80.865	36.116	94.386	36.482	44.515
2.	Pelayanan Akta Di Desa/Kecamatan (Paten)	11.004	2.051	1.728	24.623	23.999
3.	Akta Kawin	216	185	152	158	287
4.	Akta Cerai	12	18	18	14	19
5.	Akta Kematian	97	115	92	113	164
6.	Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	24	8	14	19	8
7.	Akta Pengangkatan Anak	5	0	0	0	0
8.	Legalisasi Akta	4.857	2.878	2.302	2.944	
9.	Surat Keterangan Catatan Pinggir	9	845	540	476	693

Sumber: Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKarawang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tabel 2.95
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Tahun 2011 s.d. 2014

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah PEKKA	19	21	22	25	27
2.	Jumlah Kota Layak Anak	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah melalui pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pusat studi wanita/gender dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak. Selain itu juga perlu didukung melalui berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA serta penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG dan PUAbaik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.96
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
di Kab. Karawang Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengarusutamaan Gender					
	- Pembentukan dan pembinaan desa P2WKSS	1	1	1	1	1
	- Pembentukan dan pembinaan kelompok PRIMA	22	32	42	52	57
	- Pembentukan dan pembinaan kelompok PEKKA	19	21	22	25	27
	- Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai kehidupan dan pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan tujuan dari program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di

bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) dan pengembangan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan sangat diperlukan, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan.

Tabel 2.96
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
di Kab. Karawang Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perlindungan Perempuan dan Anak					
	- Jumlah <i>trafficking</i> perempuan dan anak	18	17	8	19	3
	- Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	3	2	11	30	31
2.	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	-	1.020	1.272	1.302	1012
3.	Jumlah rumah aman di tingkat kecamatan	15	15	15	15	15
4.	Jumlah pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kabupaten	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

Keluarga Berencana

1) Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Pendataan keluarga yang dilakukan dalam rangka menghimpun data basis untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97
Pendataan Keluarga Tahun 2011-2015

No	Uraian		Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A.	Data KB						
	-	Jumlah PUS	494.568	515.913	542.773	536.642	543.898
	-	Jumlah Peserta KB	367.007	434.208	392.328	383.896	399.804
		Hamil	21.329	22.166	28.412	25.376	18.861
		Ingin anak segera	34.696	37.367	39.344	78.710	77.009
		Ingin anak ditunda	34.551	30.746	36.116	21.802	23.077
		Tdk ingin anak lagi	36.985	47.219	46.573	26.858	24.347
B.	Data Tahapan Keluarga Sejahtera						
	-	Keluarga Prasejahtera	233.554	221.252	212.314	226.781	
	-	Keluarga Sejahtera I	167.488	172.540	184.617	167.772	
	-	Keluarga Sejahtera II	98.260	61.751	67.926	69.112	
	-	Keluarga Sejahtera III	125.615	202.639	241.278	200.094	
	-	Keluarga Sejahtera III+	20.260	11.735	17.442	13.550	

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.98
Pencapaian Peserta Akseptor KB Baru Tahun 2013-2015

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
1	IUD	2.936	3.531	120,3	5246	4626	87,35	6,133	4,903	79,9
2	MOP	195	95	48,7	203	64	31,53	116	54	46,5

3	MOW	804	1.380	171,6	1498	1161	77,50	1732	1306	75,4
4	Kondom	2.669	4.843	181,4	5088	4970	97,68	5075	6942	136,8
5	Implant	3.328	4.900	147,2	7326	4910	67,02	6646	4378	65,9
6	Suntikan	40.324	43.466	107,8	46763	51549	110,23	43034	52011	120,9
7	Pil	50.568	36.815	72,8	39776	30764	77,34	42264	50356	119,1
	JUMLAH	100.823	95.030	94,2	105450	98,004	92,54	105000	119950	114,2

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.99
Keadaan Peserta Akseptor KB Aktif Tahun 2013-2015

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
1	IUD	17.103	22.501	131,5	23174	22033	95,07	23175	23920	103,2
2	MOP	4.853	3.566	73,5	3672	3672	1	3672	3614	98,42
3	MOW	7.354	10.607	144,2	10,913	10,493	96,15	10493	10693	101,9
4	Kondom	3.562	6.779	190,3	6974	7066	101,31	6974	8213	117,7
5	Implant	19.345	15.948	82,4	16341	15421	94,37	16341	16565	101,3
6	Suntikan	144.852	202.543	139,8	204714	202452	98.88	204714	205108	100,2
7	Pil	90.561	130.384	143,9	135,464	120805	891,78	135464	128159	94.60
	JUMLAH	287.630	392.328	136,4	406302	833.896	205,24	406302	396272	97.53
	Peserta Ganti Cara		0	5.774		3218			8684	
	Pencabutan Implant		0	4.062		3430			4653	
	Komplikasi Berat		0	22		43			17	
	Kegagalan		0	17		33			7	

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

2) Program Pelayanan Kontrasepsi

Tabel 2.100
Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera Tahun 2011-2015

No	Uraian		Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A.	Peserta Akseptor KB Baru		133.625	98.479	95.030	98.044	119.950
	-	IUD	3.017	3.639	3.531	4.626	4.903
	-	MOP	86	139	95	64	54
	-	MOW	1.276	1.180	1.380	1.161	1.306
	-	Kondom	5.357	4.842	4.843	4.970	6.942
	-	Implan	3.747	3.331	4.900	4.910	4.378
	-	Suntikan	69.983	47.533	43.466	51.549	52.011
	-	Pil	50.159	37.815	36.815	30.764	50.356
B.	Peserta Akseptor KB Aktif		362.630	376.545	392.328	383.896	399.804
	-	IUD	2.747	22.310	22.501	23.033	23.067
	-	MOP	3.588	3.542	3.566	3.626	3.555
	-	MOW	9.364	9.963	10.607	10.993	10352
	-	Kondom	5.992	6.088	6.779	7.066	8624
	-	Implan	19.144	14.185	15.948	15.921	17051
	-	Suntikan	191.332	197.181	202.543	202.452	207.319
	-	Pil	124.439	123.276	130.384	120.805	129816
C.	Peserta Ganti Cara		2.574	2.574	5.774	3.218	4.274
D.	Pencabutan Implan		3.439	3.439	4.062	3.430	3.422
E.	Komplikasi Berat		0	0	22	43	12
F	Kegagalan		11	11	17	33	9
G	Jumlah Peserta KB Baru MJP		8.126	8.289	9.906	10.761	10.641

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.101
Distribusi Alat Kontrasepsi Tahun 2011-2015

No	Uraian		Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A.	IUD (set)						
	-	Penerimaan	13.550	17.250	13.250	11.500	4.625
	-	Pengeluaran	12.800	16.500	12.750	11.375	3.200
	-	Sisa Gudang	750	750	500	625	1425
B.	Kondom (lusin)						
	-	Penerimaan	21.950	8.786	6.166	4.380	2.751
	-	Pengeluaran	19.664	8.500	5.788	4.003	1.411
	-	Sisa Gudang	2.286	286	378	755	1.340
C.	Implan (set)						
	-	Penerimaan	15.500	13.150	9.000	18.000	4.040
	-	Pengeluaran	14.750	12.650	8.760	18.240	4.040
	-	Sisa Gudang	750	500	240	0	0
D.	Suntikan (vial)						
	-	Penerimaan	846.000	1.121.000	1.011.000	616.000	125.880
	-	Pengeluaran	755.000	1.115.500	995.000	576.120	125.820
	-	Sisa Gudang	91.000	5.500	16.000	55.880	60
E.	PIL (strip)						
	-	Penerimaan	1.512.000	2.062.500	1.539.500	640.000	464.500
	-	Pengeluaran	1.387.000	2.051.000	1.521.500	575.500	459.455
	-	Sisa Gudang	125.000	11.500	18.000	82.500	5.045

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.102

Sarana Kesehatan yang Melaporkan Pelayanan KB Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Sarana Pelayanan KB	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Umum Swasta	12	12	20	20	20
3	Puskesmas/Klinik KB	52	50	52	52	52
4	Puskesmas Pembantu	53	69	60	69	69
5	Dokter Praktek Swasta	77	81	145	145	145
6	Bidan Praktek Swasta	327	402	446	667	667

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR)

Tabel 2.103
Data Kelompok Kegiatan Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	BKB (Bina Keluarga Balita)	448	615	650	531	531
2	BKR (Bina Keluarga Remaja)	221	281	278	248	248
3	BKL (Bina Keluarga Lansia)	218	273	273	246	227
4	PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Keluarga)	63	72	115	115	115
5	UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	324	300	323	283	301
6	Jumlah Konseling Remaja yang dilaksanakan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.104
Data Institusi Masyarakat Perdesaan Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	PPKBD/Pos KB Desa	309	322	331	334	335
2	Sub PPKBD/Sub Pos KB Desa	1.767	1.840	1.849	1833	185
3	Kelompok Akseptor/Kelompok KB	6.162	6.377	6.411	6516	6520

Koperasi,Perindustrian PerdaganganPertambangan Dan Energi

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 2.105
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi UMKM
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha yang berdaya saing	1.002	3.708	9.650	10.850	11.602
2.	Jumlah Kualitas kelembagaan KUMKM (yang telah standarisasi, akreditasi dan sertifikasi)	258	305	455	569	639
3.	Jumlah fasilitas kemitraan UMKM	6	35	187	289	305

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tabel 2.106
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sosialisasi pemahaman Perkoperasian (orang)	120	275	270	490	490
2.	Pelatihan Kemampuan Menyusun RAPBK (koperasi)	20	30	50	50	50
3.	Pelatihan Pengetahuan Teknologi Pemasaran dan keuangan (koperasi)	40	-	-	-	-
4.	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)	110	122	132	125	130
5.	Jumlah koperasi yang sehat (koperasi)	110	122	132	125	130

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi pada indikator sosialisasi pemahaman perkoperasian terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2014 sebanyak 490 orang menjadi 490 orang pada tahun 2015 atau tetap. Untuk pelatihan kemampuan menyusun RAPBK jumlah pada tahun 2014 yaitu 50 orang dan pada tahun 2015 masih sama dengan jumlah 50 orang yang

dilakukan pembinaan. Indikator pelatihan teknologi pemasaran dan keuangan perubahan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yakni tidak ada perubahan karena tidak dilaksanakan. Untuk jumlah koperasi yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 130 koperasi atau meningkat sebanyak 4%. Jumlah koperasi yang sehat pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi meningkat sebesar 4% pada tahun 2015 menjadi sebanyak 130 koperasi.

Tabel 2.107
Keberadaan KUMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
I.	KOPERASI		
a.	KELEMBAGAAN KOPERASI		
	1. Jumlah Koperasi	Unit	1.538
	2. Jumlah Koperasi Aktif	Unit	627
	3. Jumlah Koperasi Tidak/Kurang Aktif	Unit	911
	4. Jumlah Koperasi yang RAT	Unit	114
	5. Jumlah Koperasi yang RAT Tepat Waktu	Unit	108
	6. Jumlah Anggota Koperasi	Orang	364.854
	7. Jumlah Karyawan Koperasi	Orang	1.738
	8. Jumlah Manajer Koperasi	Orang	310
	9. Jumlah Koperasi Berprestasi	Orang	20
b.	USAHA KOPERASI		
	1. Jumlah Modal Koperasi	Rp	177.689.000.000
	2. Jumlah Modal Sendiri	Rp	127.843.000.000
	3. Jumlah Modal Luar	Rp	49.846.000.000
	4. Jumlah SHU Koperasi	Rp	13.790.000.000
	5. Jumlah Volume Usaha	Rp	230.037.000.000
	6. Jumlah Volume Usaha KSP	Rp	82.257.839.400
	7. Jumlah Volume Usaha USP	Rp	138.022.000.000
	8. Jumlah Volume Usaha Perdagangan	Rp	71.621.000.000
c.	PENGAWASAN KOPERASI		

	1. Pengawas Koperasi	Orang	4.443
	2. Pengawas yang Aktif	Orang	1.968
	3. Pengawas yang Tidak/Kurang Aktif	Orang	2.475
II.	USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	38.904
	2. Nilai Produksi	Rp.	4.489.740.000
	3. Tenaga Kerja	Orang	116.172
a.	UMKM Industri		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	37.356
	2. Nilai Produksi	Rp.	325.868.105.000
	3. Tenaga Kerja	Orang	17.457
b.	UMKM Perdagangan		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	31.339
	2. Nilai Produksi	Rp.	2.112.428.000
	3. Tenaga Kerja	Orang	94.117
c.	UMKM Jasa		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	3.117
	2. Nilai Produksi	Rp.	501.040.000
	3. Tenaga Kerja	Orang	4.698

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

3) Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Tabel 2.108
Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal	1	2	12	26	30
2.	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi SP kesehatan	138	168	218	268	298

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif juga mengalami peningkatan. Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal meningkat pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 15,38%, sedangkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat SP kesehatan meningkat sebesar 11,19%.

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 2.109
Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi UMKM
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha baru per tahun	140	240	1.440	1.620	1.821
2.	Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun	-	-	-	-	-
3.	Ketersedian aspek legalitas bagi KUMKM per tahun (ijin terdaftar)	258	305	-	64	68
4.	Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun	4	6	16	26	26
5.	Promosi produk KUMKM per tahun melalui jaringan dan pameran KUMKM	6	7	-	120	136

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tabel 2.110
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pameran Dalam Negeri yang Diikuti	-	-	5 kali	5 kali	6 kali
2.	Jumlah Promosi melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang	-	-	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	20 kecamatan, 10 lokasi strategis, 6 perusahaan
3.	Pengadaan Leaflet Perizinan	-	-	-	7 jenis	8 jenis
4.	Pembuatan Peta Potensi dan Profil Investasi	-	-	-	-	1 jenis

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan

Tabel 2.111
Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi yang berdaya saing (ijin)	-	7	3	3	6
2.	Jumlah pelaku usaha yang dibina (unit usaha)	-	15	15	37	37
3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan (hari)	-	95%	95%	95%	95%
4.	Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perijinan (%)	-	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Tabel 2.112
Jumlah Perizinan di Kab. Karawang
Tahun 2015

No.	Perijinan	Jumlah
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3.714
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3.034
3.	Tandan Daftar Gudang (TDG)	74
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	14
5.	IPALASA	26
6.	Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Wiralaba (STPUW)	2
7.	Izin Trayek (IT)	1.073
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	176
9.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPPJ)	-
10.	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (IUODTW)	-
11.	Izin Lokasi (IL)	111
12.	Izin Reklame (IR)	1.012
13.	Pengesahan Rencana Tapak (PRT)	-
14.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.172
15.	Izin Gangguan (HO)	525
16.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPS LB3)	84
17.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	-
18.	Rekomendasi Kios Sarana Produksi Pertanian (RKSP)	-
19.	Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta (IOPSS)	1
20.	Izin Penyelenggaraan Apotek (IPA)	56
21.	Izin Penyelenggaraan Optik (IPO)	3
22.	Izin Penyelenggaraan Toko Obat (IPTO)	17
23.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional/Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTTr)	9
24.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/Kamar Kecil	11

No.	Perijinan	Jumlah
	(IPKM/KK)	
25.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan (IP UPK)	-
26.	Izin Usaha Industri (IUI)	5
27.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	86
28.	Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI)	-
29.	Izin Sarana dan Jasa Pariwisata (ISJP)	31
30.	Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (IPA-ABT)	10
31.	Izin Pemakaian Tanah Bagian Daerah Milik Jalan (IPT DMJ)	17
32.	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	59
33.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (IPLPK)	18
34.	Izin Pendirian Lembaga Bursa kerja Khusus (IPLBK)	28
35.	Surat Izin Pengeboran (SIP)	-
36.	Rekomendasi Kelayakan Investasi (RKI)	-
37.	Izin Prinsip Perluasan Modal (IPPM)	169
38.	Surat Izin Menempati Bangunan Pasar (Sim B)	68
39.	Rencana Penataan Lahan (RPL)	-
40.	Izin Usaha Pertambangan (IUPt)	1
41.	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IPL BKLN)	7
42.	Izin Usaha untuk Tenaga Kelistrikan (UK)	-
43.	Izin Latihan Kerja (ILK)	170
44.	Izin Akomodasi/Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)	1
45.	Surat Izin Klinik Kecantikan (SIKK)	16
46.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	9
47.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL)	27
48.	Izin Usaha Perikanan (IUPPHP)	86

No.	Perijinan	Jumlah
49.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK.Ro.)	12
50.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	43
51.	Izin Ops. Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IOLPTKS)	10
52.	Surat Izin Praktek Bidan (SIP.B)	218
53.	Surat Izin Praktek Dokter (SIP.Dr)	455
54.	Surat Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)	98
	JUMLAH	12.672

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tabel 2.113
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan di bidang investasi	-	7	3	3	6
2.	Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Trilyun)	-	14,253	40,925	25,722	25,454
3.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	-	137	2.196	2.872	2.802
4.	Total Realisasi Investasi PMA (Rp Trilyun)	-	8,408	36,272	20,226	17,814
5.	Jumlah LKPM PMA	-	119	275	440	805
6.	Total Realisasi Investasi PMDN (Rp Trilyun)	-	5,845	4,652	5,497	7,640
7.	Jumlah LKPM PMDN	-	18	1.921	2.432	1.997
8.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN (orang)	-	68.570	61.430	70.906	34.008
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	68.459	61.027	70.714	-
	b. Tenaga kerja Asing (orang)	-	111	403	192	-
9.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA (orang)	-	49.413	54.854	64.999	29.412
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	49.316	54.464	64.807	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	97	390	192	-

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
10.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (orang)	-	19.157	6.596	5.911	4.596
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	19.143	6.583	5.911	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	14	13	-	-

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri dan ketrasmigrasian. Adapun analisis terhadap kinerja urusan pilihan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini ;

Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional, setiap tahunnya mencapai ±811.485 ton/tahun.

Tabel 2.114
Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Ha)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	197.013	195.924	197.599	198.644	195.726
2	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4	Jagung Pipilan Kering	1.553	1.260	486	167	1.108
5	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.115

Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Kw/Ha)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	76,05	79,5
2	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4	Jagung Pipilan Kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6	Ubi Jalar	160	160	150	150	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

a) Potensi tanaman padi :

- (1) Luas lahan sawa : 97.577 Ha
- Sawah pengairan teknis : 92.916 Ha

– Sawah setengah teknis : 0 Ha

– Sawah pengairan sederhana : 0 Ha

– Sawah tadah hujan : 4.661 Ha

– Sawah irigasi desa/non PU : 0 Ha
- (2) Luas pemanfaatan lahan sawah sebagai berikut :
- Ditanami padi 2 kali satu tahun : 92.920 Ha

– Ditanami padi 3 kali satu tahun : 3.271 Ha

– Ditanami padi 1 kali setahun : 1.338 Ha

Pada tahun 2015 produksi padi mencapai 1.531.104,5ton GKP yang terdiri dari produksi padi sawah 1.524.842,55 ton GKP dan produksi padi gogo 6.261,95 ton GKP. Luas panen padi sawah mencapai 190.725 Ha dengan produktivitas 79,99 kwintal GKP/Ha, dan luas panen padi gogo mencapai 1.901 Ha dengan produktivitas 32,9kwintal GKP/Ha.

Tabel 2.116

**Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kab. Karawang
Per Desember Tahun 2011-2015 (dalam Ha)**

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Karawang Barat	2.243	2.201	2.201	2.119	1.824
2.	Karawang Timur	1.744	1.744	1.744	1.535	1.497
3.	Majalaya	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
4.	Klari	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
5.	Telukjambe Barat	2.378	2.378	2.378	2.260	2.260
6.	Telukjambe Timur	1.135	1.135	1.135	1.135	826
7.	Ciampel	583	852	583	583	852
8.	Pangkalan	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
9.	Tegalwaru	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
10.	Rengasdengklok	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
11.	Jayakarta	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531
12.	Kutawaluya	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
13.	Batujaya	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
14.	Tirtajaya	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
15.	Pakisjaya	3.360	3.360	3.360	3.360	3.166
16.	Pedes	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
17.	Cilebar	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
18.	Cibuaya	4.416	4.416	4.416	4.416	3.946
19.	Cikampek	725	725	725	725	701
20.	Purwasari	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
21.	Tirtamulya	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
22.	Jatisari	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
23.	Banyusari	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
24.	Kotabaru	1.413	1.434	1.434	1.332	1.332
25.	Cilamaya Wetan	5.218	5.218	5.218	5.218	5.216
26.	Cilamaya Kulon	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
27.	Telagasari	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	Lemahabang	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
29.	Rawamerta	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
30.	Tempuran	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
JUMLAH		98.612	98.615	98.346	97.835	97.577

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

b) Potensi Palawija dan Hortikultura

Palawija yang ditanam antara lain: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung, ketela pohon dan ubi. Pada tahun 2015 luas panen kedelai mencapai 1.793 Ha dengan produktivitas 12,9 kwintal bi kering/Ha, sedangkan luas panen kacang hijau 113 Ha dengan produktivitas 16,22Kw/Ha, produksi jagung sebesar 2.611,25 Ton pipilan kering dengan luas panen 445 Ha dan produktivitas 58,68Kw pipilan kering/Ha, produksi ketela pohon 2.364,17 ton dengan luas panen 163 Ha dan produktivitas 145,04Kw/Ha, ubi jalar 47,2 ton dengan luas panen 6 Ha dan produktivitas 78,67Kw/Ha.

Tanaman hortikultura yang dibudidayakan antara lain: jamur merang, kacang panjang, mentimun, terong, caisin, kangkung, bayam dan

cabe merah/rawit, petsai dan mentimun. Jamur merang merupakan komoditas yang dijadikan prioritas unggulan lokal sehingga berbagai upaya dalam pengembangan komoditas ini senantiasa dilakukan secara terintegrasi.

Pada tahun 2015 produksi jamur merang mencapai 4.131 ton dengan produktivitas 2,40Kw/kubung. Terjadi penurunan produksi sebesar 541 ton atau 11,58% dibandingkan tahun 2014. Jumlah kubung tahun 2015 yang memproduksi juga mengalami penurunan dari 2.030 kubung menjadi 1.723 kubung. Dari sisi pemasaran ada kenaikan harga jual jamur dari Rp. 15.000./kg menjadi Rp 23.000/kg.

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Keberhasilan pembangunan di Bidang Pertanian selama ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produktivitas padi sawah pada tahun 2014 mencapai 76,05Kw GKP/Hektar naik menjadi 79,99Kw GKP/hektar pada tahun 2015. Produktivitas padi gogo pada tahun 2014 sebesar 40,83Kw GKP/ha menurun menjadi 32,9kw GKP/ha pada tahun 2015. Produksi padi sawah pada tahun 2014 mencapai 1.485.298 ton GKP naik menjadi 1.524.842,55 ton GKP, sedangkan produksi padi gogo tahun 2014 mencapai 13.204 ton GKP pada tahun 2015 turun menjadi 6.261,95 ton GKP.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan padi gogo dari tahun 2011 sampai dengan 2015 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.117
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	197.004	1.459.406	74,08
2	2012	193.458	1.438.775	74,37
3	2013	195.929	1.481.466	75,61
4	2014	195.285	1.485.298	76,05
5	2015	190.725	1.524.842,55	79,95

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPternakanKab. Karawang

Tabel. 2.118
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi gogo
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	2.908	11.316	39,97
2	2012	2.427	7.357	39,01
3	2013	3.338	11.400	34,15
4	2014	3.234	13.204	40,57
5	2015	1.901	6.261,95	32,94

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPternakanKab. Karawang

Tabel. 2.119
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Palawija
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	22.127	49,34
2	2012	17.265	64,86
3	2013	12.970	48,59
4	2014	12.651	51,13
5	2015	8.004,04	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPternakanKab. Karawang

Tabel. 2.120
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jamur Merang
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Jumlah Kubung (unit)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/kubung)
1	2011	2.560	5.632	2,20
2	2012	2.610	5.742	2,25
3	2013	2.349	5.403	2.30
4	2014	2.030	4.672	2,30
5	2015	1.723	4.131	2,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPternakanKab. Karawang

Tabel. 2.121
Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija,
dan Hortikultura Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (Ha)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	197.013	195.924	197.599	198.644	195.726
2.	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3.	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4.	Jagung pipilan kering	535	1.260	486	167	1.108
5.	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6.	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.122
Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah, Palawija,
dan Hortikultura Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (kw/ha)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	75,49	79,48
2.	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3.	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4.	Jagung pipilan kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5.	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6.	Ubi Jalar	160	160	150	156	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.123
Data Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2011-2015

No.	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah					
	Luas Panen (ha)	197.004	193.458	195.929	195.285	190.725
	Produksi (Ton GKP)	1.459.406	1.438.775	1.481.466	1.485.298	1.524.842,55
	Produktivitas (Kw/Ha)	74,08	74,37	75,61	76,05	79,9
2.	Padi Ladang					
	Luas Panen (ha)	2.908	2.427	3.338	3.234	1901
	Produksi (Ton GKP)	11.316	7.357	11.400	13.204	6.261,95
	Produktivitas (Kw/Ha)	39,94	39,01	34,15	40,,83	32,9
	Jumlah Produksi (ton GKP)	1.470.722	1.446.132	1.492.866	1.498.502	1.531.104,5

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.124
Data Produksi Palawija (Ton) Tahun 2011-2015

No.	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jagung tua	3.021	2.323	1.905	116	2.611,25
	Jagung muda	7.662	5.489	4.494	3.214	0
2.	Kedelai tua	595	73	1.046	326	2.322,98
	Kedelai muda	3.827	803	360	350	0
3.	Kacang tanah	380	517	424	600	475,14
4.	Kacang hijau	1.800	1.800	1.097	890	183,31
5.	Ubi kayu	4.505	6.100	3.366	6.826	2.364,17
6.	Ubi jalar	337	161	278	329	47,2
	Jumlah produksi	22.127	17.265	12.970	12.651	8.004,05
	Produktivitas	49,34	64,86	48,59	51,13	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.125
Data Jumlah Kubung, Produksi dan Produktivitas Jamur Merang

No.	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jamur Merang					
	Jumlah kubung (unit)	2.560	2.610	2.349	2.030	1.723
	Produksi (ton)	5.362	5.872	5.403	4.672	4.131
	Produktivitas	2,20	2,25	2,30	2,30	2,40
	(Kw/Kbg/panen)					

*) Data semester I 2015

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tabel 2.126
PeningkatanKesejahteraanPetani
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Petani	14.349.700	15.227.700	17.817.130	18.532.000	27.275.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Keterangan : Asumsi Pendapatan petani padi sawah/ha/musim

3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tabel. 2.127
Perkembangan Produksi Hasil Peternakan (ton)
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Daging	Telur
1	2011	10.250,00	4.500,00
2	2012	10.361,50	4.625,00
3	2013	9.325,35	4.163,00
4	2014	9.116.,25	4.023,00
5	2015	8.988,00	3.974,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.128						
Jumlah Konsumsi per Kapita Tahun 2011-2015 (kg/kap/th)						
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Daging	10,00	10,10	9,09	9,00	8,69
2.	Telur	9,00	9,25	9,00	9,00	8,75
3.	Susu	0,28	0,29	0,25	0,20	0,19

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPernakanKab. Karawang

Tabel 2.129						
Jumlah Produksi dan Populasi Peternakan Tahun 2011-2015						
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)					
1.	Daging	10.250,00	10.361,50	9.325,35	9.116,25	8.988,00
2.	Telur	4.500,00	4.625,00	4.163,00	4.023,00	3.974,40
3.	Susu	53,00	54,00	50,00	40,00	34,16
B.	Jumlah Populasi (ekor)					
1.	Ternak besar	13.688	13.171	11.092	10.702	10.721
2.	Ternak kecil	2.491.784	3.244.866	3.762.101	3.756.102	3.599.460
3.	Unggas	15.469.102	14.700.298	14.410.439	14.109.338	12.747.147

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPernakanKab. Karawang

4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Tabel 2.130						
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Tahun 2011-2015						
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Peternak	17.000.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000	19.000.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPernakanKab. Karawang

Tabel 2.131						
Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015						
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas potensi tambak (Ha)	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.725,00
	Luas tambak yang telah dimanfaatkan (Ha)	15.567,40	15.567,40	15.567,40	15.571,00	15.828,8
2.	Luas potensi kolam (Ha)	1.279,40	1.279,40	1.279,40	1.188,2	1.088,80
	Luas kolam yang telah dimanfaatkan (Ha)	980,00	980,00	980,00	638,00	678,44
3.	Luas potensi mina padi (Ha)	10.580,8	10.580,8	10.580,8	10.580,8	9.241,32
	Luas mina padi yang telah dimanfaatkan (Ha)	236,7	141,0	179,1	182,0	177,2
4.	Jumlah potensi Kolam Jaring Apung (KJA) (unit)	168	168	168	148	293
	Jumlah KJA yang telah dimanfaatkan (unit)	79	79	79	83	184

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tabel 2.132
Potensi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Potensi panjang pantai (km)	84,23	84,23	84,23	84,23	84,23
	Panjang pantai yang telah dimanfaatkan (km)	84,23	84,23	84,23		
2.	Potensi panjang sungai (km)	744	744	744	744	744
	Panjang sungai yang telah dimanfaatkan (km)	577	577	577		
3.	Potensi rawa (Ha)	20,00	20,00	20,00	72,10	72,10
	Rawa yang telah dimanfaatkan (Ha)	5,00	5,00	5,00		
4.	Potensi bekas galian C (Ha)	282,30	282,30	282,30	282,3	282,3
	Bekas galian C yang telah dimanfaatkan (Ha)	132,00	132,00	132,00		

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.133
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Tangkap Laut	7.756,88	8.330,08	8.551,08	8.580,93	8.499,87
2.	Perikanan Tangkap Perairan Umum	167,56	206,78	200,91	185,62	92,12
	a. Sungai	56,25	67,23	64,83	64,06	29,61
	b. Rawa	35,12	43,79	41,33	28,32	7,96
	c. Bekasi Galian C	76,19	95,76	94,75	93,24	54,55
	JUMLAH	7.924,44	8.536,86	8.751,99	8.766,55	8.591,99

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.134
Jumlah Produksi dan dan Populasi Perikanan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)	46.320,51	47.121,21			
1.	Ikan	46.325,51	46.909,44	48.604,67	49.923,55	51.075,14

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

6) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tabel 2.135
Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dan Nelayan di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014 (Rp/thn)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembudidaya Ikan	13.350.000	13.430.000	13.927.000	14.456.000	15.122.300
2.	Nelayan	21.400.000	21.722.000	22.252.000	22.318.000	23.144.200
3.	Pengolah hasil perikanan	16.686.000	17.702.000	17.833.000	18.368.000	18.919,040
4.	Petani Garam	6.280.000	7.873.500	7.921.000	8.091.000	8.544.300

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan

Tabel 2.136
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang	12.310 ton	12.700 ton	13.245,90 ton	13.643,27 ton	14.052,57 ton	Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok
2.	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan di Karawang	18.724 ton	19.303 ton	19.867,90 ton	20.463,93 ton	26.126,85 ton	Bandung, Subang, Purwakarta, Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok
3.	Jumlah usaha kecil (<i>home industry</i>) perikanan	2.631 orang	2.763 orang	2.763 orang	2.845 orang	2.930 orang	
4.	Jumlah kelompok hasil olahan perikanan	126 kelompok	130 kelompok	130 kelompok	134 kelompok	138 kelompok	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 untuk semua indikator. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibanding tahun 2011 sebesar :

- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang sebesar 14,16%;
- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan di Karawang sebesar 12,57%;
- Jumlah usaha kecil (*home industry*) perikanan sebesar 11,36%; dan
- Jumlah kelompok hasil olahan perikanan sebesar 9,52%.

8) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tabel 2.137

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pembinaan Pokmaswas	2 kali	6 kali	10 kali	10 kali	10 kali
2.	Jumlah Pembinaan TPI	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	12 kali
3.	Jumlah Kapal Pengawasan	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4.	Jumlah Perahu POKMASWAS	4 unit	6 unit	8 unit	8 unit	8 unit
5.	PAD sektor perikanan (Rp)	18.784.790,00	36.250.248,00	256.235.845	299.634.727	255.329.844

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Analisa terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan untuk setiap indikator adalah sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan pokmaswas tahun 2015 meningkat sebesar 400% dibanding tahun 2011;
- Jumlah pembinaan TPI meningkat sebesar 200%;
- Jumlah kapal pengawasan tetap;
- Jumlah perahu pengawasan meningkat 100%; dan
- PAD sektor perikanan meningkat sebesar 1.259,24%, hal ini disebabkan adanya penyerahan penyelenggaraan retribusi TPI dari Provinsi ke Kabupaten berdasarkan PP No. 38 Th. 2008. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kab. Karawang mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perbup no 106 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TPI dan Pemungutan TPI. Sejak itu Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengurus TPI.

9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Tabel 2.138
Produk Unggulan Perikanan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah desa yang memiliki produk unggulan perikanan	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)
2.	Produk unggulan perikanan					
	a. ikan asin	3.323 ton	3.429 ton	3.571,20 ton	3.953,56 ton	4.072,17 ton
	b. pindang	26.390 ton	27.200 ton	28.119,00 ton	28.356,00 ton	29.206,68 ton
	c. terasi	254 ton	271 ton	282,96 ton	285,36 ton	293,92 ton
	d. Mini Plan (Rajungan)	-	374 ton	392,70 ton	783,00 ton	807,00 ton
	e. Kerupuk	1.068 ton	1.104 ton	1.140,00 ton	1.178,00 ton	1.213,34 ton

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap produk unggulan perikanan. Namun untuk jumlah desa yang memiliki produk unggulan perikanan tidak mengalami penambahan dari tahun 2011.

Tabel 2.139
Jumlah Sarana Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014 (Unit)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	TPHT	14	15	15	15
2.	BBI	1	2	2	2
3.	TPI	11	12	12	12
4.	PPP	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Jumlah sarana perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang hampir selalu tetap, kecuali tahun 2012 yang mengalami peningkatan sebanyak 1 unit untuk TPHT, BBI dan TPI.

Sesuai dengan potensi yang tersedia, yakni panjang garis pantai lebih kurang 84,23 Km dan banyaknya muara dan anak sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan (nelayan), setiap tahunnya armada nelayan

yang melakukan sandar dan pelelangan di Kabupaten Karawang selalu meningkat menjadi 258.608 unit pada Tahun 2015.

Tabel 2.140
Pengembangan Sistem Penyuluhan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Tenaga teknis professional perikanan	17	17	17	
2.	Tenaga teknis professional kelautan	1	1	1	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BP4K Kab. Karawang

10) **Program Peningkatan Sistem Informasi Perikanan, Kelautan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sarana evaluasi dan layanan informasi bidang perikanan dan kelautan dengan sasaran tersedianya data potensi dan produksi bidang perikanan dan kelautan, dan laporan evaluasi kegiatan bidang perikanan dan kelautan selama satu tahun.

Tabel 2.141
Potensi dan Kondisi Terumbu Karang Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tempuran	247,27	136,17	105,10	6,00
Cilamaya Kulon	1.229,80	677,70	522,80	29,30
Cilamaya Wetan	614,40	338,60	261,10	14,70
JUMLAH	2.091,47	1.152,47	889,00	50,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.142
Potensi dan Kondisi Magrove (Hutan Bakau) Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tujaya	1.463,80	428,25	991,41	44,14
Cibuaya	1.583,47	1.278,74	295,40	9,33
Cilamaya Kulon	350,45	-	92,00	258,45
Cilamaya Wetan	793,38	-	684,00	109,38
Cilebar	326,50	-	226,00	100,50
Pakisjaya	1.035,98	536,63	384,72	114,63
Pedes	520,00	-	520,00	-

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tempuran	517,42	-	512,00	5,42
Tirtajaya	3.414,93	3.156,69	243,43	14,81
JUMLAH	10.005,93	5.400,31	3.949,96	656,66

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Pariwisata

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tabel 2.143
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase peningkatan jumlah objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	78%	83%	89%	94%
2.	Persentase peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata	78%	83%	89%	94%
3.	Persentase peningkatan mutu dan pelayanan pariwisata	73%	80%	86%	93%
4.	Persentase penyediaan informasi pariwisata	78%	83%	89%	94%
5.	Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja pariwisata	73%	79%	85%	91%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tabel 2.144
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	323.402	459.826	419.628	428.895
2.	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata (kali)	6	6	6	5

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

3) Program Pengembangan Kemitraan

Tabel 2.145
Pengembangan Kemitraan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pelaku usaha kepariwisataan				
	a. Jumlah hotel (buah)	23	23	24	29
	b. Jumlah restoran (buah)	93	115	121	123
	c. Usaha pariwisata (buah)	7	7	21	23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang
Catatan : Usaha Pariwisata dalam bentuk Travel Biro

Potensi wisata dan obyek wisata di Kabupaten Karawang diantaranya adalah :

a) Obyek wisata budaya berupa

1. Situs

Situs yang telah dikelola oleh BP3 (Balai Pengelolaan Pengembangan Purbakala) Serang di Kabupaten Karawang ada 2 (dua) lokasi :

- a. Situs Batujaya (terdiri atas situs Segaran 1 s.d. 8 dan situs Telagajaya 1 s.d. 8) berlokasi di Kecamatan Batujaya
- b. Situs Cibuaya (terdiri atas situs Lanang dan situs Wadon) berlokasi di Kecamatan Cibuaya.
- c. Situs Kebonjambe di Kecamatan Tegalwaru.

2. Kawasan Cagar Budaya

- a. Makam Mantan para Bupati Karawang, berlokasi di Kecamatan Cilamaya Kulon
- b. Kawasan Kuta Tandingan, bertempat di Kecamatan Ciampel
- c. Patilasan Tubagus Rangin, bertempat di Kecamatan Rawamerta

- d. Patilasan Joko Tingkir, bertempat di Kecamatan Rawamerta
 - e. Makam Syekh Quro, tempat/makam/petilasan penyebaran agama Islam di Kabupaten Karawang oleh Syekh Quro.
- b) Obyek wisata sejarah, berupa tempat-tempat bersejarah yang monumental kaitannya dengan masa perjuangan rakyat Kabupaten Karawang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah bangsa Jepang dan Belanda, antara lain :
- 1. Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 - 2. Rumah Djiouw Ki Siong, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 - 3. Monumen Rawa Gede, bertempat di Kecamatan Rawamerta
 - 4. Monumen Suroto Kunto, bertempat di Kecamatan Karawang Timur
 - 5. Monumen Resimen V Cikampek, bertempat di Kecamatan Cikampek
 - 6. Taman Makam Pahlawan, bertempat di Kecamatan Purwasari
 - 7. Peristiwa Gunung Goong di Kecamatan Pangkalan
 - 8. Peristiwa Rawa Sikut, di Rawasikut Kecamatan Telagasari
 - 9. Peristiwa Karawang, Karawang dan sekitarnya.
- c) Obyek wisata Tirta berupa Danau buatan dan kolam renang, diantaranya :
- 1. Situ Kamojing, bertempat di Kecamatan Cikampek
 - 2. Bendungan Parisdo Walahar, bertempat di Kecamatan Klari
 - 3. Situ Gempol, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
 - 4. Situ Cipule, bertempat di Kecamatan Ciampel

5. Danau San Diego Hill, bertempat di Kecamatan Telukjambe Barat
6. Kolam renang Sportif, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
7. Kolam Renang Tirta Angsana, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
8. Kolam Renang PD. Prakasa, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
9. Kolam Renang Mutiara, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
10. Kolam Renang DG'S Pool, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
11. Kolam Renang PKPRI KGL, bertempat di Kecamatan Lemahabang
12. Kolam Renang Tirtasari Cikampek, bertempat di Kecamatan Cikampek
13. Kolam Renang PT. Bukit Muria Jaya Resinda, bertempat di Kecamatan Telukjambe Barat
14. Kolam Renang Tirtakencana Jatisari, bertempat di Kecamatan Jatisari
15. Kolam Renang Tirta Ilani Cilamaya Kulon, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
16. Kolam Renang Permata Rubi di Kecamatan Karawang Barat
17. Wahana Bermain Batu Tumpang *Adventure Camp*, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
18. *Waterboom* di Kecamatan Rengasdengklok
19. Kampung Wisata Curug Cigentis di Kecamatan Pangkalan
20. Water Park Wonderland di Kecamatan Telukjambe Timur

21. Kampung Budaya Gerbang Karawang di Kecamatan Telukjambe Timur

d) Obyek wisata Alam berupa alam pengunungan dan pantai, diantaranya:

1. Curug Bandung, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
2. Curug Peuteuy, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
3. Curug Cigentis, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
4. Curug Lalay, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
5. Curug Cipanundaan, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
6. Curug Santri, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
7. Curug Cikoleangkak, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
8. Pantai Tanjungpakis, bertempat di Kecamatan Pakisjaya
9. Pantai Samudra Baru, bertempat di Kecamatan Pedes
10. Pantai Tanjung Baru, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
11. Gunung Sanggabuana, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
12. Pantai Pasir Putih, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
13. Buana Wisata Cikeong di Kecamatan Tirtajaya

e) Obyek wisata keagamaan berupa tempat-tempat peribadatan, antara lain :

1. Mesjid Agung Karawang, tempat beribadah agama Islam
2. Candi Jiwa, tempat pemujaan agama Budha
3. Vihara Sian Jin Kupo, tempat peribadatan agama Kong Hu Chu/Umat Budha
4. Makam Syekh Quro, tempat/makam/petilasan penyebaran agama Islam di Kabupaten Karawang
5. Gereja Immanuel, tempat peribadatan agama Kristen Protestan
6. Gereja Sion, tempat peribadatan agama Kristen Katholik

7. Gereja Kristus Raja Karawang tempat peribadatan Agama Katholik
- f) Obyek wisata kuliner, berupa makanan khas Karawang antara lain:
 1. Bolu Kijing Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya
 2. Opak Kawung, nasi tangkar, telur asin, semprong Mondy Kecamatan Karawang Barat
 3. Pepes Jambal Walahar di Bendungan Parisdo Kecamatan Klari
 4. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang dan Kue Semprong Kecamatan Rengasdengklok
 5. Kupat Tahu, Sangu Tahu/Sangtau Kecamatan Karawang Timur
 6. Resto Alam Sari Interchange Kecamatan Telukjambe Timur
 7. Saung Beureum di Rengasdengklok
 8. Pemancingan Ajo di Kecamatan Telukjambe Timur
 9. Pemancingan Rio di Kecamatan Karawang Barat
 10. Rumah Makan Cibiuk di Kecamatan Telukjambe Timur
 11. Rumah Makan Sindang Reret di Kecamatan Telukjambe Timur
 12. Restoran Lebaksari Indah di Kecamatan Telukjambe Timur
 13. Pemancingan dan Restoran Saung Endah di Kecamatan Karawang Timur
 14. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari di Kecamatan Cikampek
 15. Restoran Alam Ceria di Kecamatan Karawang Timur
 16. Opak Cibuaya di Kecamatan Cibuaya

Secara keseluruhan jumlah obyek wisata yang ada mencapai 32 buah terdiri dari 21 buah obyek wisata buatan dan 13 buah obyek wisata alam. Selain itu sejumlah prasarana penunjang kepariwisataanpun sudah tersedia, diantaranya hotel bintang berjumlah 10 buah dan hotel non bintang berjumlah 19 buah.

Perdagangan

1) Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 untuk semua indikator menunjukkan kinerja yang stabil.

Tabel 2.146
Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengawasan penyaluran barang beredar kebutuhan pokok masyarakat	10 Pasar	10 Pasar	10 Pasar	10 pasar
2.	Pengawasan dan pembinaan distributor/penyalur	30 Distributor	30 Distributor	30 Distributor	30 distributor
3.	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	5 Pasar Modern	5 Pasar Modern	5 Pasar Modern	5 pasar modern

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan hampir semua indikator menunjukkan hasil yang stabil sejak tahun 2011, kecuali untuk jumlah pengaduan konsumen pada tahun 2014 meningkat sebesar 106 % dibandingkan tahun 2013.

Tabel 2.147
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	10 barang	15 barang	15 barang	15 barang
2.	Jumlah pengaduan konsumen	-	36	45	48
3.	Peningkatan Pengawasan Barang	10 Pasar / 5 Pasar	10 Pasar / 5 Pasar	10 Pasar / 5 Pasar	10 pasar / 5 pasar

	Beredar Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Modern	Modern	Modern	modern
4.	Pelayanan Tera Ulang	30 Kec.	30 Kec.	30 Kec.	30 Kec.

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Hasil perolehan perijinan SIUP – TDP tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel. 2.148
Hasil Perolehan Perizinan SIUP – TDP Tahun 2011 s.d. 2014

JENIS/ TAHUN	2011	2012	2013	2014
SIUP PK				
PO	2.086	1.971	2.647	2.290
KOP	88	82	90	66
CV	817	756	994	945
PT	91	185	188	259
BUL	-	-	-	-
SIUP PM				
PO	45	16	29	36
KOP	6	4	7	3
CV	128	46	58	62
PT	121	220	285	336
BUL	-	-	-	-
SIUP PB				
PO	23	-	-	8
KOP	4	-	-	-
CV	35	4	4	1
PT	237	33	35	52
BUL	-	-	-	-
JUMLAH	3.681	3.254	4.140	4.058

JENIS/ TAHUN	2011	2012	2013	2014
TDP				
PT	434	365	106	630
CV	870	659	722	853
PO	1.744	2.349	2.431	1.810
KOP	4	53	60	67
BUL	-	-	-	6
PMA	87	115	122	3
JUMLAH	3.228	2.771	3.441	3.369
TDG	84	52	31	48

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Tabel 2.149
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pembangunan <i>trade center</i> untuk Promosi Produk unggulan (Kios Kerajinan)	3	3	1	0
2.	Partisipasi pameran	5	4	5	4
3.	Pembinaan Teknis Bidang Perdagangan Ekspor dan Impor	40 Pengusaha	40 Pengusaha	60 Pengusaha	100 Pengusaha

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Kegiatan ekspor Kabupaten Karawang selama kurun waktu dua tahun terakhir (2011 - 2014) adalah sebagaimana Tabel 2.150 Data tersebut bukan merupakan total ekspor yang terjadi dari produk Karawang, namun itu hanya sebagian kecil saja. Mengingat data ekspor tercantum merupakan data ekspor perusahaan yang pengurusan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi

Kabupaten Karawang, selebihnya pengurusan SKA dapat dilakukan dimana saja, seperti di Disperindag Kabupaten Purwakarta atau di Kantor Kawasan Berikat dan lainya seperti di Jakarta.

Tabel. 2.150

Kegiatan Ekspor di Kabupaten Karawang Tahun 2011 s.d. 2014

Tahun	Nilai Ekspor (US\$)	Negara Tujuan
2011	954.777.989,30	USA, Itali, Jepang, Belgia, India, Pakistan, Singapura, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Australia, Korea, Afrika, China, dll.
2012	5.723.847.940,85	Sda
2013	1.536.108.020,26	Sda
2014	1.178.089.893,65	Sda

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan indikator kinerja pengadaan bantuan kios dorong pada tahun 2013 tidak dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2012 diadakan sebanyak 31 unit dan untuk tahun 2014 tidak diadakan terkendala dengan tupoksi pembinaan pedagang kaki lima yang berada pada Dinas Koperasi dan UKM.

Tabel 2.151

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengadaan Bantuan Kios Dorong	-	31	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

6) Program Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional

Program Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada tahun 2014 dilaksanakan dengan jumlah sasaran sama dengan tahun 2012 dan 2011 yaitu 200 pedagang.

Tabel 2.152
Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional	200 pedagang	200 pedagang	200 pedagang	200 pedagang

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Industri

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tabel 2.153
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah	8.600	8.663	9.528	9.528
2.	Persentase tingkat pelayanan usaha IKM	80 %	90 %	90%	90%
3.	Persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM	10 %	10 %	10%	10%
4.	Persentase IKM yang bermitra dengan industri besar/BUMN	-	-	-	
5.	Peningkatan kualitas produk IKM knalpot dan produk logam lainnya (IKM Pandai besi)	15	15	-	20
6.	Penerapan dan partisipasi konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM)	25	25	20	20
7.	Fasilitasi Pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro (peserta)	25	25	25	25

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada beberapa indikator hasilnya perkembangan IKM berada pada posisi stabil dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu indikator persentase tingkat pelayanan usaha IKM, persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM dan fasilitasi pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro. Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM pada tahun 2014 sebanyak 9.528 tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2013. Penerapan dan partisipasi konveksi

Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tahun 2014 sebanyak 25 peserta tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2013. Sedangkan untuk peningkatan kualitas produk IKM knalpot dan produk logam lainnya pada tahun 2014 diikuti 20 peserta. Sedangkan indikator persentase IKM yang bermitra dengan industri besar/BUMN sampai tahun 2014 belum dapat didata.

2) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial pada indikator jumlah sentra IKM yang dibina dan jumlah wirausaha industri kecil menengah tidak mengalami perubahan dari tahun 2013. Namun pembangunan sentra IKM terpadu telah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan telah dibangunnya 1 unit sentra IKM terpadu.

Tabel 2.154
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Sentra IKM yang dibina	5	6	6	6
2.	Jumlah wirausaha industri kecil menengah	2.760	2.866	2.866	2.866
3.	Pembangunan Sentra IKM terpadu	-	-	1	-

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

5) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Tabel 2.155
Peningkatann Kemampuan Teknologi Industri
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase Penerapan GKM pada IKM	25 IKM	25 IKM	20 IKM	20 IKM
2.	Restrukturisasi peralatan IKM (unit usaha)	39 uu	49 uu	60 uu	
3.	Perluasan penerapan Sertifikasi halal	20	20	25	35

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Pengembangan industri di Kabupaten Karawang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing produksi dengan senantiasa memperhatikan permasalahan sosial ekonomi yang mendasar. Sektor industri di Kabupaten Karawang masih didominasi oleh industri kecil formal dan non formal disusul industri menengah besar.

Tabel. 2.156
Jenis Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No.	Unit Usaha	2011	2012	2013	2014
1.	PMA	371	486	511	511
2.	PMDN	213	213	226	226
3.	Non Fasilitas	179	207	217	217
4.	Industri Kecil	9.001	9.014	9.025	9.025
Jumlah		9.764	9.920	9.963	9.963

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Penyambungan listrik desa (lisdes) untuk masyarakat kurang mampu pada tahun 2014 sebanyak 10.162 SR, bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2.066 SR maka terjadi peningkatan sebesar 491 %. Sementara untuk penyediaan listrik tenaga surya (solar cell) pada tahun 2014 tidak dilaksanakan. Sedangkan penyambungan listrik desa yang bersumber dari APBD I pada tahun 2014 sebanyak 1.460 SR dengan total sambungan dari tahun 2010 sebanyak 4.000 SR. Adapun data keluarga miskin pada tahun 2010 yang belum mendapat sambungan listrik sebanyak 40.907 keluarga miskin dan sudah teraliri pada tahun 2014 sebanyak 20.374 sehingga masih

tersisa 20.533 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik.

Tabel 2.157
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Penyambungan Listrik Desa (Lisdes) utk masyarakat kurang mampu	1.222 SR	2.908 SR	3.342 SR	11.662 SR
2.	Penyediaan Listrik Tenaga Surya (Solar Cell)	-	32 SR	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Pengawasan penertiban pertambangan rakyat pada tahun 2014 dan Tahun 2013 tidak dilaksanakan dikarenakan Wilayah Pertambangan (WP) baru ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2014 serta belum terbitnya Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tanggal 28 September 2014 yang mengatur Kewenangan Pemerintahan. Untuk penyebaran peta rawan bencana tidak dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dikarenakan penyusunan peta rawan bencana dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.158
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengawasan penertiban pertambangan rakyat	26	554	-	-
2.	Pengawasan penertiban penggunaan air bawah tanah	70	75	100	-
3.	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang memiliki tiga sumber air yang cukup potensial dengan kualitas yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi air minum kemasan. Ketiga sumber air dimaksud adalah :

- 1) Sumber air Ciburial dengan kapasitas 10 liter/detik, yang baru dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Karawang 4 liter/detik, untuk melayani konsumen sebanyak 1.163 SL dan 27 KU tersebar di 4 desa.
- 2) Sumber air Curug Cigentis dengan kapasitas 300 liter/detik, dimanfaatkan untuk air minum pedesaan ± 40 liter/detik guna melayani 4 desa.
- 3) Sumber air di Cinapel Desa Cigunungsari ± 20 liter/detik, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian.

Dari potensi air tersebut, baru dimanfaatkan untuk air minum pedesaan dan PDAM Kabupaten Karawang kurang lebih sebanyak 50 liter/ detik, sisanya 280 liter/detik belum dimanfaatkan, baik untuk kebutuhan air bersih maupun air kemasan lainnya.

Berdasarkan hasil survey data Potensi Sumber Daya Air Bawah Tanah pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bahan Galian	Lokasi	Potensi	Keterangan
1.	Mata Air	Desa Wargasetra, Kec. Tegalwaru	Belum Dikaji	-
2.	Mata Air	Mekarbuana Kec. Tegalwaru	Dikelola Oleh PDAM	-
3.	Mata Air	Desa Tamansari, Kec. Pangkalan	Belum Dikaji	Dsn Citanam
4.	Mata Air	Desa Tamansari, Kec. Pangkalan	Dikelola Oleh PDAM	Ciburial

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Air Bawah Tanah sangat bermanfaat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk perusahaan. Ada sekitar 182 perusahaan di Kabupaten Karawang yang memanfaatkan potensi Air Bawah Tanah, terjadi penambahan sebanyak 14 perusahaan yang menggunakan air bawah tanah karena adanya penambahan perusahaan baru yang tidak terlayani oleh PDAM dibandingkan data tahun 2014. Adapun secara rinci jumlah perusahaan yang memanfaatkan potensi Air Bawah Tanah sebagai berikut :

Tabel 2.160
Data Perusahaan yang Memanfaatkan Potensi Air Bawah Tanah
di Kabupaten Karawang Tahun 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JML TTK	VOLUME (M3)
1	PT. Pertiwi Alam Samudra	Jl. Tunggak Jati Ds. Wanasepi Kec. Karawang	4	543
2	PT. Mitra Kimia Textil Perdana	Jl. Gintungkerta Klari	1	400
3	PT. Mitra Setia Eka Perwira	Ds. Gintung Kerta -Klari	3	1.297
4	PT. Asietex Indo Pratama (1)	JL. Akses Interchange Dawuan No. 2	3	6.529
5	PT. Asietex Indo Pratama (2)	JL. Akses Interchange Dawuan No. 2	1	2.849
6	PT. Leuwijaya Utama	Ds. Anggadita - Klari	4	4.982
7	PT. Fuli Semitex Jaya	Jl. Surotokunto Ds. Warung Bambu -Klari	4	4.793
8	PT. Nidia Prima Tirta	Jl. Raya Cikampek - Karawang Kec. Purwasari	4	43
9	RSIA Dr. Djoko Pramono	Jl. Panatayuda I No. 44, Karawang	2	455
10	PT. Sarana Sumber Tirta	Jl. Raya Klari	2	2.363
11	PT. Sarana Baja Ragam Citra	Jl. Raya Klari	2	350
12	PT. Kayafit Metal Industry	JL. Raya Mekar Jaya	2	741
13	Rs. Dewi Sri	Jl. Arief Rahman Hakim Ds. Nagasari Kec. Krw	2	2.482
14	PT. Tarumes Utama	Jl. Gorowong, Desa Adiarsa Timur	1	3.990
15	PT. Supravisi Rama Optic, Mfg.	Jl. Karawang Spoor, Telukjambe	3	6.024
16	PT. Karawang Sport Center Indonesia	Ds. Badami, Telukjambe	2	4.067
17	PT. Karawang Utama Textile	Jl. Anggadita Ds. Rumambe Klari	1	1.890
18	PT. Sandang Makmur Anugrah	Jl. Raya Klari Km.5 Ds. Warung Bambu -Klari	4	14.199
19	PT. Unipack	Jl. Anggadita Klari	1	

	Plasindo Corp			233
20	RS. Delima Asih	Jl. Wirasaba Kec. Karawang Timur	1	557
21	PT. Chang Shin Indonesia	Jl. Gintungkerta Klari	3	22.104
22	PT. Rajut Warna Sejati	Jl. Proklamasi Ds. Tunggak Jati	1	1.480
23	PT. Adyawinsa Dinamika Karawang	Jl. Pangkal Perjuangan no. 98 Karawang	1	1.323
24	PT. Associated British Budi	Jl. Raya Cikalong Sari, Jatisari	4	17.791
25	PT. Astra Internasional (Auto 2000)	Jl. Suroto kunto	2	3.020
26	PT. Lancar Sentosa	Jl. Kosambi Curug No. 88, Klari	1	298
27	PT. Bintang Kreasi Aroma	Ds. Gintung Kerta Klari	1	250
28	PT. Technopia Jakarta	Jl. Interchange Karawang Timur	2	3.115
29	PT. Pancuran Tirta Mulia	Jl. Ry. By pass - Jomin cikampek	1	2.550
30	PT. Acon Indonesia	Jl. Interchange Dawuan Kec. Cikampek	1	2.550
31	Rumah Sakit Cito	Jl. Arteri Interchange Tol Krw Barat	1	1.660
32	PT. Jasa Medivest	Jl. Raya Interchange Dawuan	1	687
33	PT. Central Pangan Pertiwi	Jl. Raya Purwasari	2	6.489
34	PT. Plasindo Lestari	Desa Sadang Puwasari Cikampek	1	5.806
35	PT. Pulau Intan Lestari	JL. Terusan Tol Cikampek	3	2.510
36	RS Bayukarta	Jl. Kertabumi Ds. Karawang Kulon	1	4.695
37	Mall Karawang	Jl. Tuparev	2	4.170
38	PT. Harmonic Techindo Agung	Jl. Gintungkerta, Klari	2	540
39	PT. Indo Spray	Jl. Pancawati, Klari	1	660
40	PT. Trigoldenstar Wisesa Indonesia	Ds. Anggadita -Klari	2	1.023
41	PT. Pentair (PT. Tyco)	Jl. Anggadita -Klari	1	1.451
42	PT. Eka Karya Graha Perdana	Jl. Raya Interchange Dawuan	3	4.505
43	PT. Triguna Pratama Abadi	Jl. Gintung Kerta - Klari	4	1.585
44	PT. M Class Industry	Jl. Kosambi Curug - Klari	3	3.392
45	PT. ASK Technica Indonesia (PT. Satonas)	Ds. Gintungkerta, Klari	3	955
46	PT. Agel Langgeng	Jl. Raya Interchange Dawuan	1	500
47	PT. Citatah Tbk	Jl. Raya Tamelang	1	1.704
48	PT. Fumindo Pratama Raya	Jl. Raya Interchange Dawuan	1	1.365
49	PT. Asri Pancawarna	JL. Raya Intercange Dawuan	4	13.530
50	PT. Muria	DS. Sadang Purwasari	1	

	Agung Karya Baja			900
51	PT. Sarana Central Bajatama	Jl. Raya Krajan Mekar Jaya	3	2.229
52	PT. Shinwon Ebenezer	Jl. Raya Purwasari	2	912
53	PT. Knauf Gypsum Surya Indonesia	Jl. Raya Dawuan Cikampek	2	5.930
54	Hotel Araruna	Jl. By Pass Jomin Timur - Cikampek	2	1.000
55	Hotel Mutiara	Jl. Ir. H. Juanda Jomin Barat - Cikampek	1	550
56	PT. Syngenta Agro Service	Jl. Balong Gandu, Jatisari	1	3.076
57	Hotel Purnama	Jl. Sudirman Cikampek	1	605
58	RS. Karya Husada	Jl. A. Yani Cikampek	2	2.300
59	SPBU Purwasari	Jl. Raya Purwasari Cikampek	1	360
60	PT. Kido Jaya II	Jl. Raya Purwasari Cikampek	1	29
61	Rumah Sakit Saraswati	Jl. A. Yani 27 Cikampek	1	1.750
62	PT. Samasatya Cilamaya Gas	Ds. Pasirukem Kec. Cilamaya	1	1.243
63	SPBU 3441309	Jl. Raya Kali Asin Kec. Jatisari	1	310
64	SPBU 3441319	Jl. Raya By Pass Jomin Kec. Cikampek	1	310
65	BCA Capem Karawang	Jl. Panatayuda Ds. Nagasari kec. Karawang	1	550
66	Hotel Bestin	Jl. Tuparev Ds. Cinangoh	1	760
67	Roti Dewi	Jl. Dewi Sartika Ds. Karawang Wetan	1	5
68	Hotel Dewi I	Jl. Dewi Sartika Ds. Karawang Wetan	1	201
69	Hotel Dewi II	Jl. Kertabumi Ds. Karawang Kulon	4	660
70	PT. Restu Mahkota Karya	Jl. Jend. A. Yani Ds. Karang Pawitan	2	1.000
71	PT. Sungwon Indonesia	Jl. By. Pass Karawang	4	2.707
72	PD. Prakasa	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 79	2	610
73	PT. Gudang Garam	Jl. A. Yani By. Pass Karawang	1	500
74	Darujati Mobilindo (Bunderan Motor)	Jl. Jend A. Yani Km. 39 Karawang	1	500
75	PT. Prabu Pura Motor	Jl. Suroto Kunto	1	1.050
76	Hotel Fajar Indah	Jl. Tuparev	1	700
77	Delima Cap Kunci	Jl. Tuparev	1	350
78	PT. Tirta Investama	Jl. By. Pass - Tanjung Pura Karawang	1	350
79	PT. Sarana Sangga Mekar Luhur	Jl. By. Pass- Tanjung Pura Karawang	1	350
80	PT. Mitra Jaya Sejahtera	Jl. Proklamasi No. 68 Kec. Rengasdengklok	1	350
81	PT. Kerupuk Usaha Baru	Jl. Kerta Jaya No. 659 Rengasdengklok	1	350

82	PT. Macan Sinar Jaya Cemerlang	Jl. Tuparev Karawang	2	474
83	PT. Heinz ABC	Jl. By pass- Sukarno Hatta	1	510
84	Hotel Omega	JL. A Yani Kec. Karawang	3	1.000
85	Hotel Cendrawasih	Jl. RD. Moh Saleh	1	500
86	PT. PLN Karawang	Jl. Kertabumi	1	550
87	PT. Graha Pangan Lestari	Jl. Rangga Gede	1	450
88	PD. Prakasa II	Jl. Proklamasi	1	500
89	PT. Kresna Bumitama Sejati	Ds. Duren Klari	2	510
90	PT. Antontex Industri	Ds. Gintung Kerta Klari	1	1.500
91	PT. Canvas Industry	Jl. Warung Bambu - Klari	2	2.845
92	PT. Ultra Prima Abadi	Ds. Walahar -Klari	2	5.515
93	PT. Gemilang Jaya	Jl. Kopel Ds. Gintungkerta-Klari	1	750
94	PT. Wonti Indonesia	Ds. Gintung Kerta -Klari	2	3.211
95	PT. Timuraya Tunggal	Jl. Anggadita -Klari	4	30.391
96	PT. Citra Sari Inti Buana	Jl. Anggadita -Klari	1	4.500
97	PT. Dia Electro Circuit System Indonesia	Jl. Kosambi Curug Klari	3	1.500
98	PT. Buana Harimau Textile	Jl. Kondang Jaya, Klari	1	850
99	PT. Kido Jaya I	Jl. Pancawati, Klari	2	1.254
100	PT. Matsuzawa Pelita Furniture	Jl. Cirnabay, Klari	3	5.500
101	PT. DIC Grapics	Jl. Anggadita, Klari	4	4.520
102	PT. Reflective Performance Glass	Jl. Raya Klari KM. 1	1	964
103	PT. Prolimas Utama Jaya	Jl. Raya Cikampek - Klari KM. 85	1	169
104	PT. Sentrafood Indonusa	Ds. Anggadita Klari	2	2.500
105	PT. Bukit Muria Jaya	Jl. Karawang Spoor Kec. T. Jambe	3	3.522
106	PT. Indoliberty	Ds. Telukjambe	1	2.500
107	PT. Kopolco Indonesia	Jl. Kiarapayung	1	3.000
108	PT. Royal Standard	Jl. Raya Klari Km.45	1	1.500
109	PT. Adyawinsa Stamping Industry	Jl. Surotokunto Klari	1	3.187
110	PT. Pancaran Mulia Sejati	Jl. Raya Klari Km. 8	1	900
111	PT. Sankosha Indonesia	Jl. Interchange Karawang Timur Klari	1	110
112	PT. Daya Adicipta Mustika	Jl. Interchange Karawang Barat - T.Jambe	1	750

113	PT. Putra Duta Buana Sentosa	Jl. Kosambi Curug - Klari	2	260
114	PT. Alda Henco Internusa	Jl. Gintung Kerta Klari	1	300
115	PT. Metro Kinki Metal	Jl. Kosambi Curug - Klari	1	250
116	SPBU 3441316	Jl. Raya Kosambi-Klari	1	260
117	SPBU 3441320	Jl. Interchange Karawang Timur-Klari	1	260
118	PT. Universal Kharisma Garment	Jl. Pokja Klari	1	2.220
119	PT. Indo Citra Widhitama	Ds. Anggadita - Klari	1	750
120	PT. Danwoo Steel Sejati	Jl. Raya Klari	1	750
121	PT. Trumik Beton/PT. Holcim Beton	Jl. Raya Klari	1	3.000
122	RM. Indo Alam Sari	Jl. Interchange Karawang Barat	4	1.600
123	PT. Bukit Muria Jaya Estate	Jl. Interchange Karawang Barat	2	304
124	PT. Siam Indo Concert Product	Jl. Kosambi Curug - Klari	2	2.720
125	PT. Innovindo Kreasi Bersama/PT. Ind. Sandang	Jl. Raya Telukjambe	1	100
126	Hotel Cikampek	Jl. Raya By Pass Jomin Kec. Cikampek	1	1.000
127	PT. Karya Beton Sudira	Jl. Raya Klari Km. 7 Kec. Klari Karawang	1	3.000
128	PO. Agra Mas	Jl. Raya Klari Ds. Warung Bambu Karawang	3	1.815
129	PT. Subur Plus	Jl. Pangkal Perjuangan No. 8 Karawang	2	800
130	PT. H.M Sampoerna (d/h PT. Panamas)	Jl. Pangkal Perjuangan No. 9 Karawang	1	555
131	Depot BBM PERTAMINA Cikampek	Jl. Raya Dawuan - CIKAMPEK	2	3.000
132	PT. Bina Selaras Cipta Griya (Mall Cikampek)	JL. Jend. A. Yani - Cikampek	2	1.191
133	RM. Mang Ajo	Jl. Interchange tol krw barat	1	391
134	PT. Beesco Indonesia	Jl. Raya Cikampek Km.2	4	6.270
139	RS. Izza (RS. Aqma)	Jl. Raya Ciselang, Kota Baru	1	1.132
140	PT. Jatisari Sri Rejeki	Jl. Raya Cikampek Cirebon Km.104 Jatisari	2	3.000
141	PT. Karunia Berkat Abadi	Jl. Raya Klari Km. 45 Karawang	1	1.000
142	PT. Mitra Buana Jaya Lestari/Rest Area KM. 57	Ds. Gintungkerta - Klari	2	2.500
143	P0. Warga Baru	Jl. Raya Cirebon - Karawang	1	1.500
144	PT. Victorindo Kimiatama	Ds. Warungbambu Kec. Karawang Timur	1	750
145	RSU.	Jl. Raya Proklamasi - Kec.	1	

	Proklamasi	Rengasdengklok		1.500
146	PT. Dahyun Indonesia	Jl. Arteri Interchange Tol Krw Timur	2	2.000
147	PT. Jasa	Jl. Rest Area Km.62 Tol Jakarta - Cikampek Karawang	1	4.110
148	RS. Lira Medika (RS. Lamarin)	Jl. Syeh Quro - Lamarin - Karawang	2	520
149	PT. Tae Sung Metal	Jl. Kosambi - Curug Kec. Klari	1	900
150	Hotel Grand Pangestu	Jl. Raya Klari - Cikampek Kec. Klari	2	1.431
151	CV. Sinar Surya Motor	Jl. Interchange Tol Krw Barat Kec. Telukjambe	1	900
152	RS. Citra Sari Husada / PT. Novialiando Husada	Jl. Raya Telagasari - Ds.Cibalongsari Kab.Karawang	1	3.610
153	RS. Islam	Jl. Raya By Pass, Karawang	4	4.000
154	PT. Purindera Nusraya	Jl. Raya Klari Ds. Warung Bambu Karawang	1	350
155	PT. Tanu Alvindo Perkasa	Jl. Raya Klari Ds. Warung Bambu Karawang	1	120
156	PT. Karya Bahana Unigam	Jl. Proklamasi Rengasdengklok	1	1.355
157	PT. Indoheat Metal Inti	Jl. Anggadita -Klari	1	22
158	Dewi Air	Jl. Arteri Interchange Tol Krw Barat	1	450
159	RS. Puri Asih	Jl. Raya Cikampek Cirebon, Jatisari	1	2.000
160	PT. Tarumes Utama	Jl. Gorowong, Desa Adiarsa Timur	1	3.990
161	PT. Dengensha Indonesia	Ds. Calung Telukjambe Barat	1	180
162	PT. Cipta Unggul Karya Abadi	Kp. Jenebin, Desa Purwadana	1	900
163	PT. Pilar Cakrawala	Kp. Bobojong Desa Purwadana	1	900
164	CV. Hasba	Jl. Raya Purwasari	1	255
165	PT. Bintang Cikupa	Jl. Interchange Karawang Timur - Klari	1	100
166	PT. Inni Pioneer Food Industry	Jl. Gintung Kerta	1	257
167	PT. Super Liteblok Indonesia	Jl. Raya Proklamasi KM. 5, Desa Tunggak Jati - Karawang	1	1.923
168	Hotel Permata Ruby	Jl. Kartini No. 12, Karawang	1	501
169	PT. Cheong Lim Jaya Prindo	Jl. Surotokunto, Karawang	1	1.500
170	PT. Graha Buana Prima	Jl. Raya Galuh Mas	1	2.348
171	PT. Royal Cotton	Ds. Gintung Kerta -Klari	1	3.500
172	PT. Pralon	Ds. Gintung Kerta -Klari	1	2.604
173	PT. Redikon	Jl. Interchange Tol Karawang Timur, Klari	1	3.500
174	Hotel Grand Karawang Indah	Jl. A. Yani Kec Karawang	1	610
175	PT. Central Protein Prima	Jl. Raya Proklamasi, Desa Tunggak Jati - Karawang	1	3.000

176	PT. Saltindo Perkasa	Ds. Gintung Kerta - Klari	3	800
177	PT. Mitra Alumindo Selaras	Jl. Kopel Ds. Gintungkerta - Klari	3	3.700
178	PT. Indo Ducting Primatama	Ds. Pancawati, Klari	1	1.200
179	RS. Mitra Family	Jl. Raya Galuh Mas	1	1.500
180	Grand Amy (PT Helma)	Jl. Arteri Interchange Tol Krw Barat	1	1.000
181	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Jl. Lingkar Luar Tj. Pura - Klari, Karawang	1	2.500
182	PT. Dinar Makmur	Jl. Panayungan 89 Telukjambe Timur	1	1.050
JUMLAH TOTAL			291	390.688

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Sumbangan sektor pertambangan dan bahan galian terhadap PDRB Kabupaten Karawang tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karawang, karena daerah yang memungkinkan untuk dieksploitasi hanya bagian selatan, khususnya sekitar kecamatan Pangkalan. Potensi bahan galian di Kabupaten Karawang diketahui terdiri atas batu andesit, pasir, sirtu, lempung dan tanah merah Adapun data potensinya sebagai berikut:

Tabel 2.161
Data Potensi Sumberdaya Mineral di Kabupaten Karawang

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Potensi	Luas Eksploitasi	Keterangan
1.	Tanah Merah	Purwasari	- Ha	± - Ha	-
2.	Batu Gamping	Pangkalan	300 Ha	-. Ha	Pertambangan Rakyat
3.	Tanah Lempung	Pangkalan	720 Ha	5 Ha	Pertambangan Rakyat
4.	Batu Andesit/Batu Belah	Tegalwaru	> 50 Ha	20 Ha	Pengusaha
4.	Tanah Lempung Tanah Liat				
5.	Tanah Liat	Tlj Barat			-
6.	Pasir Laut	Kec. Pakisjaya			-
7.	Pasir Laut	Kec. Tempuran			-
8.	Pasir Laut	Kec. Cilamaya			-
9.	Tanah Urug	Kec. Cikampek			-
10.	Pasir Kwarsa	Kec. Jatisari			Belum Dikaji
11.	Basi Titan	Kec. Cibuaya			Belum Dikaji

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Potensi	Luas Eksploitasi	Keterangan
12.	Batu Galena	Gunung Sanggabuana			Belum Dikaji

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Untuk sektor pertambangan diwilayah Karawang Selatan khususnya di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Tegalwaru pada tahun 2014 terjadi pengurangan dari 3 (tiga) perusahaan pada tahun 2013 menjadi 2 (dua) perusahaan pada tahun 2014, yaitu perusahaan perorangan atas nama Lili Suriwati yang habis perijinannnya dan belum dapat diperpanjang menunggu penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Adapun data potensinya sebagai berikut :

Tabel. 2.162
Data Pertambangan (Galian C) yang Berizin (SIPT) di
Kabupaten Karawang

No	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Nama Pemilik	Luas Eksploitasi
1	PT. Tianti Nauli	Tanah Lempung	Desa Taman Mekar, Kac. Pangkalan	Chang Kuo Liang	± 5 Ha
2	PT. Atlasindo Utama	Batu Andesit	Desa Cinta Langgeng, Kec. Tegalwaru	Drs. Gerald Sugito	± 20 Ha

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil survey, sumberdaya mineral di Kabupaten Karawang yang merupakan potensi bahan galian adalah sebagai berikut:

- (a) Pasir dan Sirtu
- Pertambangan pasir di Kecamatan Klari terdapat di daerah Curug yang digali dari permukaan tanah, namun sekarang potensinya sudah habis.
 - Pertambangan pasir dan sirtu yang berada di Kecamatan Pangkalan terutama yang berada di Desa Taman Mekar merupakan Pertambangan Rakyat yang pada umumnya

digali dari Sungai Cibeet di perbatasan antara Karawang dan Bekasi.

- Pertambangan pasir dan sirtu serta koral yang berada di Kecamatan Ciampel merupakan pertambangan rakyat dengan potensi bahan galian yang berada di bukit-bukit serta mempunyai susunan terdiri atas komponen batuan beku berukuran bongkah hingga kerikil dengan bentuk umumnya bundar tanggung yang berada di permukaan tanah dan tersebar sangat luas, demikian pula dengan endapan pasir berwarna kehitaman yang tersebar sangat luas.

(b) Tanah Merah

- Potensi pertambangan galian tanah merah berlokasi di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari yang merupakan bukit-bukit kecil, namun potensi tersebut sudah mulai habis dieksploitasi, kecuali yang dikelola oleh perorangan yang bernama Ihsan.

(c) Batu Andesit/Batu Belah

- Potensi batu andesit berlokasi di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru yang tersebar di perbukitan. Batu andesit tersebut berwarna abu kehijauan, pejal dan keras sebagian retak dan berongga, penggalian sangat sulit dilakukan dengan alat sederhana. Pertambangan batu andesit selama ini dikelola sebagai pertambangan rakyat walaupun ada juga yang dikelola oleh perusahaan yang sudah mempunyai izin.

(d) Batu Gamping

Potensi batu gamping terdapat dan tersebar di Kecamatan Pangkalan dengan jumlah terbesar di Desa Citaman dan Desa Tamanmekar. Batu gamping tersebut selain dikelola oleh perusahaan yang sudah mempunyai izin, juga dikelola oleh masyarakat sebagai pertambangan Rakyat yang tidak memiliki perizinan. Batu Gamping merupakan kristalisasi sebagai bahan Batu Kapur.

(e) Tanah Lempung

Potensi tanah lempung terdapat dan tersebar di Kecamatan Pangkalan, Tegalwaru dan Telukjambe Barat yang digali dari permukaan tanah, dengan jumlah terbesar terdapat di Desa Tamanmekar.

(f) Pasir Laut

Potensi pasir laut tersebar dan terdapat di 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Cilamaya. Potensi pasir laut dengan lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten belum dikaji luasan potensinya.

(g) Batu Galena

Batu galena adalah batuan yang mengandung biji emas, biji tembaga, biji kuningan dan lain-lain yang belum dikaji. Lokasi potensi galian batu galena berada di Gunung Sanggabuana yang sulit untuk dijangkau karena berada di atas gunung

Kegiatan pertambangan dan bahan galian di Kabupaten Karawang terdiri atas :

- Galian Batu untuk bahan bangunan dan pekerasan jalan, banyak tersebar didaerah perbukitan Kecamatan Pangkalan.

- Galian pasir dengan memanfaatkan Sungai Cigentis, Cikompeni dan Cibeet.
- Galian Batu Kapur yang diolah ditempat, banyak tersebar sepanjang jalan raya Kecamatan Pangkalan menuju Objek Wisata Mekarbuana.

Jumlah dan nilai produksi pertambangan dan bahan galian tidak terdata, namun untuk pemasarannya sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal dan sebagian dipasarkan keluar Kabupaten Karawang, diantaranya ke Kabupaten Purwakarta, Bekasi dan Depok.

Sumbangan sektor pertambangan dan bahan galian terhadap PDRB Kabupaten Karawang tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam kabupaten karawang, karena daerah yang memungkinkan untuk dieksploitasi hanya bagian selatan, khususnya sekitar kecamatan Pangkalan. Potensi bahan galian di Kabupaten Karawang diketahui terdiri atas batu andesit, pasir, sirtu, lempung dan tanah merah.

Kehutanan

Secara umum pelestarian sumberdaya alam dilakukan dengan tujuan untuk : (1) memantapkan, melindungi dan mengamankan keberadaan kawasan hutan sebagai aset negara dan (2) menjaga fungsi serta memulihkan hutan dan lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dalam rangka mengurangi lahan kritis, baik untuk hutan darat maupun hutan pantai. Hasil Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Rehabilitasi Hutan (GERHAN) yang dimulai tahun

2004 telah berhasil melakukan penanaman untuk mengurangi lahan kritis seluas 8.500,5 Ha, sampai dengan tahun 2014.

1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tabel 2.163
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Darat
di Luas Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2004	10.354	2.500	7.854
2.	2005	7.854	125	7.729
3.	2006	5.729	2.760	4.969
4.	2007	4.969	890	4.079
5.	2008	4.079	800	3.279
6.	2009	3.279	81	3.198
7.	2010	3.198	25	3.173
8.	2011	3.173	25	3.148
9.	2012	3.148	502	2.646
10.	2013	2.646	296,8	2.349,2
11.	2014	2.419,7	270,5	2.184,4

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.164
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Hutan Pantai di Luar Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2004	6.595	-	6.595
2.	2005	6.595	-	6.595
3.	2006	6.595	530	6.065
4.	2007	6.065	450	5.615
5.	2008	5.615	-	5.615
6.	2009	5.615	-	5.615
7.	2010	5.615	-	5.615
8.	2011	5.615	15	5.600
9.	2012	5.600	75	5.525
10.	2013	5.525	84,5	5.440,5
11.	2014	5.440,5	35,5	5.405,0

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 adalah 7.173,9 Ha tersebar di 14 kecamatan (9 kecamatan di wilayah pantai dan 5 kecamatan di wilayah darat). Perbandingan luas lahan kritis tahun 2011 s.d. 2014, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.165
Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Kecamatan	Luas (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pakisjaya	1.572	1.172	1.172	1.172,0
2.	Ciampel	1.272	752	747	707,0
3.	Tegalwaru	1.134	1.054	891,5	731,5
4.	Batujaya	1.004	1.004	1.004	1.004,0
5.	Tirtajaya	830	830	830	830,0
6.	Cilamaya Wetan	664	634	627,8	612,3
7.	Pedes	520	520	515	515,0
8.	Telukjambe Timur	500	480	480	480,0
9.	Tempuran	412	402	389,5	379,5
10.	Telukjambe Barat	322	255	215	215,0
11.	Cibuaya	270	270	270	270,0
12.	Cilebar	226	211	156	156,0
13.	Pangkalan	132	92	65,3	30,3
14.	Cilamaya Kulon	92	82	81,3	71,3
T O T A L		8.950	8.171	7.444,3	7.173,9

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Terjadinya lahan kritis di Kabupaten Karawang disebabkan antara lain karena adanya alih fungsi hutan menjadi tambak dan banyak lahan yang dimiliki oleh pengusaha di kawasan industri yang dibiarkan terlantar.

Tabel 2.166
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Darat Di Luas Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	3.198	25	3.173
2.	2011	3.173	125	3.043
3.	2012	3.148	502	2.646
4.	2013	2.646	296,8	2.349,2
5.	2014	2.349,2	164,8	2.313,7

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.167
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Hutan Pantai di Luar Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	5.615	-	5.615
2.	2011	5.615	140	5.475
3.	2012	5.600	75	5.525
4.	2013	5.525	84,5	5.440,5
5.	2014	5.440,5	35,5	5.275,7

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.168
Perkembangan LuasHutan Kota di Kab. Karawang

No.	Tahun	Luas Hutan Kota (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	2010	-	2	2
2.	2011	-	-	-
3.	2012	-	-	-
4.	2013	-	-	-
5.	2014	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

2) Program Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

Tabel 2.169
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Lebah madu (stup)	-	-	-	20
2.	Pengembangan bambu (ha)	-	-	-	5
3.	Pengembanganwisataalam (paket)	-	-	-	2
4.	Pemanfaatanlahanbawahtegakan (ha)	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

3) Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Tabel 2.170
Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	JumlahKajianRencanaTeknisTahunanRehabilitasi (RTnRHL)	-	6 buku	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang sampai saat ini memiliki sumber daya hutan, yang terdiri dari : hutan produksi, hutan bakau dan hutan lindung, dimana kawasan hutan produksi dan hutan lindung sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru, sedangkanhutan bakau terdapat di daerah pantai utara; yaitu di

Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya, Cilamaya Wetan dan Tirtajaya. Berdasarkan kondisi yang ada, sampai dengan tahun 2010 luas hutan di Wilayah Kabupaten Karawang mencapai 36.831 Ha, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. S.276/Menhut/VII/2010, terdiri atas :

- a. Hutan Lindung

:

±9.325,7 Ha
- terletak di

:

Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya dan Cilamaya Wetan.
- b. Hutan Produksi Terbatas

:

±3.643,14 Ha
- terletak di

:

Kecamatan Tegalwaru,Pangkalan dan Ciampel
- c. Hutan Produksi Tetap

:

±10.557,59 Ha
- terletak di

:

Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Pangkalan, Tegalwaru dan Ciampel.

Tabel 2.171
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Statusnya

No	Uraian	Luas (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
A.	Kawasan Konservasi	-	-	-	-
	1. Cagar Alam	-	-	-	-
	2. Suaka Margasatwa	-	-	-	-
	3. Taman Wisata	-	-	-	-
	4. Taman Buru	-	-	-	-
	5. Taman Nasional	-	-	-	-
	6. Taman Hutan Raya	-	-	-	-
B.	Hutan Lindung	8.454	8.454	8.454	8.454
C.	Hutan Produksi				

No	Uraian	Luas (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
	1. Hutan Produksi Terbatas	12.355	12.355	12.355	12.355
	2. Hutan Produksi Konservasi	2.897	2.897	2.897	2.897
	3. Hutan Kota	2	2	2	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Hutan mangrove di Kabupaten Karawang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu : Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Potensi koloni hutan mangrove yang terbesar terdapat di Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar dan Cilamaya, sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya hanya bersifat setempat dengan jumlah pohon yang tinggal beberapa batang saja. Mengingat mangrove lebih cocok tumbuh di tanah yang berpasir lumpur, khusus di daerah Pakisjaya yang struktur tanahnya hanya berpasir dan tidak berlumpur, vegetasi didominasi oleh tanaman pakis atau Pinus merkusii, bukan vegetasi mangrove.

Tabel 2.172
Luas Hutan Mangrove Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Tahun 2014

No.	Kecamatan	Desa	Luas Desa (Ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Luas Hutan Mangrove (Ha)
1.	Pakisjaya	Tanjungpakis	1.828	11,25	10
2.	Batujaya	Segarjaya	1.626	2,25	10
3.	Tirtajaya	Tambaksari	2.475	6	15
4.	Cibuaya	Sedari	2.518	12	5
		Cemarajaya	1.031	8	5
5.	Pedes	Sungaibuntu	996	4,5	10
6.	Cilebar	Pusakajaya Utara	866	6,3	65
		Mekarpohaci	872	2,25	40
7.	Tempuran	Tanjungjaya	1.008	1,7	5
		Sumberjaya	686	0,6	3
		Cikuntul	547	0,8	4
		Tempuran	479	1	2
		Ciparagejaya	480	2,5	10
8.	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	862	0,9	5
		Sukajaya	620	3,6	25
9.	Cilamaya Wetan	Sukakerta	732	1	20
		Rawagempol Kulon	548	1,7	-

No.	Kecamatan	Desa	Luas Desa (Ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Luas Hutan Mangrove (Ha)
		Muara Baru	738	4,5	60
		Muara	1.569	2,8	75
	JUMLAH		20.481	73,65	369

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan
Kabupaten Karawang
Catatan : 369 Ha adalah di luar kawasan hutan

Ketransmigrasian

1) Program Transmigrasi Regional

Program Transmigrasi Regional bertujuan untuk terlaksananya perpindahan penduduk dari Kabupaten Karawang keluar Pulau Jawa khususnya ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) terpilih disertai dengan peralatan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran program ini adalah keluarga yang berminat dan terpilih serta kurang mampu tetapi mempunyai tekad yang kuat untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program transmigrasi maka dilakukan pelaksanaan tahap awal, adalah diadakannya penyuluhan tentang ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluh tingkat kabupaten, yang dilaksanakan di kecamatan maupun desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan pendaftaran bagi calon transmigran. Sambil menunggu kesiapan lokasi dan jadwal keberangkatan petugas kabupaten terus mengadakan pembinaan lanjutan.

Tahapan pelaksanaan transmigrasi adalah :

- Kegiatan pengerahan dan pengiriman transmigrasi

Merupakan proses awal dari penyuluhan sampai calon transmigran siap untuk diberangkatkan, baik secara administrasi maupun kesiapan fisik dan mental.
- Pengadaan perbekalan transmigrasi

Perbekalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang merupakan penunjang untuk persiapan pada saat menempati lokasi baru, selain pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
- Koordinasi dan Kerjasama antar daerah di luar Jawa

Dari hasil koordinasi ini akan diperoleh lokasi untuk transmigran tahun berikutnya, melewati penjajakan dan observasi.

Tabel 2.173
Pencapaian Pemberangkatan Transmigran
Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Tahun	Jumlah		Tempat/lokasi
		KK	Jiwa	
1.	2011	15	60	UPT Bekkae SP 2 Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan
		8	30	UPT Daruba SP 3/Dehe Gile Kab. Kep. Morotai Prov. Maluku Utara
		10	67	UPT Dadaup SP 2 Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
	JUMLAH	33 KK	157 JW	
2.	2012	5	26	UPT Dadaup C.4 Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
		15	43	UPT Motongkat Kab. Bolaang Mangondow Timur Prov. Sulawesi Utara
	JUMLAH	20 KK	69 JW	

No.	Tahun	Jumlah		Tempat/lokasi
		KK	Jiwa	
3.	2013	13 KK	56	UPT Kosa SP.2 Kota Kepulauan Tidore Provinsi Maluku Utara
	JUMLAH	13 KK	56 JW	
4.	2014	10	40	Unit Pemukiman Transmigrasi Saembawalati Desa Kancu Kec. Pamona Timur Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah Keterangan: Akan diberangkatkan pada awal tahun 2015 sesuai Surat Perintah Penempatan
	JUMLAH	10 KK	40 JW	

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Terjadi penurunan pemberangkatan transmigrasi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Kecenderungan penurunan ini terjadi pula pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Tabel 2.174
Capaian Kinerja Transmigrasi Regional
Tahun 2011-20134

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pengarahan dan pengiriman calon transmigrasi yang dilaksanakan	33	20	13	10
2.	Jumlah koordinasi dan kerjasama antar daerah di luar Jawa yang dilaksanakan	7	6	1	4
3.	Jumlah Pengadaan perbekalan transmigran	40	20	40	10

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Kuantitas pengarahan dan pengiriman calon transmigran serta frekuensi koordinasi dan kerjasama antar daerah di luar Jawa yang dilaksanakan memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah berikut ini :

2.1.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi secara makro dengan melihat besaran laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk digunakan pendekatan Pendapatan perkapita, semakin besar pendapatan perkapita dapat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.

Laju pertumbuhan ekonomi juga sering dijadikan asumsi dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.

Tabel 2.175
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
LPE dengan Migas (%)	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
LPE tanpa Migas (%)	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber: BPS Kab. Karawang
*) = angka sementara

2.1.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Bila dilihat berdasarkan sektor, bahwa terdapat 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor (terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang), yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan

pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Perusahaan. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Tabel 2.176
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2015

No	INDIKATOR	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	PDRB dengan Migas					
	• Harga Berlaku (juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
	• Harga Konstan (juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8

Sumber : BPS Kab. Karawang
* = angka sementara

Sedangkan Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas harga konstan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.177
PDRB per Kapita Tahun 2011-2015*

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
PDRB perkapita ADHB (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
PDRB perkapita ADHK (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63

Sumber : BPS Kab. Karawang PDRB * = angka sementara

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

3.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan instrumen paling utama dalam kebijakan fiskal daerah sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun ke depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

3.1.1 Rasio Kemandirian Daerah

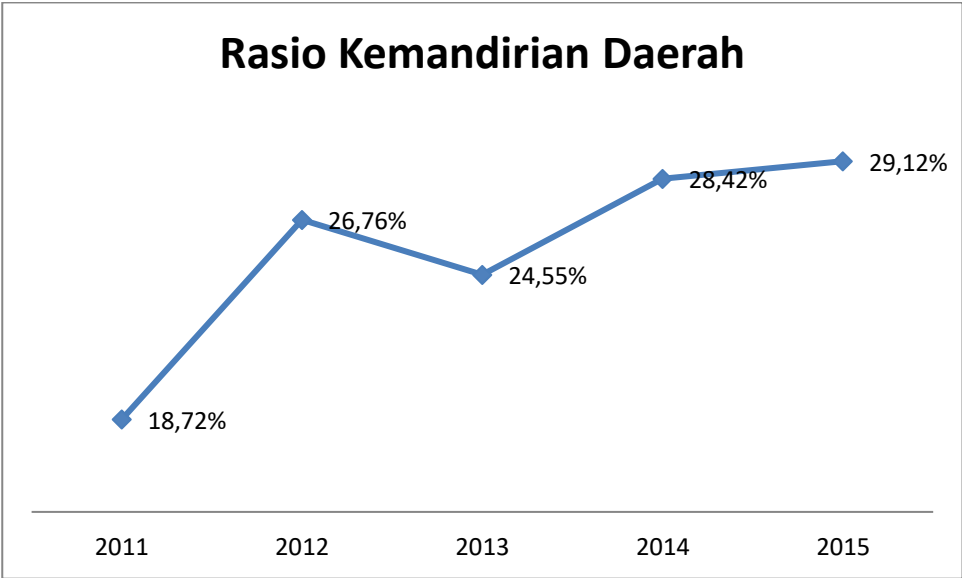
Tabel 3.1
Realisasi pendapatan daerah, rata-rata proporsi (%) dan rata-rata pertumbuhan (%)
Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2 pertumbuhan/th	Rata-rata Proporsi terhadap total pendapatan
1	PENDAPATAN	2,022,376.61	2,461,055.54	2,691,829.18	3,197,905.61	3,628,718.51	12.40%	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378,630.05	658,597.37	660,841.12	908,771.81	1,056,535.78	22.78%	25.51%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,201,893.81	1,413,869.85	1,528,879.27	1,580,220.36	1,623,936.96	6.20%	72.67%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	441,852.74	388,588.31	502,108.79	708,913.44	948,245.77	16.50%	29.57%

Berdasarkan data realisasi APBD, pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 3,6 Trilyun atau selama 5 tahun secara rata-rata tumbuh sebesar 12,40 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 2 Triliyun. Pertumbuhan pendapatan diperoleh dari PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,78 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 6,20 persen, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,50 persen. Sedangkan secara proporsi, dana perimbangan merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan rata-rata sebesar 72,67 persen, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 29,57 persen, sedangkan PAD rata-rata menyumbang 25,51 persen.

Gb. 3.1
Rasio Kemandirian Daerah



Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Rasio kemandirian Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 mengalami penurunan pada tahun 2013 kemudian sampai tahun 2015 terus meningkat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah

diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

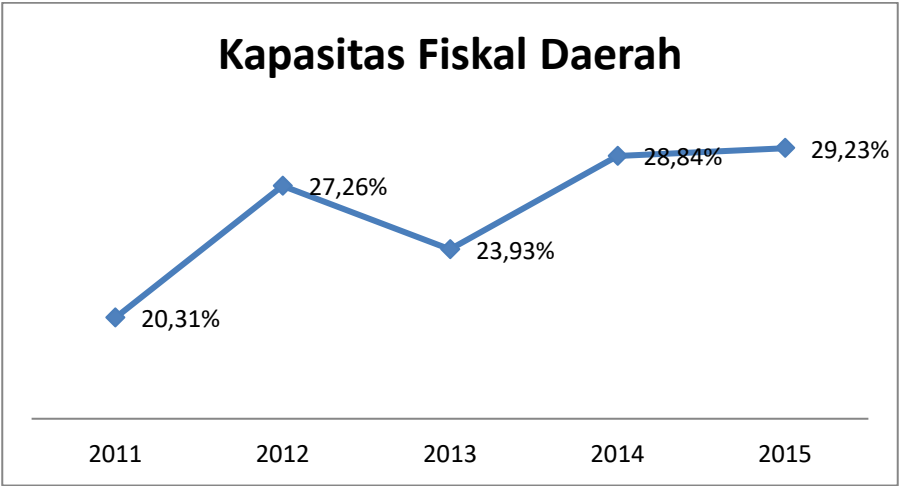
3.1.2 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Berdasarkan data tahun 2011 –2015 nilai rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Karawang sebesar 25,91% persen, atau masih relatif rendah. Rendahnya kapasitas fiskal terlihat dari masih rendahnya kontribusi PAD dimana nilai rata-rata *Tax effort* tahun 2015 (yang diukur berdasarkan rasio antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB non migas) dapat dinilai kemampuan membayar pajak masyarakat karawang relatif masih kecil (kurang dari 1 persen). Namun demikian dari data tersebut tampak kecenderungan rasio kemampuan fiskal Kabupaten Karawang yang terus naik, artinya kapasitas fiskal Kabupaten Karawang semakin meningkat.

Tabel 3.2
Realisasi pendapatan daerah dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378,630.05	658,597.37	660,841.12	908,771.81	1,056,535.78
2	BELANJA DAERAH	1,864,227.49	2,416,221.18	2,762,122.44	3,151,280.49	3,614,140.81
Kapasitas fiskal Daerah		20.31%	27.26%	23.93%	28.84%	29.23%

Gb. 3.2
Kapasitas Fiskal

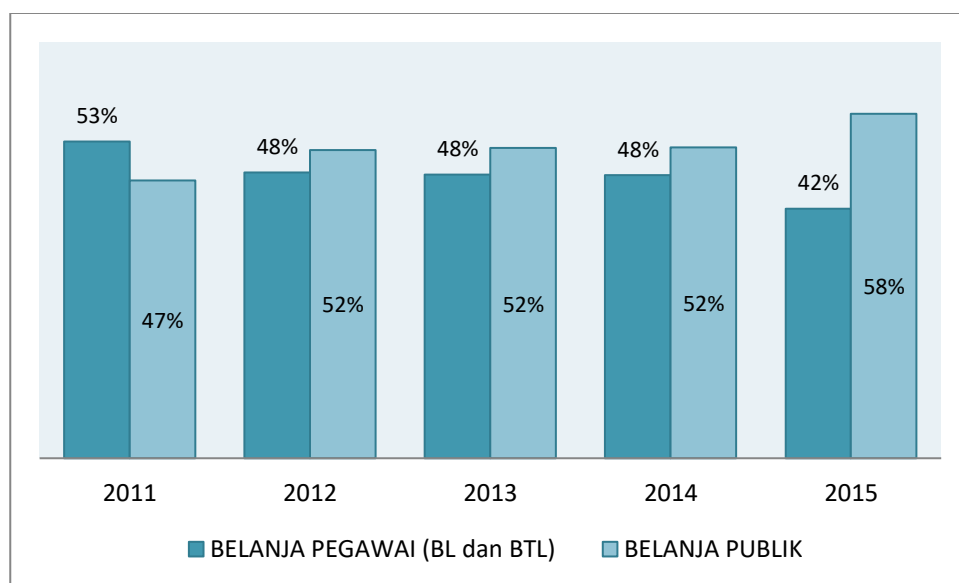


3.1.3 Rasio Aktifitas

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Publik dan Belanja Aparatur Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	BELANJA DAERAH	1,864,227.49	2,416,221.18	2,762,122.44	3,151,280.49	3,614,140.81
A	BELANJA PEGAWAI (BL dan BTL)	993,438.84	1,162,430.16	1,319,821.19	1,501,728.65	1,518,446.01
B	BELANJA PUBLIK	870,788.65	1,253,791.02	1,442,301.25	1,649,551.83	2,095,694.79

Gb. 3.3
Rasio Aktifitas



Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja publik secara optimal. Semakin rendah rasio belanja aparatur, semakin baik sehingga ruang gerak belanja daerah untuk pelayanan masyarakat akan semakin tinggi. Dalam tahun 2011-2015 tren belanja pegawai Kabupaten Karawang memperlihatkan penurunan.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp.3,6 Trilyun. Untuk alokasi belanja publik mencapai 58 persen, sedangkan belanja aparatur mencapai 42 persen. Besaran belanja gaji dan tunjangan pegawai dimaksud sebagian besar terserap untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan sebesar Rp. 998,22 Milyar atau sekitar 60 persen, sedangkan belanja gaji dan tunjangan aparatur pelayanan kesehatan sebesar Rp. 102,34 Milyar atau sekitar 10 persen. Belanja transfer kepada pemerintah desa juga mengalami trend peningkatan baik proporsi maupun pertumbuhan yang diarahkan untuk penguatan kemampuan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa. Untuk tahun 2015 belanja transfer kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk kegiatan fisik yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Adapun untuk belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 6 urusan konkuren pelayanan dasar, 19 urusan konkuren non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

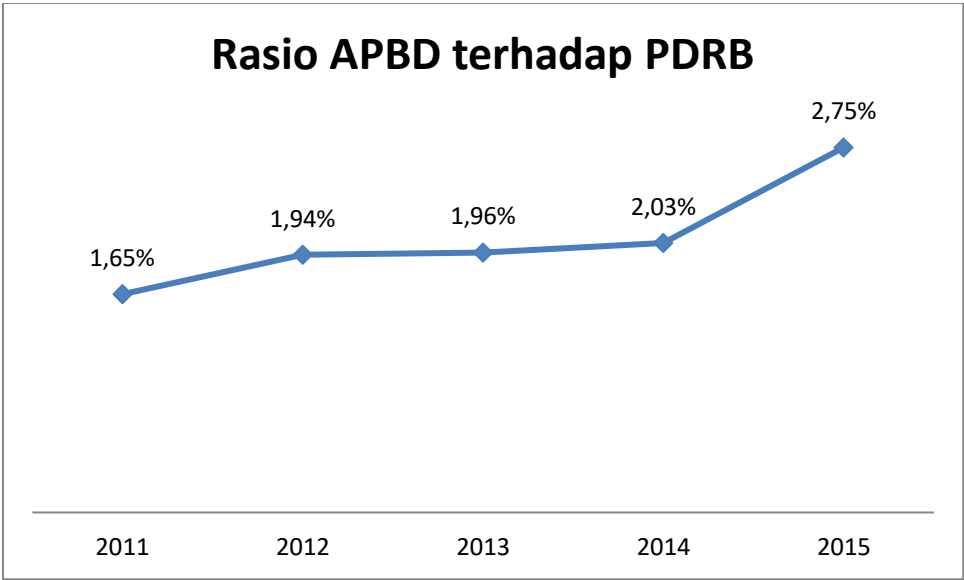
3.1.4 Rasio Pertumbuhan

APBD Tahun 2015 telah mencapai angka Rp 3,6 Triliun atau selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 14,16 persen dari angka tahun 2011 sebesar Rp. 1,86 Trilyun. Rasio APBD terhadap PDRB pada periode 2011-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat, hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan belanja pemerintah (*Government expenditure*) semakin meningkat dalam pembentukan PDRB. Adapun fungsi APBD lebih bersifat stimulus terhadap berjalannya kinerja perekonomian makro daerah.

Tabel 3.4
Perkembangan dan Pertumbuhan APBD, Rasio APBD terhadap PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011 – 2015

Tahun	APBD	Pertumbuhan	PDRB	Rasio APBD terhadap PDRB
2011	1.864.227,49		113.180.813,20	1,65%
2012	2.416.221,18	29,61%	124.276.539,30	1,94%
2013	2.762.122,44	14,32%	140.816.053,30	1,96%
2014	3.151.280,49	14,09%	155.068.137,90	2,03%
2015	3.614.140,81	14,69%	167.052.706,70	2,16%
Rata-Rata Pertumbuhan		14,16%		

Gb. 3.4
Rasio APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Berdasarkan data time series dengan menggunakan rumus eksponensial diperoleh rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 22.78 persen sehingga diproyeksi pada akhir tahun 2020 realisasi PAD mencapai angka Rp. 2,95 Trilyun . Performa APBD Kabupaten Karawang yang surplus pada tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 serta defisit pada tahun 2013 diperlihatkan pada Tabel 3.6. Pertumbuhan pendapatan sebesar 12.40 persen, sedangkan pertumbuhan belanja mencapai 14,16 persen, yang memunculkan defisit APBD dalam trend cenderung semakin besar. Walaupun defisit dimaksud masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang sebagian besar dikontribusi melalui penerimaan SilPa tahun sebelumnya, namun hal tersebut memperlihatkan pula lemahnya kinerja perencanaan sehingga berdampak pada kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Oleh sebab itu perlu adanya reorientasi dalam penyusunan formulasi APBD yang lebih mengedepankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghambat investasi, pengelolaan belanja yang efektif dan efisien

berbasis pada kinerja riil serta pengembangan skema alternatif pembiayaan.

Tabel 3.5
Perkembangan Neraca Daerah Kab. Karawang, 2011- 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Growth Rate (%)
1	ASET	3,051,376,203,979.01	3,914,542,384,460.18	4,781,862,394,846.03	6,901,408,635,551.43	4,773,238,661,930.78	9.36%
1.1	ASET LANCAR	540,896,434,586.99	541,632,625,815.77	800,394,415,389.27	2,185,226,093,396.28	938,110,917,051.16	11.64%
1.1.1	Kas	489,831,105,639.00	502,137,904,995.00	427,302,633,581.00		468,949,954,357.26	-0.87%
1.1.2	Piutang	8,365,390,085.05	11,023,204,569.01	324,703,852,977.82	324,121,565,410.80	202,256,950,301.49	89.10%
1.1.3	Piutang Lain - Lain	21,420,674,105.94	7,533,637,798.51	23,033,729,267.18	1,826,028,240,158.00	25,715,948,610.00	3.72%
1.1.4	Persediaan	21,279,264,757.00	20,937,878,453.25	25,354,199,563.27	35,076,287,827.48	240,914,872,775.41	62.47%
1.1.5	Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	273,191,007.00	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	59,292,379,673.29	61,352,799,304.40	64,595,532,523.83	69,038,066,912.08	88,028,337,289.05	8.22%
1.2.1	Investasi Non Permanen	5,186,990,478.12	3,865,008,732.47	6,370,843,253.99	4,076,065,588.35	4,339,124,139.35	-3.51%
1.2.2	Investasi Permanen	54,105,389,195.17	57,487,790,571.93	58,224,689,269.84	64,962,001,323.73	83,689,213,149.70	9.12%
1.3	ASET TETAP	2,408,753,128,585.38	3,285,906,597,485.66	3,889,019,479,915.58	4,317,924,512,118.70	3,587,247,242,455.70	8.29%
1.3.1	Tanah	271,151,814,006.00	523,307,554,864.00	515,055,228,905.00	664,345,235,318.00	963,232,960,599.00	9.12%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	339,384,922,826.29	482,627,040,187.49	571,102,202,030.49	545,329,696,200.15	695,243,808,144.97	15.42%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	664,657,581,183.90	787,936,046,977.90	1,003,930,412,482.90	1,014,281,189,558.18	1,307,247,260,383.83	14.49%
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,107,526,810,241.92	1,406,082,651,882.00	1,755,375,533,303.92	2,040,254,754,241.10	2,337,389,937,107.10	16.11%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	21,258,311,827.27	34,290,878,174.27	30,699,007,938.27	35,279,912,986.27	53,465,318,055.27	20.26%
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,773,688,500.00	51,662,425,400.00	12,857,095,255.00	18,433,723,815.00	43,235,757,026.00	55.38%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	
1.4	ASET LAINYA	42,434,261,133.35	25,650,361,854.35	27,852,967,017.35	329,219,963,124.37	159,852,165,134.87	30.38%
1.4.1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	144,612,500.00	134,662,500.00	162,467,500.00	202,747,500.00	83,038,333.00	-10.50%
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	3,392,871,088.00	4,357,098,088.00	12,463,386,539.00	13,418,025,039.00	5,825,362,686.50	11.42%
1.4.3	Aset Lain - lain	38,896,777,545.35	21,158,601,266.35	15,227,112,978.35	315,599,190,585.37	153,943,764,115.37	31.67%
2	KEWAJIBAN	96,893,556,310.51	64,421,084,003.42	38,719,671,326.82	40,069,464,780.50	45,203,304,923.92	-14.14%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	96,359,315,910.51	63,886,843,603.42	38,719,671,326.82	40,069,464,780.50	45,203,304,923.92	-14.05%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-		
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	0.00%
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	96,281,320,364.59	63,808,848,057.50	38,641,675,780.90	39,991,469,234.58	45,125,309,378.00	-14.06%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	534,240,400.00	534,240,400.00	-	-	-	-100.00%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	534,240,400.00	534,240,400.00	-	-		-100.00%

2.2.2	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-		
3	EKUITAS DANA	2,954,482,647,677.50	3,850,764,896,257.68	4,776,108,369,678.21	5,552,427,706,814.74	4,728,035,357,007.15	9.86%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	444,537,118,685.48	477,745,782,212.35	761,674,744,062.45	803,279,518,500.59		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	455,319,061,274.00	500,169,420,146.00	424,877,008,877.00	465,890,847,641.23	-	-
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	29,786,064,199.99	18,556,842,367.52	347,737,582,245.00	342,381,847,812.38	-	-
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	21,279,264,757.00	20,937,878,453.25	25,354,199,563.27	35,076,287,827.48	-	-
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(61,925,221,619.51)	(61,948,045,554.42)	(36,353,156,112.82)	(40,069,464,780.50)	-	-
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	77,950,074.00	29,686,800.00	59,109,490.00	-	-	-
3.1.6	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Cadangan Kas Dipemegang Kas	-	-	-	-	-	-
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	2,509,945,528,992.02	3,373,019,114,045.33	4,014,433,625,615.76	4,749,148,188,314.15		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	59,292,379,673.29	61,352,799,304.40	64,595,532,523.83	69,038,066,912.08	-	-
3.2.2	Diinvestasiakan Dalam Aset Tetap	2,408,753,128,585.38	3,285,906,597,486.58	3,889,019,479,915.58	4,317,924,512,118.70	-	-
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	42,434,261,133.35	26,293,957,654.35	60,818,613,176.35	362,185,609,283.37	-	-
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran	(534,240,400.00)	(534,240,400.00)	-	-	-	-
3.2.5	Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3,051,376,203,988.01	3,915,185,980,261.10	4,814,828,041,005.03	5,592,497,171,595.24	4,773,238,661,931.07	9.36%

Tabel 3.6
Perkembangan Performa APBD Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PENDAPATAN	2.022.376.611.223,00	2.461.055.535.050,00	2.691.829.177.177,00	3.197.905.607.797	3.628.718.508.162,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.630.051.818,00	658.597.372.181,00	660.841.119.615,00	908.771.810.213	1.056.535.776.486,00
1.1.1	Pajak Daerah	240.875.370.850,00	477.595.086.584,00	466.028.000.475,00	554.203.022.658	710.742.585.693,00
1.1.2	Retribusi Daerah	34.387.072.414,00	35.256.065.679,00	59.406.479.316,00	129.000.286.320	77.693.791.775,00
1.1.3	HslPeng. Kekayaan daerah yg dipisahkan	4.321.681.153,00	6.376.152.271,00	8.127.522.922,00	7.316.691.914,00	4.176.682.124,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.045.927.401,00	139.370.067.647,00	127.279.116.902,00	218.251.809.321	263.922.716.894,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.201.893.814.738,00	1.413.869.849.941,00	1.528.879.268.723,00	1.580.220.357.071,00	1.623.936.961.915,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	305.575.671.738,00	332.856.838.941,00	288.808.848.723,00	267.117.867.071,00	155.275.520.800,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.799.698.115,00

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	814.562.743.000,00	1.004.178.461.000,00	1.134.530.200.000,00	1.188.478.470.000,00	1.246.484.473.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.755.400.000,00	76.834.550.000,00	105.540.220.000,00	124.624.020.000,00	132.377.270.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	441.852.744.667,00	388.588.312.928,00	502.108.788.839,00	708.913.440.513,00	948.245.769.761,00
1.3.1	Hibah	6.000.000.000,00	1.129.337.000,00	1.737.111.000,00	6.378.469.599,00	9.560.382.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil dari Provinsi	131.269.421.165,00	147.494.101.489,00	211.112.199.734,00	293.321.154.086,00	334.848.811.776,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	261.615.332.400,00	164.132.014.000,00	247.349.527.000,00	364.789.871.000,00	480.323.533.000,00
1.3.5	Dana bantuan Keuangan dari Provinsi	42.511.823.540,00	74.262.735.830,00	40.607.188.000,00	43.072.337.300,00	123.296.254.035,00
1.3.7	Bagi hasil Retribusi dari Provinsi	456.167.562,00	1.570.124.609,00	1.302.763.105,00	1.351.608.528,00	216.788.950,00
	BELANJA DAERAH	1.864.227.494.596,00	2.416.221.176.178,00	2.762.122.438.446,00	3.151.280.485.664	3.614.140.806.167,97
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.306.413.158,00	1.157.954.991.916,00	1.330.995.377.452,00	1.580.456.509.138	1.735.411.572.147,00
5.1.1	Belanja Pegawai	827.140.350.649,00	962.293.081.316,00	1.081.059.712.806,00	1.260.728.269.838	1.331.258.598.590,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	28.742.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	72.983.112.109,00	89.547.007.000,00	113.105.500.000,00	130.914.160.300,00	148.021.196.200,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	99.006018.000,00	9.889.584.550,00	17.400.531.000,00	52.224.000.000,00	20.159.550.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Pem. Desa	31.929.662.400,00	33.480.254.050,00	43.024.174.644,00	45.165.375.000,00	235.972.227.357,00
5.1.7	Belanja Ban. Keuangan Kpd Pem. Desa	86.504.420.000,00	62.745.065.000,00	75.867.911.002,00	91.424.704.000,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	537.548.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	717.921.081.438,00	1.258.266.184.262,00	1.431.127.060.994,00	1.570.823.976.325,77	1.878.729.234.020,97
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	166.298.493.045,00	200.137.074.570,00	238.761.474.173,68	241.000.382.968,77	187.187.414.460,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.694.685.164,00	412.360.875.555,00	620.951.437.202,32	736.972.196.028,00	1.060.521.907.915,97
5.2.3	BELANJA MODAL	197.927.903.230,00	645.768.234.137,00	571.414.149.618,00	592.851.397.329,00	631.019.911.645,00
	SURPLUS/DEFISIT	158.149.116.627,00	44.834.358.872,00	(70.293.261.269,00)	46.625.122.133	14.577.701.994,03
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	307.670.275.913,00	455.335.061.274,00	500.170.270.146,00	424.908.508.877,00	465.890.847.641,23
3.1.1	SiLPA Sebelumnya	307.064.861.407,00	455.319.061.274,00	500.169.420.146,00	424.877.008.877,00	465.890.847.641,23
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	428.143.176,00	16.000.000,00	850.00,00	31.500.000,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	177.271.330,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.500.331.266,00	0,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	9.189.468.953,00	0,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.310.862.313,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	297.169.944.647,00	455.335.061.274,00	495.170.270.146,00	418.908.508.877,00	
	SILPA	455.319.061.274,00	500.169.420.146,00	424.877.008.877,00	465.533.631.010	468.468.549.635,26

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif

maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

3.2.1 Kerangka Kebijakan Pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :

- a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- c. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perbaikan sistem dan prosedur kerja.
- d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
- e. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya.
- f. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD.

- g. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari deviden BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - h. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan investasi.
 - i. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Konsep *revenue sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam :
- a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi.
 - b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP

Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

5. Kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan untuk Desa dengan komposisi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

3.2.2 Kerangka Kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1. Belanja yang diarahkan (Earmark) seperti DAK, DBH – DR, DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Untuk Program), Dana BOS, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Penyesuaian (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus.
2. Belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti ; belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (al. dana pendamping DAK, DDUB dan e- KTP) dan Belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor dll.

3. Belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan (belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja, belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji, Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan – DAK, Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa (PDRD, 10% dari PAD), bantuan Parpol, insentif pemungutan pajak dan belanja modal.
4. Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD;
5. Belanja lainnya (belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja subsidi).
6. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, pensiun dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan APBD yang pro rakyat maka besaran belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;
7. Alokasi anggaran belanja wajib pelayanan dasar pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:

- 1) Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) pada jenjang pendidikan dasar yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
 - 2) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/ tambah lokal, sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas dan belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana PMMS;
 - c. Mewujudkan Karawang Cerdas pada jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Terstandar
 - e. Pendidikan Guru Pembelajar (KKG, MGMP, KKKS, MKKPS)
 - f. Pembangunan Sarana Olahraga di tiap Kecamatan
 - g. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi
 - h. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - i. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
 - j. Peningkatan sarana belajar sesuai standar
 - k. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

- l. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru
 - m. Peningkatan kemampuan guru bidang studi
 - n. Peningkatan mutu peserta didik
 - o. Keberlanjutan program keaksaraan fungsional
 - p. Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SLTA atau sederajat
 - q. Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan
 - r. Fasilitasi Pemberian bea siswa secara penuh kepada masyarakat yang tidak mampu ke perguruan tinggi;
 - s. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C)
8. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
- a. Pembangunan RSUD di Rengasdengklok
 - b. Pembangunan Puskesmas Rawat inap
 - c. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - d. Puskesmas Akreditasi
 - e. Penyediaan dan peningkatan system pelayanan kesehatan
 - f. Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
 - g. Peningkatan Puskesmas PONED menjadi RSIA
 - h. Membuka system informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap PUSKESMAS
 - i. Penanggulangan gizi buruk
 - j. Pemberdayaan posyandu
 - k. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)

- l. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan
 - m. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes
 - n. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit
 - o. Pengembangan system surveillance
 - p. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan
 - q. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi
 - r. Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana
 - s. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi
 - t. Pembangunan Rumah Sakit Paru
 - u. Pembangunan Gedung-Gedung Penunjang layanan medik RUUD
 - v. Pembangunan Gedung RSUD kelas 3 RSUD
 - w. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
9. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan antara lain :
- a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW – Pusat Kegiatan Lokal/PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.

- d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
 - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
 - h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (*Public Space*) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan.
- b. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - c. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah.
10. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, Penanggulangan dan penanganan serta

pengurangan resiko bencana alam, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

11. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, antara lain :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);
12. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
13. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.
14. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking serta kekerasan terhadap anak*, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.

15. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pangan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan;
16. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa penataan asset tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang, serta penyediaan tanah untuk kegiatan-kegiatan pembangunan;
17. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup diarahkan:
 - a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);
 - c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
18. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan

dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa, pengembangan informasi dan teknologi berbasis aplikasi dan penataan kelembagaan desa.

20. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
21. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan diarahkan :
 - a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
22. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika diarahkan untuk Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
23. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk
24. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan

perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah

25. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah Meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, dan penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
26. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
27. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar persandian diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas persandian dalam mendukung informasi bagi pembangunan daerah.
28. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan diarahkan:
 - a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
 - d. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;

- e. Meningkatkan upaya implementasi kesaalehan social baik dikalangan aparatur tur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;
 - f. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifanlokal yang selaras dengan perkembangan zaman;
 - g. Mengembangkan jenis dan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
 - h. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;
 - i. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
 - j. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
29. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan diarahkan untuk pembinaan kelembagaan perpustakaan desa dan aktifitas budaya baca masyarakat, peningkatan manajemen perpustakaan daerah, peningkatan kualitas bahan bacaan perpustakaan daerah dan peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa
30. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar arsip diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dan pengembangan informasi dan teknologi pada pengelolaan arsip daerah.
31. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi

perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.

32. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah, Pengembangan destinasi wisata berbasis wisata alam, sejarah dan religi, Peningkatan manajemen pariwisata daerah dan Pembangunan kawasan wisata berbasis sumber daya lokal
33. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, mengembangkan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak
34. Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, pembangunan hutan kota, konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi tanaman hasil hutan.

35. Alokasi anggaran urusan pilihan energy dan sumber daya mineral diarahkan untuk Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Penyambungan listrik desa (lisodes) pada masyarakat kurang mampu
36. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.
37. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
38. Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
39. Alokasi anggaran unsur penunjang perencanaan diarahkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pengembangan sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu Perencanaan Pembangunan.

40. Alokasi anggaran unsur penunjang keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, mewujudkan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab melalui Peningkatan PAD, Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan asset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapatan Berbasis IT:

- PBB On Line
- BPHTB On Line
- Taping Box
- Barcode Reklame
- SP2D On

41. Alokasi anggaran unsur penunjang kepegawaian dan Diklat diarahkan untuk Pembentukan dan pembangunan *Assessment Center* Kab. Karawang untuk menunjang transparansi dan objektivitas penempatan dalam jabatan, Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN, Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan promosi

terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten, Pengembangan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (IT), Pengembangan implementasi sistem absensi yang akurat sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai online dan terintegrasi dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), Penyempurnaan mekanisme penghargaan bagi PNS teladan, Beasiswa bagi tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis SKPD.

42. Alokasi anggaran unsur penunjang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kajian strategis sebagai bahan referensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2016-2021 juga tetap mengalokasikan anggaran untuk :

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.
2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa, jo Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi anggaran bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tidak berupa dana transfer ke desa (menjadi pendapatan desa) tetapi dalam bentuk belanja langsung program infrastruktur perdesaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya .

3. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Surat Himbauan KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintahan daerah, karena itu agar kepala daerah memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah agar tidak terkesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.

5. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

3.2.3 Kerangka Kebijakan pembiayaan daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kerangka Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Untuk melihat kerangka kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 dapat di lihat pada lampiran RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021.

1.2.4 Kerangka Kebijakan pembiayaan non APBD melalui hibah pihak ketiga dan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Pembiayaan non APBD dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari tahun 2011 – 2015 pada prakteknya telah dilaksanakan oleh pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, namun belum tercatat/teradministrasikan dengan baik. Oleh karena itu untuk periode tahun 2016 – 2021 perlu ditingkatkan manajemen pengelolaan CSR.

1.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 -2021.

1.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Namun demikian PAD sebagai pendapatan daerah yang dapat dikendalikan (*controllable*) masih relatif sangat kecil memberikan kontribusi terhadap APBD. sebagaimana diketahui, porsi dana perimbangan dalam neraca APBD Kabupaten Karawang masih

menjadi sumber pendapatan utama dengan rata-rata proporsi terhadap APBD sebesar 53,57 persen. kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Karawang masih relatif rendah, dimana rata-rata besaran kontribusi yang disumbangkan oleh komponen PAD terhadap APBD hanya sebesar 25,51 persen.

Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan

mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

1) Kebijakan

Kondisi rendahnya kemampuan fiskal APBD Kabupaten Karawang berimplikasi terhadap ketergantungan yang masih sangat besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan porsi DAU dimaksud sebagian besar telah terserap untuk membiayai belanja pegawai. Berdasarkan data realisasi tahun 2015 memperlihatkan penurunan porsi DAU terhadap belanja pegawai yaitu 94,27persen menjadi 93,63persen. Kenaikan DAU yang diterima oleh Kabupaten Karawang lebih disebabkan karena peningkatan belanja pegawai sehingga relatif kecil dalam menambah porsi belanja pembangunan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkab PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanguungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu

harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan. Oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

2) Strategi

a) Strategi untuk meningkatkan PAD

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi
- (2) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah
- (3) Penyesuaian tarif pajak daerah
- (4) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset serta keuangan daerah;
- (5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan

- (1) Optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH, PPH Pasal 21 dan PPN)
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;

- (3) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar penghitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah
 - (1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - (2) Menjalin kerja sama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah;
 - (3) Menginisiasi dan mencari sumber pendapatan dari masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
 - (4) Meningkatkan CSR
- 3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah;
 - a) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (1) Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - (2) Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - (3) Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan

kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem dan prosedur kerja.

- (4) Perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
- (5) Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan mutunya.
- (6) Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan investasi.
- (7) Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

- b) Konsep *revenue Sharing* atas perimbangan keuangan pusat dan daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam:
- (1) Melakukan pemantauan , pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke pusat maupun propinsi;
 - (2) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
- c) Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan di daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. berdasarkan kebijakan DAK di daerah.
- d) Kebijakan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008 yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- e) Kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan untuk desa dengan komposisi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

1.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan

Kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan daerah diupayakan dengan mengatur pola belanja daerah yang proporsional optimal dan efisien untuk berbagai kebutuhan pembangunan yang sinergis antara pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten dalam

rangka mewujudkan nawa cita dan 10 *common goals* Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan secara umum dapat dicirikan melalui:

- a) Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021
- b) Mendanai agenda prioritas dan rencana aksi
- c) Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan
- d) Mendanai program janji Bupati dan wakil Bupati

1.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan muncul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar daripada penerimaan daerah sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Bila identifikasi dinamika eksternal, khususnya yang berjalan selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan di masa depan dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan memperhatikan serta menelaah visi, misi dan program-program kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN dengan juga memperhatikan berbagai sumber informasi dari lingkungan eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, yang merupakan rencana pembangunan tahap II dari RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025, cukup banyak kinerja yang harus ditingkatkan dengan berbagai permasalahan yang belum tuntas. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yang menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karawang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah :

4.1.1. Bidang Sosial Budaya

4.1.1.1. Pendidikan

1. Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang, dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah 7,09 tahun, berarti tidak tamat kelas 2 SMP. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, demikian juga dengan masih banyaknya lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA;

2. Ketersediaan Sekolah Menengah Kejuruan masih kurang, khususnya untuk jurusan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2015, jumlah SMK di Kabupaten Karawang adalah sebanyak 95 SMK dengan jumlah rombongan belajar pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 1.447;
3. Kualitas ruang kelas yang belum sepenuhnya ideal dengan total Ruang Kelas Milik (RKM) pada tahun 2015/2016 yang baik sebanyak 7.560 unit, rusak ringan sebanyak 3.122 unit dan yang rusak berat sebanyak 1.027 unit. Selama 5 tahun kedepan terdapat potensi kerusakan dari posisi baik ke rusak ringan dan rusak ringan ke rusak berat.

Jenjang Sekolah	Tahun		
	2015/2016		
	B	RR	RB
SD	4.233	1.286	587
SMP	1.583	421	122
SMA	265	431	47
SMK	516	511	134
MI	533	286	81
MTs	333	141	48
MA	97	46	8
	7.560	3.122	1027

4.1.1.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karawang sebesar 189 kematian bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015, angka tersebut masih jauh dari target *SDGs (Sustainable Development Goals)* Nasional, yaitu 23 kematian bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015. Sedangkan untuk kasus kematian ibu pada tahun 2014 masih tinggi, yaitu sebanyak 59 orang per 100.000 kelahiran.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan belum maksimal;
 - a. Jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang melalui Puskesmas/Pustu masih belum memadai karena masih jauh dari target layanan kesehatan ideal dimana Standar pelayanan kesehatan 1 Puskesmas untuk 10.000 penduduk, sementara di Kabupaten Karawang dengan jumlah penduduk 2.250.120 orang dengan jumlah

puskesmas sebanyak 50 unit, berarti 1 puskesmas melayani 45.002 penduduk, demikian juga dengan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) baru 13 Puskesmas DTP dari 50 Unit Puskesmas yang ada.

- b. Tenaga kesehatan masih terbatas. Jumlah tenaga kesehatan yang ada bila dibandingkan dengan jumlah penduduk masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- c. Tarif pelayanan kesehatan relatif masih mahal, dan tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau dan memanfaatkannya.

3. Pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS

- a. Angka perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2014 penderita AIDS di Kabupaten Karawang berjumlah 55 orang dengan penemuan HIV sebanyak 92 orang.
- b. Penderita TB di Kabupaten Karawang masih tinggi, yaitu sebanyak dengan penemuan BTA sebanyak 2.609 kasus.

4. Masih adanya status gizi buruk di Kabupaten Karawang

Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk dan balita gizi kurang di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Karawang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua balita terhadap pentingnya gizi balita di masa pertumbuhan juga menjadi pemicu terjadinya status gizi buruk. Pada tahun 2014 jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Karawang sebanyak 399 orang dan balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 7.496 orang.

4.1.1.3. Pemberdayaan Perempuan

1. Kesetaraan Gender

Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah di Kabupaten Karawang, dengan jumlah PEKKA pada tahun 2014 sebanyak 25 kelompok dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang serta jumlah PRIMA sebanyak 52 kelompok pada tahun 2014.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Jumlah trafficking perempuan dan anak tercatat 19 kasus pada tahun 2014;
- b. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tercatat 30 kasus pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya 11 kasus pada tahun 2013;
- c. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan KDRT.

4.1.1.4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, yaitu 4,61% pada tahun 2015. Salah satu penyebab peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang adalah disebabkan oleh pendatang dari wilayah lain (migrasi). Oleh karena Kabupaten Karawang memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang karena pembangunan di sektor industri.

2. Tingkat kesertaan ber-KB

Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur belum optimal. Pada tahun 2014 tercatat 383,896 peserta KB aktif atau 71,54% dari pasangan usia subur (PUS) yang berjumlah 536.642 orang.

3. Pengendalian usia perkawinan

4. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih rendah.

4.1.1.5. Sosial

1. Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Karawang menimbulkan kesenjangan sosial antara perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan di Kabupaten Karawang tahun 2014 adalah sebanyak 106.260 orang dan jumlah penduduk miskin perdesaan pada tahun 2014 sebanyak 600.728 orang.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, tunasusila dan penyandang AIDS/HIV yang termasuk dalam PMKS di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 mencapai 66,88% bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 50%.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS	2011	2012	2013	2014
1.	Balita terlantar	773	798	596	761
2.	Anak terlantar	5.764	5.849	5.447	6.125
3.	Anak nakal	599	664	599	660
4.	Wanita rawan sosial ekonomi	19.665	19.873	17.830	19.147
5.	Korban tindak kekerasan	141	233	25	391
6.	Lanjut usia terlantar	27.129	27.385	19.350	21.078
7.	Penyandang cacat	8.031	8.082	5.784	6.364
8.	Wanita Tuna Susila	278	299	158	158
9.	Pengemis	125	137	72	82
10.	Gelandangan	175	201	70	70
11.	Eks Napi	1.081	1.189	105	110
12.	Korban NAPZA	127	308	21	20

No.	Jenis PMKS	2011	2012	2013	2014
13.	Keluarga fakir miskin	177.489	186.079	155.212	176.747
14.	Keluarga dengan kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak	36.243	38.377	27.298	29.923
15.	Korban bencana alam	2.638	7.650	238.275	465.987
16.	Korban bencana sosial	58	5.695	275	122
17.	Pekerja migran bermasalah	64	70	243	372
18.	ODHA	213	238	327	221
19.	Anak jalanan	301	326	334	329

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

3. Penanggulangan Bencana

- Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas;
- Sumberdaya aparatur terlatih untuk penanggulangan bencana masih terbatas;
- Belum memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Aksi Daerah.

4.1.1.6. Tenaga Kerja

- Jumlah pencari kerja yang ditetapkan lebih sedikit dari jumlah pencari kerja;
- Banyaknya jumlah pencari kerja pendatang dari luar Kabupaten Karawang
- Masih rendahnya kualitas ketrampilan pencari kerja
- Rendahnya motivasi dan daya juang angkatan kerja dalam bidang wirausaha dan sector informal
- Investasi perusahaan yang lebih mengutamakan padat modal dan padat teknologi yang menuntut pekerja dengan kualifikasi tertentu
- Pengangguran dan Kesempatan Kerja serta Berusaha
 - Penduduk yang mencari kerja (penganggur) di Kabupaten Karawang masih tinggi, pada tahun 2014 penganggur berjumlah 108.597 orang atau 10,15% dari angkatan kerja.

Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
I.	Jumlah Penduduk	2.168.710	2.207.181	2.230.641	2.250.120
II.	Penduduk Usia Kerja	1.557.876	1.580.712	1.598.498	1.621.766
	Angkatan Kerja :	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
	- Penduduk yg bekerja	880.087	917.556	875.213	960.439
	- Penduduk yg mencari kerja (penganggur)	98.420	116.365	95.722	108.597
	- Persentase penganggur (%)	10	11,2	9,86	10.15
	Bukan Angkatan Kerja	579.369	546.791	627.563	552.730

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang

- b. Kesempatan kerja dan lapangan usaha tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, pada tahun 2014 jumlah lowongan kerja yang tersedia untuk 13.991 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 24.098 orang.

Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Angkatan kerja (org)	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
2.	Pencari kerja yang terdaftar (org)	73.443	28.443	21.228	24.098
3.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia (org)	55.165	8.567	4.886	13.991
4.	Tenaga kerja yang ditempatkan (org)	54.692	7.997	12.000	12.693

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

- c. Sistem informasi ketenagakerjaan masih terbatas.

7. Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Daya saing calon tenaga kerja di Kabupaten Karawang masih rendah, hal tersebut digambarkan dari data tingkat pendidikan pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2011-2014

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1.	TTSD	-	-	-	39
2.	SD	2.105	-	40	757
3.	SLTP	15.408	1	68	2.866
4.	SLTA	35.955	7.960	4.523	8.827
5.	D1/D2	117	-	17	-
6.	D3	584	27	97	25
7.	S1	523	9	11	59
	JUMLAH	54.692	7.997	4.756	12.573

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

- b. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja masih rendah, sert kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

4.1.1.7. Kebudayaan

- 1. Pengaruh globalisasi berdampak pada kultur budaya lokal.
- 2. Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal belum optimal.
- 3. Kurangnya regenerasi seniman terhadap budaya lokal yang menjadi warisan leluhur
- 4. Seni budaya lokal yang sudah populer belum memiliki hak cipta.
- 5. Kreativitas seniman masih kurang karena tidak didukung oleh pengetahuan/pendidikan formal.
- 6. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pertunjukan seni budaya.
- 7. Regulasi yang belum ada.
- 8. Masih rendahnya penyelenggaraan event seni budaya.
- 9. Belum ada tenaga ahli dibidang arkeologi, antropologi, museulogi dan filologi.
- 10. Nilai budaya daerah mulai luntur karena pengaruh budaya asing dan arus globalisasi.
- 11. Sarana prasarana pengembangan seni dan budaya masih perlu dioptimalkan untuk menampung kreatifitas seni dari para seniman di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2014 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 36 buah. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebut terdiri atas :
 - a. 30 buah aula kecamatan/lapangan kecamatan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kab. Karawang;
 - b. Lapang Karangpawitan;
 - c. Panggung Disbudpar;

- d. *Outdoor* GOR Panatayudha;
 - e. Gedung GOW Kabupaten Karawang;
 - f. Gedung Pentas Seni Kampung Budaya Gerbang Karawang;
 - g. Gedung Theatre Terbuka Kampung Budaya Gerbang Karawang.
12. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya masih perlu dioptimalkan, khususnya pada Kawasan Percandian Situs Batujaya yang terletak di Desa Segaran (Kecamatan Batujaya) dan Desa Telagajaya (Kecamatan Pakisjaya).

4.1.1.8. Pemuda dan Olahraga

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 20. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana dan prasarana keolahragaan.

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

**Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	50	60	62	65	65

Sumber: Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Karawang dan Disdikpora

Terdapat peningkatan jumlah binaan organisasi pemuda dari tahun 2011 sebanyak 50 organisasi pemuda dan 2012 sebanyak 60 organisasi pemuda hal ini bertambah 10 organisasi pemuda yang dibina begitupun tahun 2013 sebanyak 62 organisasi pemuda, terdapat pertambahan 2 organisasi pemuda dan peningkatan terjadi juga pada tahun 2014 sebanyak 65 hal ini jumlah organisasi pemuda bertambah 3 organisasi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah organisasi tidak mengalami penambahan jumlah binaan. Jumlah organisasi yang dibina oleh bidang pemuda dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada program peningkatan peran serta

kepemudaan tiap tahunnya meningkat, hal ini semakin sadarnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui wadah organisasi. Selain itu faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Karawang sebagai salah satu faktor tumbuhnya organisasi yang baru. Dengan semakin banyaknya organisasi tanpa diiringi dengan pengelolaan sumberdaya manusia di dalamnya akan menyebabkan rawan konflik, untuk itu pembinaan organisasi kepemudaan harus benar benar di lakukan secara menyeluruh baik di internal maupun eksternal organisasi yang dibina oleh pemerintah maupun pihak swasta.

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Tabel. 4.212 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Tahun 2011-2015						
No.	Cabang Olah Raga	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	18	20	28	35	35
2	Jumlah sarana olah raga yang dibangun	-	-	1	1	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

Pada program pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah cabang olah raga prestasi yang di bina, hal ini disebabkan pola pembinaan yang lebih baik dan perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga dengan menyelenggarakan even olah raga yang banyak melibatkan cabang-cabang olah raga. Namun demikian masih perlunya pembangunan sarana olah raga tempat mereka berlatih untuk meraih prestasi.

4.1.2. Bidang Ekonomi

4.1.2.1 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Kuantitas dan Kualitas Koperasi
 - a. Masih lemahnya tata kelola koperasi di Kabupaten Karawang.

- b. Tingkat aktifitas koperasi masih rendah, dari 1.538 koperasi pada tahun 2015 hanya 627 koperasi atau 40,76% yang masih aktif.
 - c. Permodalan dan Pembiayaan.
 - d. Sarana Pemasaran.
 - e. Kerjasama dengan Pelaku Usaha Lain.
 - f. Kompetensi SDM.
 - g. Manajemen.
 - h. Pengembangan Produk Unggulan Koperasi dan UMKM (One Village One Product.)
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- a. Lemahnya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM termasuk rendahnya jiwa entrepreneur, mutu produksi, pengelolaan keuangan dan diversifikasi produk.
 - b. Lemahnya aksesibilitas permodalan yang disebabkan oleh kurang produktifnya petugas bank, pelaku usaha dan aparat pembina dalam mensosialisasikan skema kredit yang ada pada sumber-sumber pembiayaan.
 - c. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek pemasaran dan terbatasnya jejaring pasar yang diketahui oleh pelaku UMKM.
 - d. Belum optimalnya keterlibatan serta peran swasta dalam pembinaan UMKM.

4.1.2.2 Penanaman Modal

- 1. Informasi serta promosi potensi ekonomi dan pelayanan perijinan melalui pemanfaatan teknologi informasi masih kurang optimal;
- 2. Masih belum efektif dan sesuai regulasi penanaman modal di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4.1.2.3 Statistik

- 1. Kelembagaan pengolahan data yang terintegrasi belum ada;
- 2. Sumberdaya manusia pengelola data statistik masih kurang;
- 3. Pengelolaan data masih lemah;
- 4. Kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya data masih rendah.

4.1.2.4 Pertanian

1. Kesejahteraan Petani

- a. Kepemilikan lahan oleh petani di Kabupaten Karawang sangat rendah, mereka mayoritas adalah petani penggarap dan buruh tani. Pendapatan Petani pada tahun 2015 di Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 27.275.000 (asumsi pendapatan petani padi sawah/ha/musim);

- b. Proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga produk pertanian masih lemah.

2. Ketahanan Pangan

- a. Diversifikasi konsumsi masyarakat terhadap pangan non beras belum membudaya;

3. Diversifikasi Pertanian dan Agribisnis

- a. Pemahaman dan perilaku petani untuk melakukan penganekaragaman komoditas pertanian masih kurang;
- b. Perubahan orientasi dari bertani secara konvensional menuju pola bertani yang modern dan berorientasi profit belum ada.

4. Lahan Pertanian

- a. Lahan pertanian di Kabupaten Karawang menunjukkan kecenderungan penurunan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Perkembangan Luas Tanam Padi Sawah di Kabupaten karawang adalah sebagai berikut :

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Luas (Ha)	98.612	98.615	98.346	97.835	97.577

- b. Peraturan mengenai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) belum ditetapkan.

5. SDM Pertanian

- a. Kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan, pada tahun 2015 tenaga teknis profesional pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) berjumlah 87 orang. Tenaga profesional perikanan dan kelautan pada tahun 2015 sebanyak 13 orang sedangkan untuk Tenaga Teknis Profesional Kehutanan berjumlah 7 orang pada tahun 2015.

4.1.2.5 Kehutanan

Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah seluas 7.173,9 Ha, tersebar di 14 kecamatan, 9 diantaranya terdapat di kecamatan wilayah pantai.

4.1.2.6 Perikanan

1. Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar maupun perikanan tangkap. Pada Tahun 2015 produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Karawang sebesar 42.483,15 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 8.591,99 ton;
2. Terbatasnya investasi dalam pengembangan komoditas perikanan dan kelautan;

3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana penangkapan ikan;
4. Belum tersedianya industri pengolahan hasil-hasil perikanan;
5. Belum optimalnya tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai ;
6. Masih rendahnya penerapan Teknologi Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan;
7. Masih rendahnya SDM, baik budidaya maupun perikanan tangkap;
8. Peran pengawasan oleh kelompok masyarakat pengawas (Posmaswas) masih lemah karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4.1.2.7 Pariwisata

1. Infrastruktur dan Roda transportasi menuju objek dan daya tarik wisata masih belum memadai dan terkoneksi.
2. Prasarana dan sarana wisata di objek wisata masih belum standar, terutama pada objek dan daya tarik wisata yang berada di Kawasan Wisata.
3. Keberadaan objek dan daya tarik wisata di setiap destinasi belum terintegrasi ke dalam pola perjalanan pariwisata Jawa Barat.
4. Pendekatan pengembangan pariwisata masih belum berorientasi secara tegas kedalam pola pengembangan industri pariwisata secara berkelanjutan.
5. Kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan pariwisata terhadap upaya peningkatan kualitas pengalaman wisata masih belum merata dan memadai.
6. Upaya pemasaran dan promosi destinasi wisata masih belum terintegrasi, terarah, dan terukur sesuai dengan tujuan, sasaran dan target pengembangan pariwisata yg telah ditetapkan.
7. Ketersedian pelayanan informasi wisata, terutama di stasiun kereta, terminal, hotel dan simpul-simpul kawasan wisata utama belum ada.
8. Kondisi pengelolaan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan berwisata masih minim dan belum merata di setiap destinasi wisata.
9. Kemampuan dan profesionalitas SDM di sektor pariwisata masih terbatas dan belum merata, terutama untuk pekerja yang berada pada posisi penyedia pelayanan.
10. Pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lokal di Kabupaten Karawang untuk menarik wisatawan belum optimal;
11. Promosi kegiatan kepariwisataan belum optimal;
12. Belum optimalnya jalinan mitra usaha kepariwisataan baik dengan pengusaha lokal maupun investor luar;

13. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata belum optimal;
14. Belum adanya paket wisata yang menjual daya tarik obyek wisata di Kabupaten Karawang;
15. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata masih kurang.

4.1.2.8 Perindustrian

1. Pengembangan industri kecil yang memiliki kekhasan/keunikan lokal belum optimal;
2. Pusat promosi produk industri belum optimal dimanfaatkan;
3. Jejaring usaha yang kuat antar pelaku industri kecil belum optimal;
4. Dukungan infrastruktur ke sentra produksi industri kecil masih lemah.

4.1.2.9 Perdagangan

1. Pengelolaan pasar yang belum profesional;
2. Sarana pergudangan terpadu belum tersedia;
3. Perlindungan konsumen masih lemah;
4. Sebaran pusat fasilitas perdagangan belum merata.

4.1.3. Bidang Infrastruktur

4.1.3.1 Pekerjaan Umum

1. Infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
2. Proporsi jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi yang rusak masih tinggi;
3. Pemanfaatan saluran irigasi untuk pertanian tidak optimal, sebagai akibat dari alih fungsi lahan;
4. Partisipasi masyarakat (P3A Mitra Cai) dalam tata kelola irigasi masih kurang.

4.1.3.2 Perumahan Rakyat

1. Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang masih cukup banyak, khususnya di sebagian wilayah pesisir utara Karawang dan sebagian wilayah selatan.
2. Masih banyak rumah yang tidak layak huni dibangun di atas tanah bukan hak milik, seperti Kehutanan, PJKa, Tanah Pengairan maupun Rumija (Ruang Milik Jalan);
3. Belum terintegrasinya penataan sarana dan prasarana lingkungan sanitasi, air bersih dan drainase baik di perkotaan dan perdesaan;
4. Banyak fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah daerah dalam kondisi layak sehingga apabila diserahkan membebani pemerintah daerah;
5. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penataan areal pemakaman di Kabupaten Karawang;

6. Tingkat occupancy/penghunian Rumah Sehat masih rendah;
7. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
8. Konsentrasi penduduk tidak merata.

4.1.3.3 Penataan Ruang

1. Tingginya Alih Fungsi Lahan Produktif;
2. Tingginya pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;
3. Kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan sarana prasarana;
4. Kecenderungan pengembangan perumahan suburbanisasi, urban sprawl;
5. Produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional turunan RTRW masih dalam proses penetapan;
6. Pihak pengembang tidak melaporkan secara berkala (tiga bulan sekali) mengenai kegiatan investasi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang sehingga sulit dilakukan pengawasan;
7. Persoalan RTH (Ruang Terbuka Hijau), KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan) yang belum dipenuhi oleh pengembang;
8. Kegiatan penyusunan NSPK yang bersifat spasial membutuhkan anggaran yang besar;
9. Sosialisasi kebijakan penataan ruang belum menyentuh secara merata terhadap seluruh stakeholder;
10. Peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang belum optimal;
11. Perubahan kebijakan strategis nasional yang berdampak terhadap perubahan kebijakan penataan ruang daerah;
12. Mekanisme pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang belum terstruktur;
13. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan penataan ruang.

4.1.3.4 Perhubungan

1. Penyediaan Infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Diantaranya berupa kemantapan jaringan dan kualitas jalan dan dukungan perlengkapan jalan (Trotoar, Marka Jalan, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat Penerangan Jalan, Alat dan Pengamanan Jalan, Lajur Sepeda, Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki, Halte dan Fasilitas Khusus bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut.
2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung;
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

4. Adanya Perubahan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Belum tersedianya terminal angkutan penumpang umum yang dapat mengintegrasikan moda angkutan, sehingga berdampak pada adanya terminal bayangan di beberapa titik;
6. Belum tersedianya terminal angkutan barang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan dan kerawanan kecelakaan dalam berlalu lintas;
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dalam mendukung terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas;
9. Manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal.

4.1.3.5 Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Sampah :

- a. Masih rendahnya area pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang;
- b. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menerapkan 3 R masih rendah;
- c. Tempat penampungan sampah sementara masih kurang;
- d. Kondisi sarana pengangkut sampah sudah kurang baik, yang menyebabkan lindi yang sering menetes dan terjadi *over load* sampah;
- e. Keterbatasan armada pengangkut sampah.
- f. TPA Jalupang masih menggunakan sistem *open dumping* padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan TPA harus menggunakan *sanitary landfill*;
- g. Kondisi eksisting TPA Jalupang yang sudah penuh, bahkan cenderung *over load*.

2. Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan

- a. Menurunnya fungsi tanah akibat pencemaran (tanah menjadi keras dan tidak subur) yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertanian, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia;
- b. Menurunnya fungsi air karena masuknya limbah ke dalam air dan menyebabkan timbulnya masalah rawan air bersih.

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- a. Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH di Kabupaten Karawang;
- b. Belum optimalnya pemeliharaan RTH di Kabupaten Karawang;

- c. Minimnya fasilitas RTH khususnya bagi kelompok usia tertentu, seperti lapangan olahraga, taman bermain anak, taman lansia, taman khusus bagi penyandang cacat.
- d. Dalam penataan landscape kota, etika dan estetika, khususnya penempatan iklan/papan reklame belum ditata menurut kaidah penataan ruang yang sesuai.

4. Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut

- a. Kerusakan hutan mangrove, abrasi pantai, akresi pantai, pencemaran air laut, pembuangan berbagai jenis limbah baik yang berasal dari kegiatan di laut maupun limbah dari darat, penumpukan sampah di pantai, pendangkalan muara sungai dan pengambilan pasir darat telah merusak lingkungan laut dan pesisir di Kabupaten Karawang.
- b. Kabupaten Karawang belum memiliki sarana pengolahan limbah di wilayah pesisir, sehingga lingkungan pesisir di wilayah Kabupaten Karawang terlihat kotor oleh limbah, baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun *home industry*, serta dengan sanitasi lingkungan yang buruk.

5. Semakin menurunnya kualitas udara di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah perkotaan akibat emisi karbon kendaraan bermotor dan emisi karbon pabrik dan aktivitas lainnya.

4.1.3.6 Komunikasi dan Informatika

- 1. Penerapan *e-government* di Kabupaten Karawang belum optimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- 2. Sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi masih terbatas.

4.1.3.7 Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1. Rumah Tangga kurang mampu yang belum mendapat sambungan listrik masih cukup banyak, sampai dengan tahun 2015 baru 29.476 sambungan listrik yang terpasang dari data jumlah keluarga miskin sebanyak 40.907 keluarga, sehingga masih tersisa 11.431 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik;
- 2. Perlu dioptimalkan pengawasan dan penertiban penggunaan air bawah tanah.

4.1.4. Bidang Pemerintahan

4.1.4.1 Perencanaan Pembangunan

- 1. Ketersediaan dan konsistensi data untuk perencanaan pembangunan
 - a. Validitas dan akurasi data untuk perencanaan pembangunan masih rendah;
 - b. Kesepahaman akan pentingnya data belum ada;
 - c. Institusi/bidang yang spesifik mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data belum ada;
 - d. Penyediaan data berbasis teknologi informasi belum optimal.

2. Konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran
 - a. Inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran;
 - b. Kemampuan anggaran terbatas bila dibandingkan dengan usulan kebutuhan;
 - c. Belum bersinerginya pendekatan teknokratik, partisipatif, *top down*, *bottom up* dengan pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan;
 - d. Ego sektoral dalam perencanaan pembangunan masih tinggi.

4.1.4.2 Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib administrasi kependudukan masih lemah;
2. Pemanfaatan *database* kependudukan belum optimal;
3. Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal.

4.1.4.3 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan hukum, khususnya peraturan daerah;
2. Luasnya daerah Kabupaten Karawang tidak sebanding dengan rasio petugas keamanan dan ketertiban, sehingga penanganan masalah-masalah *trantibum* banyak yang tidak tertangani;
3. Potensi gesekan kelompok sosial masih besar;
4. Fungsi partai politik belum efektif sebagai wadah pendidikan politik, pengelola konflik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat dan komunikasi politik;
5. Penertiban dan pembinaan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih belum memadai.

4.1.4.4 Pemerintahan Umum

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan
 - a. Sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pemerintahan belum memadai;
 - b. Tata letak sarana dan prasarana pemerintahan belum memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, termasuk bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung pemerintahan belum optimal.
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - a. kontribusi pendapatan asli daerah terhadap seluruh pendapatan daerah masih relatif kecil yaitu 28,41% sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana pusat dan provinsi masih tinggi;

- b. Inovasi dan penggalan sumber pendapatan daerah baru belum optimal;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah belum dilakukan secara maksimal.
- 3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah belum didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang handal;
 - b. Sistem manajemen aset daerah Kabupaten Karawang belum didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten.
 - c. Masih banyak aset-aset daerah tidak bergerak (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah yang belum memiliki kelengkapan dokumen hak-hak keperdataan lahan.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan asset-aset daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
- 4. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif;
 - b. Sumberdaya manusia penegak Perda (PPNS) terbatas;
 - c. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi atas perda masih rendah;
 - d. Sosialisasi atas Perda masih kurang.
- 5. Pelayanan Perijinan
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara dan manfaat perijinan;
 - b. Implementasi mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan belum optimal;
 - c. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pelayanan perijinan masih terbatas;
 - d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan perijinan belum optimal.
- 6. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Kelembagaan yang efektif dan efisien serta ramping struktur dan kaya fungsi belum terwujud;
 - b. Belum semua lembaga pemerintah memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Nilai akuntabilitas dan manajemen kinerja pemerintah Kabupaten Karawang masih rendah, hal tersebut terlihat dari hasil penilaian BPKP terhadap LAKIP Kabupaten Karawang serta berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap LAKIP OPD;
 - b. Pemahaman terhadap tata cara penyusunan LAKIP masih rendah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Standar Pelayanan belum berkembang;
 - b. Pelaksanaan SPM masih belum optimal;
 - c. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang memberikan pelayanan publik belum memadai;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

4.1.4.5 Kepegawaian

1. Proses rekrutmen ASN di daerah masih belum optimal;
2. Sistem informasi kepegawaian belum diterapkan secara komprehensif;
3. Pembinaan kepegawaian berupa sanksi dan penghargaan belum sepenuhnya dilaksanakan;
4. Pola karir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara konsisten;
5. Kompetensi sumberdaya aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan penempatannya.

4.1.4.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Sumberdaya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat belum optimal;
2. Program pemberdayaan masyarakat masih ada yang kurang tepat sasaran;
3. Akuntabilitas dan mekanisme pelaporan masih lemah;
4. Partisipasi masyarakat belum optimal dan terbatas pada kelompok tertentu.

4.1.4.7 Transmigrasi

1. Target penempatan calon transmigran masih tergantung pada pemerintah provinsi, sehingga tidak sesuai dengan minat calon transmigran;
2. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih rendah.

4.1.4.8 Kearsipan

1. Manajemen kearsipan belum sistematis;
2. Sumberdaya pengelola dan sarana pendukung kearsipan masih kurang;
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip masih rendah.

4.1.4.9 Perpustakaan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan baik pada ruang layanan umum, layanan anak maupun perpustakaan keliling, khususnya armada motor pintar;
2. Pelayanan perpustakaan belum berbasis teknologi informasi;
3. Kompetensi sumberdaya aparatur pengelola perpustakaan masih belum memadai;

4. Keberadaan perpustakaan daerah belum dikenal luas oleh masyarakat;
5. Belum adanya kerjasama yang sinergis antara perpustakaan dengan lembaga lain dalam hal penambahan koleksi buku bacaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu dirumuskan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) sebagai berikut :

4.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Kabupaten Karawang yang merupakan potensi dalam pembangunan antara lain :

1. Kondisi keamanan yang kondusif;
2. Letak geografis yang strategis;
3. Memiliki potensi basis dalam perekonomian;
4. Memiliki potensi sumberdaya alam;
5. Memiliki faktor produksi unggulan (tenaga kerja, SDA);
6. Tersedianya lahan budidaya (pertanian dan industri);
7. Di dominasi penduduk usia produktif;
8. Pertumbuhan ekonomi yang baik;
9. Tersedianya sarana dan prasarana publik;
10. Tersedianya kelengkapan jenjang pendidikan hingga Perguruan Tinggi;
11. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan;
12. Tersedianya perangkat aparatur pemerintah daerah yang berkompetensi;
13. Tersedianya dokumen perencanaan.

4.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan Kabupaten Karawang yang merupakan kendala dalam pembangunan, antara lain :

1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 sebesar 10,15%;
2. Persentase kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebesar 29,23% ;

3. Persentase pengangguran di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebesar 11,88% dari jumlah angkatan kerja;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dipemerintahan dan UMKM;
5. Belum optimalnya sosialisasi terkait mendapatkan akses modal usaha bagi masyarakat;
6. Terdapat kesenjangan pembangunan antar kawasan kota dengan wilayah pedesaan;
7. Belum tersedianya sarana/moda transportasi publik yang memadai;
8. Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni;
9. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan menurunnya kualitas lingkungan hidup;
10. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi;
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas pelayanan publik;
12. Belum tuntasnya pelaksanaan program nasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
13. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM);
14. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
15. Masih lemahnya penerapan Peraturan Daerah;
16. Pengembangan kewirausahaan di masyarakat.

4.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Secara eksternal, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Potensi ekonomi daerah sebagai daerah industri dapat mendukung perekonomian daerah;
2. Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. Adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar domestik dan internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku ekonomi lokal;
4. Tersedianya lembaga dan aparatur yang dapat menjaga keberlangsungan stabilitas keamanan;
5. Jarak antara desa terjauh dengan ibu kota kabupaten relatif dekat;
6. Dilalui oleh jalan nasional dan jalur kereta api lintas pulau Jawa;
7. Penerapan Standar Mutu (ISO).

4.2.4 Ancaman (*Threath*)

Ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Karawang antara lain adalah :

1. Masuk dalam kategori rawan bencana banjir, longsor, dan puting beliung;
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
4. Persaingan sumberdaya manusia secara global;
5. Kompetensi lulusan pendidikan tidak memenuhi kebutuhan tuntutan dunia kerja;
6. Perubahan iklim global (climate change);
7. Infiltrasi budaya asing yang negatif;
8. Migrasi dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi;
9. Permasalahan UMK dan demo buruh;
10. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil analisis SWOT, didapatkan isu-isu strategis Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

A. Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1. Jumlah Pertambahan Penduduk dan Dampak Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Permukiman;
2. Kemantapan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pengairan Yang Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
3. Infrastruktur jaringan irigasi banyak yang rusak: panjang sal primer 78,97 km (rusak 49,99 %), panjang sal sekunder 451,41 km (rusak 29,91 %), panjang sal tertier 1.791 km (rusak 34 %);
4. Panjang jalan usaha tani 919 km (rusak 46 %);
5. Penurunan Kapasitas Saluran Pembuang dan Muara Sebagai Akibat Sedimentasi;
6. Kondisi Perkembangan Historis Geografis (Daratan, Sungai, Saluran Pembuang, Pesawahan dan Garis Pantai);
7. Dampak Perubahan Tata Ruang Internal Maupun Eksternal (macet, crowded dan banjir);
8. Karawang Bagian Dari Pengembangan BODEBEKARPUR Sebagai *Twin Metropolitan* (Jakarta);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat Jakarta dan Bandung ; Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Untuk Bandara Internasional Karawang) dan Rencana Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II;
10. Belum memadainya Pranata Bidang Penataan Ruang khususnya Rencana Rinci Tata Ruang;

11. Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
12. Menurunnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan minimnya Ruang Terbuka Hijau Publik;
13. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
14. Belum optimalnya penanganan persampahan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
15. Belum tertanganinya kawasan kumuh perkotaan;
16. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang;
17. Penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Diantaranya berupa kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), saluran drainase, infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur irigasi;
18. Penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RTRW dan peraturan ketataruangan;
19. Alih fungsi lahan sawah (selama 25 tahun terakhir luas 3.550 ha) rata-rata pertahun 142 Ha
20. Tata kelola lingkungan hidup yang baik sehingga kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan.

B. Bidang Sosial Budaya

1. Pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Pengaruh globalisasi berdampak pada kultur budaya lokal.
3. Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal belum optimal.
4. Kurangnya regenerasi seniman terhadap budaya lokal yang menjadi warisan leluhur.
5. Seni budaya lokal yang sudah populer belum memiliki hak cipta.
6. Kreativitas seniman masih kurang karena tidak didukung oleh pengetahuan/pendidikan formal.

C. Bidang Ekonomi

1. Pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah yang mewakili keunikan lokal dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas;
2. Pemantapan ketahanan pangan daerah;
3. Pengelolaan potensi destinasi pariwisata secara baik dan profesional;

4. Infrastruktur dan Roda transportasi menuju objek dan daya tarik wisata masih belum memadai dan terkoneksi.
5. Prasarana dan sarana wisata di objek wisata masih belum standar, terutama pada objek dan daya tarik wisata yang berada di Kawasan Wisata
6. Keberadaan objek dan daya tarik wisata di setiap destinasi belum terintegrasi ke dalam pola perjalanan pariwisata Jawa Barat.
7. Pendekatan pengembangan pariwisata masih belum berorientasi secara tegas kedalam pola pengembangan industri pariwisata secara berkelanjutan.
8. Kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan pariwisata terhadap upaya peningkatan kualitas pengalaman wisata masih belum merata dan memadai.
9. Upaya pemasaran dan promosi destinasi wisata masih belum terintegrasi, terarah, dan terukur sesuai dengan tujuan, sasaran dan target pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan.
10. Ketersediaan pelayanan informasi wisata, terutama di Bandara, stasiun kereta dan terminal dan simpul-simpul kawasan wisata utama belum ada.
11. Kondisi pengelolaan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan berwisata masih minim dan belum merata di setiap destinasi wisata.
12. Kemampuan dan profesionalitas SDM di sektor pariwisata masih terbatas dan belum merata, terutama untuk pekerja yang berada pada posisi penyedia pelayanan.
13. Kandungan C organik tanah sawah di kabupaten Karawang rendah (di bawah 1 %) artinya lahan sawah dalam keadaan sakit.
14. Sering terjadi bencana alam (banjir/kekeringan)
 - Tahun 2013 luas puso = 8.561 ha (banjir)
 - Tahun 2014 luas puso = 25.630 ha (banjir)
 - Tahun 2015 luas puso = 1.782 ha (kekeringan)
15. Tingginya serangan hama penyakit (opt)
 - Tahun 2013 serangan opt = 19.089 ha
 - Tahun 2014 serangan opt = 14.191 ha
 - Tahun 2015 serangan opt = 8.718 ha
16. Kehilangan hasil (losses) pasca panen padi sebesar 12,62 %
17. Kabupaten Karawang masih kekurangan daging sebanyak 10.130 ton (perhitungan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah populasi hewan yang ada)
18. Lahan kritis seluas 7.483 ha (darat 2,078 ha, pantai 5,405 ha).

19. Jumlah petani = 281.405 kk, terdiri dari:
 - Petani pemilik = 43.362 (15 %)
 - Petani pemilik penggarap = 80.905 (29 %)
 - Petani penggarap = 47.754 (17 %)
 - Buruh tani = 109.564 (39 %)
20. Posisi tawar hasil produk petani masih rendah.

D. Bidang Pemerintahan

1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang profesional berbasiskan *good governance* dan *clean governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, ***Kajian Lingkungan Hidup Strategis*** dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda, ***menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan mengantisipasi program dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.*** Selain itu, RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-

rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

5.1. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan,

serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama (shared vision). Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2016-2021 adalah **“KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR”**

Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut ;

1. Mandiri

Berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal

2. Maju

Berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap

3. Adil

Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah

4. Makmur

Berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

5.2. Misi

Misi menjelaskan maksud (purpose) organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berperilaku (behave) ketika misinya tercapai.”

Dalam menuliskan misi, Merson dan Qualls (1979;25) dalam Junaedi), menyarankan bahwa: “Dalam kerangka perundangan yang berlaku, suatu lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum. Pernyataan misi sebaiknya disusun dalam kata-kata yang memungkinkan fleksibilitas yang maksimum dalam

menanggapi perubahan situasi. Misi sebaiknya dinyatakan secara singkat, tidak lebih dari beberapa alinea, dan sebaiknya ditulis dengan bahasa yang tidak teknis dan mudah dimengerti.

Misi adalah kondisi ideal yang setingkat di bawah visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya. Dalam kondisi ideal, perencanaan wilayah sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah, karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. akan tetapi dalam praktiknya, cukup banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, tetapi berdasarkan undang-undang harus menyusun rencana pembangunan wilayahnya karena terkait dengan penyusunan anggaran. Seandainya tata ruang itu sudah ada dan masih berlaku, penyusunan rencana pembangunan daerah haruslah mengacu pada rencana tata ruang tersebut.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan arah pembangunan ke 3 (tiga) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

1. **Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa** ; melalui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat) dan pemerintahan yang baik (yaitu ; keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum,

demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat) serta reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;

2. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing**; melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestic berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha (membuka peluang investasi dibidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan), membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
3. **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum** ; melalui upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam rangka meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, memperkuat

kerukunan umat beragama untuk mewujudkan stabilitas lokal sebagai kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan menegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta melalui upaya optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi LINMAS , agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

4. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari ; *melalui upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan*** dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ***melalui antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.***
5. **Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa** ; melalui implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa, optimalisasi sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 sebagai arah pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 dijadikan agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016-2021 dengan rincian sebagai berikut ;

TUJUAN	SASARAN
Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

	2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK 3. Peningkatan profesionalisme aparaturnya Pemerintah Daerah 4. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas. 6. Peningkatan PAD
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan 2. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan 3. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan; 4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR; 5. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; 6. Meningkatkan kualitas usaha industri; 7. Meningkatkan pola distribusi barang dan Pengamanan Perdagangan serta Perlindungan Konsumen; 8. Meningkatkan kualitas Pasar Tradisional; 9. Meningkatkan pengembangan ekspor dan kerjasama perdagangan internasional; 10. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan; 11. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 12. Meningkatkan SDM Aparatur dan Pelayanan Perkantoran.	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan rata-rata lama sekolah 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 4. Meningkatnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 6. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi dan gender 7. Meningkatnya pengendalian penyakit 8. Menurunnya angka kematian ibu dan anak 9. Meningkatnya jumlah , jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan 10. Meningkatnya sinergitas program kesehatan antara Provinsi dan Kabupaten 11. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan 12. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparaturnya tenaga kesehatan 13. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi 14. Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja; 15. Penyediaan informasi ketenagakerjaan; 16. Pengembangan kebijakan, pembinaan dan 17. pengawasan regulasi ketenagakerjaan.

	18. Meningkatkan kesempatan kerja baik formal maupun non formal 19. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat termasuk petani dan nelayan 20. Peningkatan pelayanan investasi 21. Meningkatkan peran serta swasta melalui CSR 22. Meningkatkan upaya pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan serta pemuda dan olahraga 23. Peningkatan pelestarian nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal untuk mendukung sektor pariwisata 24. Penataan Sentra IKM Unggulan (<i>One Village One Product</i>) Sektor Industri 25. Berkembangnya komoditas unggulan daerah 26. Meningkatkan Sistem Informasi dan Promosi; 27. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Sembako Serta Komoditas Strategis Lainnya; 28. Meningkatkan Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga; 29. Meningkatkan Jaminan Perlindungan Konsumen; 30. Meningkatkan daya saing pasar tradisional guna pemberdayaan usaha pedagang kecil dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat; 31. Penataan Pasar Milik Pemerintah 32. Meningkatkan kualitas tenaga teknis dan tenaga administrasi Aparatur; 33. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa; Mewujudkan Terminal Agribisnis (Pasar Induk Beras).
1. Memperkuat kerukunan umat beragama. 2. Meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, 3. Menegakkan produk hukum daerah	1. Pengembangan kerukunan Kehidupan antar umat Beragama Yang Harmonis ; 2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, parpol dan ormas 3. Penegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif

	4. Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja dan Revitalisasi LINMAS.
1. Peningkatan kualitas infrastruktur 2. Peningkatan kualitas ruang hidup kawasan perkotaan 3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dampak dan resiko lingkungan hidup, Sanitasi, penanggulangan, penanganan, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi 3. Meningkatnya penataan ruang wilayah kabupaten berbasis keberlanjutan pembangunan dan kebencanaan 4. Meningkatnya cakupan layanan air minum, air limbah, drainase dan pelayanan persampahan. 5. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 6. Penataan kota yang manusiawi dan ramah anak 7. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 8. Penyediaan ruang publik dan RTH
1. Pemantapan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa; 2. Kemandirian Desa	1. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa; 2. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan desa 3. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa; 4. Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa 5. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa; 6. Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya 7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa 8. Peningkatan peran aktif masyarakat desa 9. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa 10. Pengembangan usaha ekonomi desa 11. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016-2021.

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Strategi

6.1.1 Misi Pertama

Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa

- 1) **Bidang Pemerintahan** melalui strategi pengembangan ***sistem administrasi pelayanan publik secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Karawang***, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur dengan fokus penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, E-KTP), peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar, rintisan smart city, peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional), penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja, optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan publik, peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja, penyediaan fasilitas kendaraan dinas pegawai dan fasilitasi penyediaan perumahan pegawai.
- 2) **Bidang Keuangan Daerah** melalui strategi peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus peningkatan upaya-upaya penyerapan anggaran belanja pembangunan dan pengelolaan asset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

peningkatan pendapatan asli daerah, penerapan informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengembangan sistem akuntansi keuangan dan aset daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD, peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, peningkatan mutu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) **Bidang hukum** melalui strategi meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum serta menghilangkan budaya kolusi dan korupsi, meningkatkan pembinaan trantibmas, penegakan Peraturan Daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya serta transparasi biaya perizinan.

6.1.2. Misi Kedua

Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing;

- 1) **Bidang Pendidikan** melalui strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan fokus penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun dan dukungan wajar Dikdas 12 Tahun, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan non formal dengan fokus penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi, Pembangunan ruang kelas baru, peningkatan sarana belajar sesuai standar, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru, peningkatan kemampuan guru bidang studi, peningkatan mutu peserta didik, keberlanjutan program keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan, pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SLTA atau sederajat, peningkatan kualitas mutu pendidikan pesantren, bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, pembangunan sekolah unggulan setingkat SMA, pembukaan jurusan perhotelan pada SMK, pemberian beasiswa secara penuh kepada masyarakat kurang mampu dan

berprestasi untuk perguruan tinggi serta pendidikan non formal, keaksaraan fungsional dan life skill.

- 2) **Bidang Kesehatan** dengan strategi peningkatan akses dan kualitas kesehatan melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan (Universal Coverage), pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer, pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, penyediaan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan RSUD di Rengasdengklok, rintisan peningkatan Puskesmas Poned menjadi RSIA, membuka sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan di setiap PUSKESMAS, penanggulangan gizi buruk, pemberdayaan posyandu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa), peningkatan puskesmas menjadi puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) di 30 kecamatan, peningkatan Puskesmas Pembantu (PUSTU) menjadi Puskesmas, optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes, pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB penyakit, pengembangan sistem surveillance, peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan, penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi, peningkatan program pelayanan keluarga berencana, penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi.
- 3) **Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan** dengan strategi peningkatan peran dan fungsi pemuda, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan peningkatan upaya-upaya pemberdayaan pemuda, dengan fokus penanganan masalah kenakalan remaja (geng motor dan tawuran antar pemuda dan pelajar), pembinaan mental pemuda dan menggalakkan gerakan disiplin nasional, penanaman wawasan kebangsaan, optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan, restrukturisasi dan revitalisasi karang taruna, penyediaan anggaran untuk pengelolaan organisasi kepemudaan, kewirausahaan pemuda melalui pemberian bantuan modal

dengan pola pra koperasi pemuda penyediaan sarana dan prasarana olah raga, Advokasi KB, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan kampung KB, pembangunan kampung KS, pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, peningkatan program PEKKA, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan.

4) **Bidang ketenagakerjaan**

dengan strategi penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan melalui informasi dan rekrutmen tenaga kerja satu pintu, penempatan dan perluasan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, tata kelola layanan TKI satu pintu (one stop service), pelatihan dan orientasi penempatan tenaga kerja di perusahaan, dan pembangunan gedung BLK di 6 enam lokasi.

5) **Bidang Ekonomi Masyarakat dengan strategi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta dan stakeholders antar sektor yang lainnya untuk menumbuhkan gairan Investasi, daya saing serta CSR, Pelestarian nilai-nilai sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata melalui penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata, penurunan angka kemiskinan, penguatan modal usaha Koperasi, UKM dan BUMDes melalui penjaminan PEMDA, meningkatkan daya saing KUMK/UKM, Koperasi dan BUMDes, revitalisasi desa pertanian, pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis), pengembangan IKM, pengembangan pasar, penguatan kapasitas usaha KUMKM, penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW), pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif, optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi tani yang bankable, peningkatan kinerja penyuluhan pertanian,**

pengembangan desain dan standar mutu beras karawang, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian, fasilitasi pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan, peningkatan sarana dan prasarana TPI, penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable, fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis), penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) unggulan menuju One village one product desa industry, fasilitasi kemitraan IKM, penataan pasar milik pemerintah, fasilitasi pengembangan pasar desa, terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras), pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang, pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM, pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM, pemantapan manajemen perencanaan ODTW, pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang karawang, peningkatan sarana dan prasarana ODTW Karawang Selatan dan Karawang Utara termasuk pembangunan kawasan agro wisata.

6.1.3. Misi Ketiga

Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;

- 1) **Bidang Sosial Budaya Agama dan politik** melalui strategi memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, menegakkan produk hukum daerah, peningkatan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan, pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama, pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran dan fungsi kalangan agamawan, penguatan peran dan fungsi organisasi kerukunan umat beragama, pengalokasian anggaran untuk pengelolaan organisasi kerukunan umat beragama, pembinaan kelembagaan sosial keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, penegakan peraturan daerah, penyusunan produk hukum daerah, peningkatan kapasitas

lembaga legislatif, fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya serta mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

6.1.4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari

Bidang Infrastruktur dengan strategi peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas ruang hidup kawasan perkotaan, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, sanitasi, penanggulangan, penanganan, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan jaringan jalan dan jembatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum, penataan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, penyediaan bangunan pemerintahan dan ruang publik, perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, pengembangan sistem prasarana pengendalian banjir, peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan, mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten, meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung kecamatan dengan desa, pembangunan jembatan penghubung strategis, jalan antar kawasan, pengembangan regulasi sistim transportasi kabupaten, pembangunan moda transportasi massal Trans Karawang, pembangunan fasilitas transportasi (CCTV dan rambu serta marka jalan), pembangunan Terminal Tipe C, peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pelayanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR), penataan lingkungan kumuh permukiman (penataan kampung layak huni, meliputi jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan), program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), penataan taman kota, pembangunan hutan kota, peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup, peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH), penegakan peraturan bidang LH, peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara serta penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan area mangrove di pesisir pantai (Green belt dan silvo fishery), penanganan lahan kritis (vegetasi DAS), pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat, perlindungan sumber daya air, penyusunan masterplan mitigasi bencana, penanganan abrasi pantai, koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan sistem sanitari (landfill), pengembangan sistem pengelolaan sampah 3R (Recycle, Reduce, Reuse) berbasis masyarakat.

6.1.5. Misi Ke Lima

Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa

- 1) **Bidang Pemerintahan Desa** dengan strategi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan fokus pengembangan sistem dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan perangkat kelembagaan dan administrasi desa, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, pengawasan dan pengendalian bantuan keuangan desa yang berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, pendidikan dan pelatihan berkarakter bagi Kepala Desa dan perangkatnya, pendirian BUMDES berdasarkan kearifan lokal dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dibidang informasi dan teknologi dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

6.2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui arah kebijakan yang merupakan prioritas Bupati/Wakil Bupati

Karawang Tahun 2016-2021 yang merupakan sinkronisasi dari Nawacita pada RPJMN 2015-2019 dan Common Goals RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5, CG1,CG2);
2. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa (C2, C3,C4, CG10);
3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8);
4. Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR (C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9);
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7,CG3);
6. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sertaantisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, sanitasi, penanggulangan, penanganan, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air (C7, CG3, CG6);
7. Peningkatan pelayanan kepada PMKS dan pengembangan kehidupan beragama yang harmonis (C1, C8, C9, CG9);
8. Pelestarian nilai-nilai sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata (C8,C9, CG7).

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1.1. Kebijakan Umum Pembangunan

Sebagai tindak lanjut dan implementasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Kabupaten Karawang selama kurun waktu 2016-2021 akan dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah.

Deskripsi pendekatan tersebut dapatdi uraikan sebagai berikut; Perencanaan Wilayah, adalah “suatu perencanaan yang berjangka panjang, bertahap dan sistematis dengan suatu tujuan yang jelas”. Tujuan yang jelas ini adalah yang menyangkut pada keselarasan kepentingan stakeholders, baik masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok pengusaha maupun pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah menyangkut pada bagaimana pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang harus dilaksanakan secara fully dan efficiently agar pemanfaatan potensi dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Disamping itu juga perlu ada pemikiran bagaimana dunia usaha dapat berkiprah secara ekonomis serta pemerintah mendapatkan manfaat dari semua keadaan ini bagi kelangsungan pemerintahan yang baik.

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah. Perencanaan adalah suatu proses

yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu : 1.Merencanakan berarti memilih; 2.Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya; 3.Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; 4.Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengimplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, antar sector serta antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Karawang mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan yang tidak sama untuk setiap wilayah. Strategi pembangunan wilayah juga memperhitungkan basis daratan dan basis

pesisir sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan di Kabupaten Karawang juga memperhatikan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan tata ruang nasional secara keseluruhan. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antar wilayah yang solid termasuk meningkatkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur yang terkoneksi antar desa dan kecamatan, penyediaan air bersih, dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antar wilayah.

Pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan terus dikembangkan dengan penrapan teknologi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami peningkatan dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan

menjadi lahan pertanian abadi. Peningkatan sektor pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri.

Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri pertanian. Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik.

Dengan demikian, apa yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhi kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air. Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung akan di optimalkan sebagai objek wisata “GURILAP”. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang.

b. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan

mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi jalan yang mengacu pada sistem informasi transportasi;
- 2) Pelaksanaan pembangunan transportasi massal (Trans Karawang);
- 3) Persiapan dan pelaksanaan prasarana dan sarana manajemen lalu lintas;
- 4) Peningkatan fasilitas layanan publik khususnya transportasi (CCTV);
- 5) Perencanaan dan pembangunan perlintasan tidak sebidang kereta api;
- 6) Meningkatkan Kemantapan Infrastruktur Yang Berkeselamatan Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Perdagangan, Jasa, Aktivitas Sosial Budaya, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Pemerintahan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Mewujudkan Karawang Yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing;
- 7) Pengembangan dan Penanganan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Sebagai Daya Dukung dan Penunjang Dalam Melayani Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Wilayah Terpadu (PWT), mencakup :
 - a. Sektor Strategis;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Perdagangan dan Jasa;
 - d. Sektor Industri;

- e. Sektor Pariwisata;
 - f. Penyesuaian Pengembangan Wilayah Sesuai Dengan RTRW / RDTR.
- 8) Jaringan prasarana wilayah di wilayah pengembangan dan kawasan strategis;
 - 9) Pembangunan Jalan;
 - 10) Pembangunan jembatan;
 - 11) Peningkatan Kontruksi Jalan Kabupaten;
 - 12) Penurapan Jalan Kabupaten;
 - 13) Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten;
 - 14) Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Kabupaten;
 - 15) Rehabilitasi Jalan Kabupaten;
 - 16) Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten;
 - 17) Rehabilitasi Jembatan Kabupaten;
 - 18) Peningkatan Jembatan Kabupaten;
 - 19) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kabupaten;
 - 20) Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten;
 - 21) Pembangunan Trotoar Jalan Kabupaten;
 - 22) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kabupaten;
 - 23) Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Kabupaten / Dinormalisasi / Dipelihara ;
 - 24) Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten ;
 - 25) Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten;
 - 26) Rehabilitasi Saluran Pembuang Kabupaten;
 - 27) Pembangunan Bendung / Situ / Embung / Folder Saluran Air Kabupaten Yang Terbangun;

- 28) Rehabilitasi Bendung / Situ / Embung / Folder Saluran Air Kabupaten;
- 29) Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai;
- 30) Rehabilitasi/Normalisasi Muara;
- 31) Pembangunan terminal integrated pasar rengasdengklok;
- 32) Revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional;
- 33) Pembangunan sarana olah raga;
- 34) Pembangunan TPA, WTP dan IPLT sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan;
- 35) Pengembangan kawasan agribisnis, dan agro wisata;
- 36) Pembangunan Hutan Kota dan RTH dengan membangun keterlibatan masyarakat dan swasta;
- 37) Pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir yang semakin didukung dengan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis lainnya, Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai corebisnis utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi

antara lain: jalan antar desa, jalan setapak, jalan lingkungan; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; dan jaringan komunikasi.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Kabupaten Karawang. Dengan demikian pengembangan SDM juga menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2016-2021. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana prasarana, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan berbasis keagamaan melalui pengembangan pondok pesantren dengan manajemen yang baik. Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan penyediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya dan menular. Pengembangan SDM Kabupaten Karawang dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali,

memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, adat istiadat serta budaya kontemporer. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri. Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kreatif yang sedang dibangun.

1.2. Program Pembangunan Daerah 2016-2021

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah implementasi urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan urusan pilihan dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sosial;
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Arsip.

URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;

7. Perindustrian;

8. Transmigrasi.

Selain urusan wajib dan urusan pilihan tersebut diatas, untuk mencapai misi Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 juga dilaksanakan oleh unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi;

1. Perencanaan;

2. Keuangan;

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Penelitian dan pengembangan;

5. Fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan keterkaitan antar misi, sasaran misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan akan diuraikan pada lampiran 2 RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program, sebagai berikut:

1.1. Program/Kegiatan Prioritas

Program prioritas disusun berdasarkan urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang serta memperhatikan rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yaitu mempertimbangkan :

- a. Urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- b. Keterkaitan program utama dgn program mitigasi.
- c. Keterkaitan dimensi waktu dgn program utama.
- d. Kemampuan Anggaran Daerah.

Adapun program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1.1.1. Bidang Pendidikan

- 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi.
- 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- 3 Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- 4 Peningkatan sarana belajar sesuai standar.
- 5 Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 6 Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru.
- 7 Peningkatan kemampuan guru bidang studi.
- 8 Peningkatan mutu peserta didik.
- 9 Keberlanjutan program keaksaraan fungsional.

- 10 Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SLTA atau sederajat.
- 11 Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan.
- 12 Fasilitasi Pemberian bea siswa secara penuh kepada masyarakat yang tidak mampu ke perguruan tinggi.
- 13 Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C).
- 14 Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda melalui pra koperasi pemuda.

1.1.2. Bidang Kesehatan

- 1 Penyediaan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan.
- 2 Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
- 3 Peningkatan Puskesmas PONED menjadi RSIA.
- 4 Pembangunan RSUD di Rengasdengklok.
- 5 Membuka sistem informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap PUSKESMAS.
- 6 Penanggulangan gizi buruk.
- 7 Pemberdayaan posyandu.
- 8 Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)
- 9 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan.
- 10 Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes.
- 11 Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit.
- 12 Pengembangan sistem surveillance.
- 13 Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan.
- 14 Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi.

- 15 Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana.
- 16 Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi.
- 17 Pembangunan Rumah Sakit Paru.
- 18 Pembangunan Gedung-Gedung Penunjang layanan medik RSUD.
- 19 Pembangunan Gedung RSUD kelas 3 RSUD.
- 20 Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas.

1.1.3. Bidang Pemuda dan Olahraga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- 1 Penanganan Masalah kenakalan remaja;
- 2 Pembinaan mental pemuda dan menggalakkan gerakan disiplin nasional;
- 3 Penanaman wawasan kebangsaan.
- 4 Optimalisasi Peran dan Fungsi Organisasi Kepemudaan.
- 5 Restrukturisasi dan revitalisasi Karang Taruna.
- 6 Penyediaan sarana dan prasarana olah raga.
- 7 Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan.
- 8 Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- 9 Pembangunan Kampung KB.
- 10 Pembangunan Kampung KS.
- 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 12 Pengarustamaan Gender.

1.1.4. Bidang Ketenagakerjaan

- 1 Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja.

- 2 Penyediaan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja.
- 3 Pengembangan Regulasi Penempatan Tenaga Kerja.
- 4 Pembangunan Balai Latihan Kerja di 6 wilayah.
- 5 Penerapan sistem pengawasan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.
- 6 Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan melalui informasi dan rekrutment tenaga kerja satu pintu.
- 7 Penempatan dan perluasan kerja.
- 8 Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja.
- 9 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, tata kelola layanan TKI, satu pintu one stop service.
- 10 Pelatihan dan orientasi penempatan tenaga kerja di perusahaan.
- 11 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI).
- 12 Perlindungan TKI.
- 13 Menyelenggarakan kursus keterampilan gratis bagi masyarakat.

1.1.5. Bidang Ekonomi Masyarakat

- 1 Pengembangan regulasi dan pengawasan kebijakan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- 2 Pemberian modal dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat miskin.
- 3 Membuka jaringan pemasaran hasil produksi.
- 4 Program padat karya daerah.
- 5 Pengembangan pariwisata daerah dengan ikonik angklung dan destinasi wisata.

- 6 Melakukan kerjasama dengan Bank dalam menyalurkan kredit murah.
- 7 Membuka akses pemasaran hasil produksi UKM, Koperasi dan BUMDes.
- 8 Pelatihan pengelolaan manajemen usaha.
- 9 Pelatihan pengelolaan dan penambahan nilai hasil produksi.
- 10 Memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan.
- 11 Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif.
- 12 Optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian.
- 13 Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable.
- 14 Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian.
- 15 Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang.
- 16 Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
- 17 Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian.
- 18 Fasilitasi Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan.
- 19 Peningkatan sarana dan prasarana TPI.
- 20 Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable.
- 21 Fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis).
- 22 Penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan menuju One village one product desa industry.
- 23 Penataan pasar milik pemerintah.

- 24 Fasilitasi pengembangan pasar desa.
- 25 Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras).
- 26 Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang.
- 27 Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM.
- 28 Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM.
- 29 Pembangunan BLUD UKM.
- 30 Pembangunan sarana pemasaran.
- 31 Penataan PKL dan shelter-shelter PKL.
- 32 Pemantapan manajemen perencanaan ODTW.
- 33 Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang karawang.
- 34 Peningkatan sarana dan prasarana ODTW Sanggabuana.
- 35 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- 36 Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara.
- 37 Pengembangan Desa Padi Organik (Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan).
- 38 Penumbuhan Desa Mandiri Benih Padi (40 Ha) dan Kedelai (20 Ha).
- 39 Pengembangan Tanaman Pisang (Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan).
- 40 Penangkaran bibit jamur merang (Kecamatan Cilamaya Wetan).
- 41 Pembuatan Outlet/koordinasi dengan OPD lain.

- 42 Peningkatan pendapatan buruh ternak (sapi/kambing/itik/burung puyuh).
- 43 Penumbuhkembangan OVOP berbasis komoditas lokal (produk olahan yang berkualitas).
- 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).
- 45 Rehabilitasi TPI.
- 46 Pembangunan TPI Pasir Putih, Ciparage dan Muara.
- 47 Fasilitasi pembangunan perumahan nelayan.
- 48 Fasilitasi pengadaan kapal diatas 12 GT.
- 49 Pengadaan alat berat untuk pengerukan muara dilokasi TPI.

1.1.6. Bidang Sosial Budaya, Hukum dan Agama

1. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama.
2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Peningkatan peran dan fungsi kalangan agamawan.
4. Penguatan peran dan fungsi organisasi kerukunan umat beragama.
5. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan.
7. Penegakan peraturan daerah.
8. Penyusunan produk hukum daerah.
9. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif.
10. Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan.
11. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.

1.1.7. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- 1 Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten.
- 2 Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung kecamatan dengan desa.
- 3 Pembangunan jembatan penghubung strategis.
- 4 Fasilitasi pembangunan jalan antar kawasan.
- 5 Pengembangan regulasi sistem transportasi Kabupaten.
- 6 Pembangunan Terminal Tipe C.
- 7 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- 8 Peningkatan cakupan pelayanan air minum mendukung target nasional universal akses.
- 9 Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
- 10 Penataan lingkungan kumuh permukiman (penataan kampung layak huni, meliputi jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan).
- 11 Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).
- 12 Penataan dan pembangunan gedung kantor pemerintah.
- 13 Penataan ruang publik dan taman kota.
- 14 Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup.
- 15 Peningkatan Kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH).
- 16 Penegakan peraturan bidang LH.
- 17 Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara.

- 18 Penyediaan ruang terbuka hijau.
- 19 Fasilitasi pengembangan area mangrove di pesisir pantai (Green belt dan silvo fishery).
- 20 Penanganan lahan kritis (vegetasiDAS).
- 21 Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- 22 Penataan lingkungan/kawasan kumuh perkotaan/kampung sehat.
- 23 Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih.
- 24 Peningkatan penanganan infrastruktur jaling dan drainase lingkungan.
- 25 Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah.
- 26 Pembangunan fasilitas umum dan sarana publik, sarana olah raga, sarana ibadah termasuk penataan kawasan alun-alun Karawang.
- 27 Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang.
- 28 Perencanaan dan pembangunan perlintasan tidak sebidang kereta api.
- 29 Pembangunan Jalan Kabupaten.
 - a. Jaringan Jalan Lingkar Barat Karawang.
 - b. Jaringan Jalan Lingkar Timur Karawang .
 - c. Jaringan Jalan ODTW Sangga Buana dan Green Canyon Karawang / Loji-Tonjong.
 - d. Underpass Pasundan – Otista/ Tuparev.
 - e. Underpass Pawarengan.
 - f. Persiapan pembangunan Fly Over Wirasaba .
- 30 Pembangunan Jembatan

- a. Jembatan Walahar.
 - b. Jembatan Rumambe II.
 - c. Jembatan BTB II Akses Karawang Barat.
 - d. Jembatan Rengasdengklok – Pebayuran.
 - e. Jembatan BTB II – Mulyasari.
 - f. Jembatan Kw.6 Karawang.
- 31 Peningkatan kontruksi Jalan Kabupaten.
 - 32 Penurapan jalan kabupaten.
 - 33 Pemeliharaan rutin jalan kabupaten.
 - 34 Pemeliharaan berkala / periodik jalan kabupaten.
 - 35 Rehabilitasi jalan kabupaten.
 - 36 Pemeliharaan rutin jembatan kabupaten.
 - 37 Rehabilitasi jembatan kabupaten.
 - 38 Peningkatan jembatan kabupaten.
 - 39 Pembangunan saluran drainase jalan kabupaten.
 - 40 Rehabilitasi saluran drainase jalan kabupaten.
 - 41 Pembangunan trotoar jalan kabupaten.
 - 42 Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan saluran irigasi tersier kabupaten.
 - 43 Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan saluran irigasi sekunder kabupaten.
 - 44 Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan saluran pembuang kabupaten.
 - 45 Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan bendung / situ / embung / folder saluran air kabupaten.
 - 46 Pembangunan pengaman abrasi pantai.

- 47 Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan muara.
- 48 Pembangunan terminal integrated Pasar Rengasdengklok.
- 49 Penanggulangan bencana.

1.1.8. Bidang Pemerintahan

1. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik;
3. Penguatan SDM masyarakat desa;
4. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Desa;
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa;
7. Peningkatan peran aktif masyarakat desa;
8. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa;
9. Pengembangan usaha ekonomi desa;
10. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa;
11. Pembangunan aplikasi SiAP Bankeu untuk Pemerintah Desa.

1.1.9. Bidang Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah

1. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, e-KTP).
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar.
3. Rintisan smart city.
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional).
5. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja.
6. Optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan public.

7. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja.
8. Penyediaan fasilitas kendaraan dinas Pegawai.
9. Fasilitasi penyediaan perumahan pegawai.
10. Peningkatan PAD.
11. Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
12. Pengembangan sistem manajemen aset daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD.
13. Peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data.
14. Peningkatan mutu perencanaan pembangunan.
15. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.
17. Transparansi biaya perizinan.
18. Pendapatan Berbasis IT:
 - a. PBB On Line;
 - b. BPHTB On Line;
 - c. Taping Box;
 - d. Barcode Reklame.
19. SP2D On Line merupakan program inovasi yang berkelanjutan.

Program kegiatan prioritas diatas, sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentu saja pada proses

pelaksanaannya akan melalui kajian untuk menghindari dampak negatif pelaksanaan program dan kegiatan terutama dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Adapun program kegiatan yang akan melalui proses pengkajian dampak/resiko terhadap lingkungan hidup adalah ;

1. Pembangunan RSUD di Rengasdengklok.
2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP (dengan tempat perawatan).
3. Pembangunan Rumah Sakit Paru.
4. Pembangunan Kawasan Wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara.
5. Pengembangan Desa Padi Organik (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan).
6. Penumbuhan Desa Mandiri Benih Padi (40 Ha) dan Kedelai (20 Ha).
7. Pengembangan Tanaman Pisang (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan).
8. Pembangunan TPI Pasir Putih, Ciparage dan Muara.
9. Mengembangkan Ruas Jalan Kolektor Primer dan Lokal Sekunder pada Ruas Jalan Kabupaten.
10. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung Kecamatan dengan Desa.
11. Pembangunan jembatan penghubung strategis.
12. Fasilitasi pembangunann jalan antar kawasan.
13. Pembangunan Terminal Tipe C (Cilamaya & Tegalwaru).
14. Pembangunan Terminal Integrated Pasar Rengasdengklok.
15. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan).
16. Pembangunan Jalan Kabupaten
 - a. Jaringan Jalan Lingkar Barat Karawang;
 - b. Jaringan Jalan Lingkar Timur Karawang;

c. Jalan ODTW Sangga Buana (lingkar Loji) & Green Canyon Karawang / Loji-Tonjong.

Adapun resiko/dampak terhadap lingkungan hidup pada program kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis adalah ;

- 1. Berkurangnya tangkapan air.**
- 2. Peningkatan air larian (potential runoff).**
- 3. Penambahan volume limbah cair dan padat.**
- 4. Peningkatan volume kendaraan.**
- 5. Alih fungsi lahan pertanian.**
- 6. Berkurangnya RTH.**
- 7. Peningkatan suhu/pemanasan lokal.**
- 8. Pencemaran udara.**

Untuk melaksanakan rekomendasi dari KLHS dimaksud, maka akan dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut :

Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Sumber Daya Air dan Lintas Perairan”

a. Penambahan Program :

- 1) Peraturan konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan;**
- 2) Pembuatan sumur biopori;**
- 3) Pembuatan embung dan/atau waduk;**
- 4) Konservasi mata air, khususnya di bagian selatan Karawang.**
- 5) Peningkatan Capaian STBM di wilayah terdampak.**

b. Penyempurnaan Pelaksanaan Program :

- 1) Program-program pembangunan/peningkatan sarana kesehatan, dilaksanakan dengan memperhatikan :**
 - a) Penyediaan RTH;**
 - b) Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih;**
 - c) Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air;**

- d) Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara, agar memperhatikan daya dukung dan tampung kawasan. Pengembangan wisata di Karawang Selatan diikuti pembangunan embung/waduk agar air yang ditampung dapat digunakan untuk kebutuhan air kawasan wisata.**
- c. Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Kurangnya Infrastruktur Pembangunan dan Pemeliharannya”**
- 1) Penambahan Program :**
- a) Sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kepada masyarakat;**
 - b) Penyediaan angkutan umum yang nyaman dengan harga terjangkau.**
- 2) Penyempurnaan Pelaksanaan Program :**
- a) Program pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan alternatif;**
 - b) Menghindari pembangunan jalan pada lahan sawah;**
 - c) Pembangunan jalan di lahan sawah, menggunakan jalan layang;**
- d. Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Kurangnya RTH, Pencemaran Udara & Perubahan Iklim”**
- 1) Penambahan Program :**
- Penyusunan dan penegakan aturan batas emisi bagi kendaraan pribadi dan umum**
- 2) Penyempurnaan Pelaksanaan Program :**
- a) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, diupayakan tercapai luasan ideal RTH bagi suatu daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.**
 - b) Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara, melalui pembangunan stasiun-stasiun pengamatan kualitas udara.**

- c) **Pembangunan Terminal Tipe C, yang mengadaptasi konsep green shelter/bus station**
- e. **Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Pertanian”**
 - a. **Penambahan Program :**
 - 1) **Peraturan tentang sawah abadi & ketetapan spasial wilayahnya.**
 - 2) **Peraturan tentang alih fungsi lahan sawah.**
 - 3) **Inovasi peningkatan produktifitas pertanian.**
 - b. **Penyempurnaan Pelaksanaan Program :**
 - 1) **Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara, dilaksanakan dengan alternatif mengendalikan perijinan mendirikan bangunan fasilitas pariwisata khususnya akomodasi pariwisata dan sarana penunjang wisata lainnya pada lahan sawah.**
 - 2) **Program pembangunan infrastruktur, seminimal mungkin menggunakan lahan sawah.**

1.2. Kebijakan Pendanaan

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada desa, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan anggaran antara lain:

- 1. Belanja yang diarahkan (Earmark) seperti DAK, DBH – DR, DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Untuk Program), Dana BOS, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Penyesuaian

(Tunjangan Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

2. Belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (antara lain dana pendamping DAK, DDUB dan e- KTP) dan Belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor dan lain lain.
3. Belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan (belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja, belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji, Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan – DAK, Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa (PDRD, 10% dari PAD), bantuan Parpol, insentif pemungutan pajak dan belanja modal.
4. Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD.
5. Belanja lainnya (belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja subsidi).
6. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, pensiun dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka

mewujudkan APBD yang pro rakyat maka besaran belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah.

7. Alokasi anggaran belanja wajib pelayanan dasar pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
 - 1) Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) pada jenjang pendidikan dasar yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
 - 2) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/ tambah lokal, sedangkan belanja rehabilitasi ruang kelas dan belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana PMMS;
 - c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011;
 - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan laboratorium

8. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
 - a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
 - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
 - f. Penanganan penyakit menular, serta;
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD.
9. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan antara lain :
 - a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW – Pusat Kegiatan Lokal/PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.
 - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan jembatan penghubung strategis;

- f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
 - h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (*Public Space*) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan;
 - h. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - i. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah;
10. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

11. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, antara lain :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan lingkungan kumuh permukiman (rumah layak huni, jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan);
12. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah.
13. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.
14. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking serta kekerasan terhadap anak*, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
15. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pangan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan.

16. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa penataan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang, serta penyediaan tanah untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
17. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup diarahkan:
 - a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);
 - c. Pengembangan sistem data basis dan pelaksanaan kajian bidang lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
18. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa, pengembangan informasi dan teknologi berbasis aplikasi dan penataan kelembagaan desa.

20. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
21. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan diarahkan :
 - a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
22. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika diarahkan untuk Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
23. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistim kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk.
24. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar

daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah.

25. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah, meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, dan penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
26. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
27. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar persandian diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas persandian dalam mendukung informasi bagi pembangunan daerah.
28. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan diarahkan:
 - a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya;
 - d. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
 - e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan social baik dikalangan aparatur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;

- f. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman;
 - g. Mengembangkan jenis dan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
 - h. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;
 - i. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
 - j. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
29. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan diarahkan untuk pembinaan kelembagaan perpustakaan desa dan aktifitas budaya baca masyarakat, peningkatan manajemen perpustakaan daerah, peningkatan kualitas bahan bacaan perpustakaan daerah dan peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa
30. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar arsip diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dan pengembangan informasi dan teknologi pada pengelolaan arsip daerah.
31. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju

pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.

32. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitas, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah, pengembangan destinasi wisata berbasis wisata alam, sejarah dan religi, peningkatan manajemen pariwisata daerah dan pembangunan kawasan wisata berbasis sumber daya local.
33. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, mengembangkan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak.
34. Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, pembangunan hutan kota, konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi tanaman hasil hutan.
35. Alokasi anggaran urusan pilihan energi dan sumber daya mineral diarahkan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, penyambungan listrik desa (lisodes) pada masyarakat kurang mampu.

36. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.
37. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM, Pengembangan sentra-sentra industri potensial, peningkatan kemampuan teknologi industri, dan pengembangan industri kecil, menengah dan besar.
38. Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
39. Alokasi anggaran unsur penunjang perencanaan diarahkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pengembangan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah, peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, peningkatan mutu perencanaan pembangunan.

40. Alokasi anggaran unsur penunjang keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, mewujudkan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab melalui peningkatan PAD, pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pendapatan berbasis IT :
- a. PBB On Line;
 - b. BPHTB On Line;
 - c. Taping Box;
 - d. Barcode Reklame;
 - e. SP2D On.
41. Alokasi anggaran unsur penunjang kepegawaian dan Diklat diarahkan untuk pembentukan dan pembangunan *Assessment Center* Kabupaten Karawang untuk menunjang transparansi dan objektivitas penempatan dalam jabatan, pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN, penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten, pengembangan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (IT), pengembangan implementasi sistem absensi yang akurat sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai online dan terintegrasi dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), penyempurnaan mekanisme penghargaan bagi PNS teladan, beasiswa bagi tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis SKPD.

42. Alokasi anggaran unsur penunjang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kajian strategis sebagai bahan referensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2016-2021 juga tetap mengalokasikan anggaran untuk :

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.
2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tidak berupa dana transfer ke desa (menjadi pendapatan desa) tetapi dalam bentuk belanja langsung program

infrastruktur perdesaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya .

3. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara program prioritas nasional dan daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Surat Himbauan KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintahan daerah, karena itu agar kepala daerah memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah agar tidak terkesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.
5. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja daerah ini didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 yaitu ; memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2015. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Karawang provinsi.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Karawang dapat di lihat pada lampiran 3 RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2015. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang dengan didukung oleh serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.

2. Bupati dan Wakil Bupati Karawang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Renja OPD dan penyusunan anggaran OPD Kabupaten Karawang

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang 2011-2031 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah ***dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan***

Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

10.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjamin konsistensi proses perencanaan, RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2022. Dokumen transisi akan disusun setelah penyusunan evaluasi *midterm* RPJMD 2016-2021 pada Tahun 2018. Dokumen perencanaan transisi ini menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025 sesuai dengan periodisasi Kepala Daerah terpilih.

BAB XI

PENUTUP

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025. Pada tahapan ini pembangunan Kabupaten Karawang diarahkan untuk menguatkan pembangunan daerah di segala bidang dengan menekankan pada penyempurnaan prana, penguatan pembangunan kualitas SDM dan pembentukan modal sosial serta penguatan struktur ekonomi melalui perluasan pengembangan agribisnis pertanian dan industri unggulan serta tumbuh berkembangnya bisnis kelautan. Secara umum pada tahapan ini sasaran prioritas arah pengembangan misi pembangunan daerah meliputi :

Pertama, Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Yang Berbudaya, Berakhlak Dan Beradab dengan prioritas pengembangan : (i) Penguatan kondisi individu yang cerdas melalui meningkatkan pemerataan, perluasan akses dan kualitas layanan PAUD seluruh anak 0 – 6 tahun, Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan, Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyiapan prana, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berbasis multimedia, meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan syarat kompetensi serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar dan berbasis teknologi, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi proses belajar-mengajar, Peningkatan tata kelola pendidikan melalui pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi di bidang pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perbaikan sistem informasi data pendidikan, peningkatan kapasitas manajemen lembaga

dan pengelola pendidikan, pengembangan
 fv cc sistem pengendalian mutu,
 Peningkatan minat membaca dan pelestarian keberaksaraan melalui
 penyediaan sarana baca dengan melibatkan peran aktif swasta dan
 masyarakat. (ii) Penguatan kondisi individu yang sehat melalui pembangunan
 bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dengan
 melibatkan peran swasta, peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga
 kesehatan yang berkualitas, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat,
 peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan
 kondisi status gizi masyarakat, pengendalian intensitas dan penyebaran
 penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 (iii) Penciptaan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui
 pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.
 (iv) Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang
 masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitasi dan program
 perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih
 layak dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial masyarakat
 yang berbudaya, beradab dan berakhlak, dibentuk dan dikembangkan
 berbagai pranata sosial masyarakat, semakin berkembangnya aktifitas
 kehidupan beragama secara mandiri, semakin berkembangnya nilai-nilai
 demokrasi dan politik lokal dan meningkatnya aktifitas dan upaya pelestarian
 nilai seni dan budaya.

Kedua, Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya
 Saing, Berkualitas Dan Rasional dengan prioritas pengembangan : Penguatan
 manajemen, sistem dan jaringan produk agribisnis unggulan disertai dengan
 perluasan pengembangan agribisnis berbasis inovasi pertanian melalui
 pemanfaatan teknologi dan sistim produksi yang ramah lingkungan,
 pemantapan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah

pesisir secara terpadu, Pengembangan bisnis kelautan yang mengarah pada terbentuknya industri kelautan, Perluasan Pengembangan diversifikasi dan peningkatan mutu produk komoditas pertanian mendukung perluasan pengembangan agroindustri unggulan, Pengembangan Manajemen logistik pangan, Perluasan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (foot loose industry) melalui pemanfaatan teknologi dan sistim produksi yang ramah lingkungan didukung oleh pengembangan kemitraan dan Penguatan jaringan struktur industri antara IKM dengan industri besar, Penguatan capacity building masyarakat Pertanian dan kelautan serta IKM melalui pengembangan dan pengimplementasian teknologi proses dan produk teknik desain dan manajemen usaha, Pengembangan dan penguatan manajemen pengelolaan kepariwisataan, Pengembangan jasa perdagangan yang semakin mendukung sektor pertanian dan industri serta penguatan pasar produk IKM dan agroindustri, Fasilitasi, penyempurnaan regulasi, penguatan peran koperasi agribisnis, IKM serta kelembagaan UKM sektor jasa dan perdagangan, Penyiapan angkatan kerja baru serta penguatan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi pasar tenaga kerja disertai dengan penguatan hubungan industrial dalam penanganan permasalahan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Ketiga, Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan Lestari dengan prioritas pengembangan : Penyusunan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat 4 serta penetapan Perda RTRW dan turunannya; Penyusunan rencana rinci tata ruang; Penyusunan peraturan zonasi; Penetapan mekanisme perizinan yang sesuai dengan peraturan penataan ruang; Evaluasi pemanfaatan ruang; Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan pembinaan pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang;

Pelaksanaan pembangunan yang semakin baik dan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang; Terwujudnya proporsi kawasan lindung sebesar 13% (diluar kawasan lindung Perhutani); Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dan aplikatif dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial; Pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi jalan yang mengacu pada sistem informasi transportasi; Persiapan dan pelaksanaan prasarana dan sarana manajemen lalu lintas; Ringroad Kota Karawang Tanjung pura – Resinda – Wadas, pelaksanaan pembangunan terminal integrated pasar area AP.02, Pelaksanaan Pembangunan IPAL Terpadu, Studi pengembangan TPA, pengembangan kawasan agribisnis, pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir yang semakin didukung dengan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis lainnya, pembangunan RTH semakin diarahkan dengan membangun keterlibatan masyarakat dan swasta, Meningkatnya ketersediaan air baku, peningkatan manajemen pelayanan kebersihan dan penyediaan air bersih, berfungsinya infrastruktur sistem data spasial yang operasional dan terintegrasi. Termanfaatkannya air permukaan sebagai air minum dan air bersih; Termanfaatkannya air bawah tanah sebagai air minum dan air bersih; Terkelolanya pemanfaatan air bersih dan air minum dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Terkendalinya sumberdaya air; Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas; Pembangunan saluran irigasi di areal persawahan setengah teknis; Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman; Pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta; Revitalisasi kawasan permukiman kumuh; Diterapkannya secara optimal sistem pengelolaan limbah pada terpadu mulai dari hirarki pengurangan sumber sampah (*source reduction/waste prevention*),

penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengomposan (*composting*), insinerasi untuk menghasilkan energi (*incineration with energy recovery*), insinerasi untuk mengurangi volume sampah (*incineration for volume reduction*), berbagai usaha pengurangan volume sampah (*other form of volume reduction*) dan *sanitary landfill*, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Pengembangan, penyempurnaan penerapan sistem pengelolaan limbah padat terpadu di Kabupaten Karawang dalam mengantisipasi perubahan legislasi, peraturan perundang-undangan maupun isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan lingkungan; Pembangunan, penyempurnaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam (air, udara, tanah dan plasma nutfah); Penegakan hukum lingkungan hidup dan implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, tanah) dan perlindungan kelestarian plasma nutfah; Pengembangan, penyempurnaan dan pemeliharaan basis data sumberdaya alam dan profil kondisi lingkungan hidup.

Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan prioritas pengembangan : Penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan struktur kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kewenangan dan hubungan kerja antar OPD, pembentukan dan pelaksanaan Standar Operasi dan Prosedur internal dan eksternal OPD, sistem pengawasan; Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; Penyempurnaan regulasi bidang perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Penyempurnaan dan Pengembangan sistem data base perencanaan pembangunan, Peningkatan kualitas dan relevansi litbang; Pengembangan dan penguatan model kerjasama antar daerah, Penyempurnaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan

keuangan dan aset, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Pengembangan pemanfaatan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen aset dan keuangan daerah serta peningkatan Akuntabilitas pengelolaan BUMD/BLUD; Regulasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan kewenangan desa, Penataan administrasi keuangan desa, Regulasi dan Penyempurnaan, pembinaan dan pelaksanaan rekrutmen kepala desa dan perangkat desa, Peningkatan kemampuan teknis Kepala Desa dan perangkat desa, Penyempurnaan Regulasi Penataan lembaga BPD dan penguatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Regulasi dan Penataan administratif wilayah desa-desa perkotaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Penyempurnaan Regulasi dan pengembangan pola pembiayaan pembangunan desa; Pembentukan, penyempurnaan dan Penegakkan Perda; Penyempurnaan Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur, Penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen yang selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, Penyempurnaan pendayagunaan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Penyempurnaan pengembangan karier aparatur, Penyempurnaan Pemberian insentif sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja, Penyempurnaan Pengembangan budaya organisasi; Penerapan dan penyempurnaan standar pelayanan minimum kepada seluruh OPD; Penyempurnaan Regulasi, fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat swasta dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, Rekrutmen dan pembinaan kader pembangunan masyarakat. Penerapan regulasi dan implementasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam bentuk *e-government* untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah selain juga penerapan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting*; Peningkatan e-

literacy masyarakat karena SDM merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* (baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government*).

BUPATI KARAWANG,

dr. CELLICA NURRACHADIANA



**Draft Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Karawang 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016**

REALISASI APBD KABUPATEN KARAWANG TH 2010 SD 2015 (DalamJuta Rupiah)

NO	URAIAN			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
				Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	PEMBIAYAAN DAERAH																	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			307,483.10	307,670.28	100%	455,319.06	455,335.06	100%	500,169.42	500,170.27	100%	424,877.01	424,908.51	100%	419,547.73	465,890.85	111%
			SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunAnggaranSebelumnya	307,064.86	307,064.86	100%	455,319.06	455,319.06	100%	500,169.42	500,169.42	100%	424,877.01	424,877.01	100%	419,547.73	465,890.85	111%
			PenerimaanKembaliPemberianPinjaman	418.24	428.14	102%	0.00	16.00	#DIV/0!	0.00	0.85	#DIV/0!	0.00	31.50	#DIV/0!			
			PenerimaanPiutang Daerah	0.00	177.27	#DIV/0!	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			10,723.16	10,500.33	98%	5,013.15	0.00	0%	5,000.00	5,000.00	100%	6,000.00	6,000.00	100%	10,000.00	12,000.00	120%
			Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,412.30	9,189.47	98%	5,000.00	0.00	0%	5,000.00	5,000.00	100%	6,000.00	6,000.00	100%	10,000.00	12,000.00	120%
			PembayaranPokokUtang	1,310.86	1,310.86	100%	13.15	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	0.00				

**Misi, Sasaran Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021**

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK 3. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah 4. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas. 6. Peningkatan PAD	1) Bidang Pemerintahan melalui strategi pengembangan sistem administrasi pelayanan publik secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Karawang, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur dengan fokus penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, E-KTP), Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar, Rintisan smart city, Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional), Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja, Optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan publik, Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja, Penyediaan Fasilitas kendaraan dinas Pegawai dan Fasilitas Penyediaan Perumahan Pegawai	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana,sertapemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9)	1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 2. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; 8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan

		2) Bidang Keuangan Daerah melalui strategi peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus ; peningkatan upaya-upaya penyerapan anggaran belanja pembangunan dan pengelolaan asset daerah untuk mendapatkan opini WTP, peningkatan pendapatan asli daerah, penerapan informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan asset daerah dan optimalisasi pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber PAD, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka <i>mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup</i>, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis; (C1, C8, C9, CG9)	
--	--	--	--	--

		3) Bidang hukum melalui strategi meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum serta menghilangkan budaya kolusi dan korupsi, peningkatan pembinaan trantibmas, penegakan Peraturan Daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya serta transparansi biaya perizinan	8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	--	---	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya perilaku HBS 4. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 5. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi dan gender 6. Meningkatnya pengendalian penyakit 7. Menurunnya angka kematian ibu dan anak 8. Meningkatnya jumlah , jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan 9. Meningkatnya sinergitas program kesehatan antara propinsi dan kabupaten 10. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur tenaga kesehatan	1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan fokus ; Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan dukungan Wajar Dikdas 12 Tahun, Peningkatan Mutu pendidikan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan focus Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Peningkatan sarana belajar sesuai standar, Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru, peningkatan kemampuan guru bidang studi, peningkatan mutu peserta didik, keberlanjutan program keaksaraan fungsional, Pendidikan kesetaraan, Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SMA, Peningkatan Kualitas mutu pendidikan pesantren, Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, Pembangunan sekolah unggulan di setiap kecamatan dan satu sekolah unggulan di tingkat Kabupaten	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana,sertap pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3)	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini Informal 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Promosi Kesehatan 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 12. Program Sumber Daya Kesehatan 13. Program Manajemen Kesehatan 14. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

	12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi 13. Berkembangnya komoditas unggulan daerah 14. Meningkatnya kesempatan kerja baik formal maupun non formal 15. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat termasuk petani dan nelayan 16. Peningkatan pelayanan investasi 17. Meningkatnya peran serta swasta melalui CSR 18. Meningkatnya upaya pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan serta pemuda dan olahraga 19. Peningkatan pelestarian nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal untuk mendukung sektor pariwisata	setingkat SMA, Pembangunan SMK Perhotelan, Pemberian beasiswa secara penuh kepada masyarakat kurang mampu dan berprestasi untuk perguruan tinggi, Pemberantasan buta huruf secara menyeluruh. 2) Bidang Kesehatan dengan strategi peningkatan akses dan kualitas kesehatan melalui ; Pengembangan sistem jaminan kesehatan (Universal Coverage), Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer, Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan fokus Penyediaan dan peningkatan system pelayanan kesehatan, Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Pembangunan RSUD di Rengasdengklok, Pembangunan RSIA di 3 wilayah (Telagasari, Pangkalan dan Tempuran), Membuka system informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap PUSKESMAS, Penanggulangan gizi buruk, Pemberdayaan posyandu, Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa), Peningkatan puskesmas menjadi	6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka <i>mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sertaantisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup</i>, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	15. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda; 16. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga; 17. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi; 18. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah; 19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 20. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan 21. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 22. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 23. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 24. Program Peningkatan
--	--	---	---	---

		puskesmas rawat inap di 30 kecamatan, Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes, Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit, Pengembangan system surveillance, Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan, Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi, Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana, Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi. 3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan strategi Peningkatan Peran dan Fungsi Pemuda, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan Peningkatan Upaya-upaya Pemberdayaan Pemuda, dengan fokus Penanganan Masalah kenakalan remaja (geng motor dan tawuran antar pemuda dan pelajar), Pembinaan mental Pemuda dan Menggalakan gerakan disiplin nasional, Penanaman wawasan kebangsaan, Optimalisasi Peran dan Fungsi Organisasi Kepemudaan, Re strukturisasi dan revitalisasi Karang Taruna, Penyediaan Anggaran untuk pengelolaan organisasi	25. Kesempatan Kerja 26. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 27. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan; 28. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 29. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 30. Program Pelayanan Keluarga Berencana; 31. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 32. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial 33. Program Pemberdayaan Sosial 34. Program Perlindungan Sosial 35. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 36. Program Peningkatan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 37. Program Pengembangan Nilai Budaya; 38. Program Pengelolaan
--	--	--	--

		kepemudaan, Kewirausahaan pemuda melalui pemberian bantuan modal dengan pola pra koperasi pemuda penyediaan sarana dan prasarana olah raga, Advokasi KB, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan kampung KB, pembangunan kampung KS, pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, peningkatan program PEKKA, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan. 4) Bidang ketenagakerjaan Dengan strategi Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan melalui informasi dan recruitment tenaga kerja satu pintu, penempatan dan perluasan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, tata kelola layanan TKI satu pintu (one stop service), pelatihan dan orientasi penempatan tenaga kerja di perusahaan, dan pembangunan gedung BLK di 6 enam lokasi.		Kekayaan dan Keragaman Budaya; 38. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 39. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 40. Peningkatan Produksi Pertanian 41. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 42. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan; 43. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan; 44. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 45. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 46. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 47. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
--	--	---	--	---

		5) Bidang Ekonomi Masyarakat dengan strategi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta dan stakeholders antar sector yang lainnya untuk menumbuhkan gairan Investasi, daya saing serta CSR, Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata melalui ;Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata, penurunan angka kemiskinan, Penguatan Modal Usaha Koperasi, UKM dan BUMDes melalui Penjaminan PEMDA, Meningkatkan Daya Saing KUMK/UKM, Koperasi dan BUMDes, Revitalisasi desa pertanian, Pengembangan sentraproduksi perikanan (mina bisnis), Pengembangan IKM, Pengembangan pasar, Penguatan kapasitas usaha KUMKM, Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW), Pengembangan komoditas		48. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 49. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 50. Program Pengembangan Destinasi Wisata; 51. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
--	--	--	--	--

		unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif, Optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian, Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable, Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian, Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang, Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian, Fasilitasi Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan, Peningkatan sarana dan prasarana TPI, Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable, Fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis), Penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan menuju One village one product desa industry, fasilitasi kemitraan IKM, Penataan pasar milik pemerintah, Fasilitasi pengembangan pasar desa, Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras), Pembangunan sarana	
--	--	--	--

		dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang, Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM, Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM, Pemantapan manajemen perencanaan ODTW, Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang karawang , Peningkatan sarana dan prasarana ODTW Karawang Selatan termasuk pembangunan kawasan agro wisata dan pembangunan hutan kota.		
--	--	--	--	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;	1. Pengembangan kerukunan Kehidupan antar umat Beragama Yang Harmonis ; 2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, parpol dan ormas 3. Penegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif 4. Peningkatan profesionalisme POL PP dan Revitalisasi LINMAS.	Memperkuat kerukunan umat beragama, Meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, Menegakkan produk hukum daerah melalui Peningkatan Kerukunan hidup antar dan inter umat beragama Pembinaan dan fasilitasi kegiatan social keagamaan dengan focus Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama, Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, Peningkatan Peran dan Fungsi Kalanagan Agamawan, Penguatan Peran dan Fungsi Organisasi Kerukunan Umat Beragama, Pengalokasian Anggaran untuk pengelilaan organisasi Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan kelembagaan social keagamaan, Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, Penegakan peraturan daerah, Penyusunan produk hukum daerah, Peningkatan kapasitas lembaga legislatif, Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya..	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikandan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana,sertapemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 4. program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 5. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

			mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sertaantisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	--	--	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi 3. Meningkatkan penataan ruang wilayah kabupaten berbasis keberlanjutan pembangunan dan kebencanaan 4. Meningkatkan cakupan layanan air minum, air limbah, drainase dan pelayanan persampahan. 5. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 6. Penataan kota yang manusiawi dan ramah anak 7. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 8. Penyediaan ruang publik dan RTH	Peningkatan kualitas infrastruktur , Peningkatan kualitas ruang hidup kawasan perkotaan, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencanadan pengelolaan sumber daya air, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Sistim moda transportasi, Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum, Penataan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik, perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana,sertapemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Program Pengelola an Kawasan Lindung 4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 6. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 7. Program Rehabilitasi dan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11. Program Pengembangan,

		pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, Pengembangan system prasarana pengendalian banjir dan Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan, Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten, Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung kecamatan dengan desa, Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis, Jalan antar kawasan, Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten, Pembangunan moda transportasi massal Trans Karawang, Pembangunan fasilitas transportasi (CCTV dan rambu serta marka jalan), Pembangunan Terminal Tipe C, Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan), Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Penataan Taman Kota, pembangunan hutan kota,	<i>mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6)</i> 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya; 12. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai; 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 14. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 15. Program Penataan Ruang; 16. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 17. Program Perencanaan Tata Ruang 18. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 19. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 20. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 21. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
--	--	---	---	--

		Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup, Peningkatan Kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH), Penegakan peraturan bidang LH, Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara serta Penyediaan ruang terbuka hijau, Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (Green belt dan silvo fishery), Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS), Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat, Perlindungan sumber daya air, Penyusunan masterplan mitigasi bencana, Penanganan abrasi pantai, Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan system sanitary landfill), Pengembangan system pengelolaan sampah 3R (Recycle, Reduce, Reuse) berbasis masyarakat.		23. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;
--	--	---	--	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa	1. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa; 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa; 3. Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa 4. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa; 5. Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya 6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa 7. Peningkatan peran aktif masyarakat desa 8. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa 9. Pengembangan usaha ekonomi desa 10. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa	Bidang Pemerintahan Desa dengan strategi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan fokus Pengembangan system dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan perangkat kelembagaan dan adminsitasi desa, Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, Pengawasan dan pengendalian bantuan keuangan desa yang berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD kabupaten, Pendidikan dan pelatihan berkarakter bagi Kepala Desa dan perangkatnya, Pendirian BUMDES berdasarkan kearifan local dan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dibidang informasi dan teknologi dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikandan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana,sertapemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya	1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; 2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 3. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 4. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

			Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka <i>mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup</i>, Sanitasi, penanggulangan, penanganan dan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	--	---	--

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karawang**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	9.818,38	10,800.22	11,880.24	13,068.26	14,375.09	15,812.60	17,393.86
1.1.2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	73.475.655,2	80,823,220.7 2	88,905,542.7 9	88,905,542.7 9	97,796,097.0 7	107,575,706.7 8	118,333,277.4 6
1.2	Kesehatan								
1.2.1	AHH	Tahun	71,50	71.53	71.56	71.59	71.62	71.65	71.68
1.3	Pertanian								
1.3.1	Indeks Nilai Tukar Petani	Point	103	103	103	103	103	103	104
1.4	Ketahanan Pangan								
1.4.1	Skor Pola Pangan Harapan	Point	70	71	72	74	76	78	79
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								

1.2.1	Ketenagakerjaan								
1.2.1. 1	Tingkat PartisipasiangkatanKerja	Jiwa	1.069.036	1,175,939	1,234,736	1,296,473	1,361,297	1,429,361	1,500,830
1.2.1. 2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50
1.2.2	Sosial								
1.2.2. 1	Kemiskinan	%	10,15	10	10	10	10	10	9
2	AspekPelayananUmum								
2.1.	FokusPelayananUrusanWajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1. 1	AngkaMelekHuruf	%	94	95	95	96	97	97	97
2.1.1. 2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7.39	7.69	7.99	8.29	8.59	8.89
2.1.1. 3	APK SekolahMenengah	%	68,36	71.78	75.37	79.14	83.09	87.25	91.61
2.1.2	Koperasidan UMKM								
	JumlahPenerimaManfaat Kredit Modal Usaha	Orang	38.904	42,794	44,934	47,180	49,539	52,016	54,617
2.1.3	Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian								

2.1.3.1	SkalaKepuasanMasyarakatterhadaplayananPemerintahan	Skala 1 - 4	3	3	3	3	3	4	4
2.1.3.2	SkalaKomunikasiOrganisasiPemerintahan	Skala 1-7	5	6	6	6	6	7	7
2.1.3.3	Tingkat PartisipasiPemilihanUmum	%	60	65	70	75	75	80	80
2.1.3.4	IndeksPersepsiKorupsi	Point	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	IndeksKebahagiaan	Point	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	PekerjaanUmum								
2.1.4.1	Tingkat KondisiBaikJaringanJalan	%	60	65	70	75	80	85	90
2.1.4.2	Volume SampahTerangkut	M3	732	805.20	845.46	887.73	932.12	978.73	1,027.66
2.1.4.3	CakupanPelayanan Air Minum (PDAM)	%	20,31	22.34	23.46	24.63	25.86	27.16	28.51
2.1.4.4	CakupanPelayanan Air Limbah Domestik	%	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	EnergidanSumberDaya Mineral								
2.1.5.1	RasioElektrifikasiRumahTanggaMiskin	0-1	0,13	0,15	0,20	0,50	0,70	0,90	1,00

2.1.6	Sosial								
2.1.6. 1	Jumlah PMKS yang Ditangani	Orang	176.503	170.000	169.000	168.000	167.000	166.000	165.000
2.1.6. 2	JumlahAnakJalanan	Orang	301	280	270	260	250	240	230
3	AspekDayaSaing								
3.1	FokusKemampuanEkonomi								
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67,60	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1	70.6
3.1.2	LajuPertumbuhanEkonomi	%/tahun	4,62	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
3.1.3	LajuPertumbuhanEksport	%	2	3	3	3	3	3	3
3.1.4	Inflasi	%	3,2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
3.2	Penanaman Modal								
3.2.1	Nilai PMA	Trilyun Rupiah	17,814	18,704.70	19,639.94	20,621.93	21,653.03	22,735.68	23,872.46
3.2.1	NilaiInvestasi/PMTB adhb (BPMPPT)	Trilyun Rupiah	25,454	26.730	28.060	29.470	30.940	32.490	34.110
3.3	Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian								

3.3.1	JumlahPenerbitanIjin	Izin	12.672	13,305	13,970	14,669	15,402	16,173	16,981
3.3.2	IndeksDemokrasi	Point	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	IndeksKeterbukaanInformasi Publik	Point	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	PendapatanAsli Daerah	Trilyun Rupiah	1.056.381	943.596	965.901	1.052.539	1.114.831	1.485.748	1.700.000
3.4	KependudukanCatatanSipil								
3.4.1	JumlahPenduduk (Proyeksi BPS)	Jiwa	2.079.742	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488	2.390.475
3.5	LingkunganHidup								
3.5.1	CapaianFungsiKawasan RTH	%	11	12	12	12	13	14	14
3.6	PekerjaanUmum								
3.6.1	Tingkat KemantapanJalan Kabupaten (kondisibaik&sedang)	%	60	65	70	75	80	85	90
3.6.2	Sampah Terangkut	%	22	22,06	24,19	26,29	28,38	30,45	32,55
3.6.3	Penyelesaian Rutilahu	Unit	6.478	5.845	4.545	3.245	1.945	645	3.245
3.6.4	Taman Kota Tertata	Lokasi	-	1	4	4	4	4	4
3.7	Pariwisata								
3,7.1	JumlahKunjunganPariwisata	Orang	4.427.348	4,870,082	5,113,586	5,369,266	5,637,729	5,919,616	6,215,596
3.8	Kebudayaan								
3.8.1	Jumlahsanggarbudaya	Buah	19	30	60	120	240	309	309
3.8.2	JumlahPelakuBudaya	Orang	12.629	13.891	15.281	16.809	18.490	20.339	22.373

3.8.3	JumlahGrupkesenian	Buah	604	614	624	634	644	654	674
3.9	PemudadanOlaharaga								
3.9.1	JumlahOrganisasiPemuda yang Dibina	Kelompo k	65	65	65	65	65	65	65
3.10	PemberdayaanperempuandanPerlindunganAnak								
3.10.1	IndeksPemberdayaan Gender (IGD)	Point	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 7.1
Misi, Sasaran Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK 3. Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah 4. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas. 6. Peningkatan PAD	1) Bidang Pemerintahan melalui strategi pengembangan sistem administrasi pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur dengan fokus penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, E-KTP), Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar, Rintisan smart city, Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional), Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja, Optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan public, Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja, Penyediaan Fasilitas kendaraan dinas Pegawai dan Fasilitas Penyediaan Perumahan Pegawai 2) Bidang Keuangan Daerah melalui strategi peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus ; peningkatan upaya-upaya penyerapan anggaran belanja pembangunan dan pengelolaan asset daerah untuk mendapatkan opini WTP, peningkatan pendapatan asli	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan	1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 2. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; 8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan

		daerah, penerapan informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan asset daerah dan optimalisasi pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber PAD, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3) Bidang hukum melalui strategi meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum serta menghilangkan budaya kolusi dan korupsi, meningkatkan pembinaan trantibmas, penegakan Peraturan Daerah, pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya serta transparansi biaya perizinan	penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	---	---	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya perilaku HBS 4. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 5. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi dan gender 6. Meningkatnya pengendalian penyakit 7. Menurunnya angka kematian ibu dan anak 8. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan 9. Meningkatnya sinergitas program kesehatan antara propinsi dan kabupaten 10. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur tenaga kesehatan 12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi 13. Berkembangnya komoditas unggulan daerah	1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan fokus ; Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan dukungan Wajar Dikdas 12 Tahun, Peningkatan Mutu pendidikan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan focus Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Peningkatan sarana belajar sesuai standar, Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru, peningkatan kemampuan guru bidang studi, peningkatan mutu peserta didik, keberlanjutan program keaksaraan fungsional, Pendidikan kesetaraan, Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SMA, Peningkatan Kualitas mutu pendidikan pesantren, Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, Pembangunan sekolah unggulan di setiap	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini Informal 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Promosi Kesehatan 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 12. Program Sumber Daya Kesehatan 13. Program Manajemen Kesehatan 14. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 15. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran

	14. Meningkatnya kesempatan kerja baik formal maupun non formal 15. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat termasuk petani dan nelayan 16. Peningkatan pelayanan investasi 17. Meningkatnya peran serta swasta melalui CSR 18. Meningkatnya upaya pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan serta pemuda dan olahraga 19. Peningkatan pelestarian nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal untuk mendukung sektor pariwisata	kecamatan dan satu sekolah unggulan di tingkat Kabupaten setingkat SMA, Pembangunan SMK Perhotelan, Pemberian beasiswa secara penuh kepada masyarakat kurang mampu dan berprestasi untuk perguruan tinggi, Pemberantasan buta huruf secara menyeluruh. 2) Bidang Kesehatan dengan strategi peningkatan akses dan kualitas kesehatan melalui ; Pengembangan sistem jaminan kesehatan (Universal Coverage), Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer, Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan fokus Penyediaan dan peningkatan system pelayanan kesehatan, Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Pembangunan RSUD di Rengasdengklok, Pembangunan RSIA di 3 wilayah (Telagasari, Pangkalan dan Tempuran), Membuka system informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap	Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	Serta Pemuda; 16. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga; 17. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi; 18. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah; 19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 20. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan 21. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 22. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 23. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 24. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 25. Program Peningkatan
--	--	--	--	---

		PUSKESMAS, Penanggulangan gizi buruk, Pemberdayaan posyandu, Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa), Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan, Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes, Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit, Pengembangan system surveillance, Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan, Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi, Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana, Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi. 3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan strategi Peningkatan Peran dan Fungsi Pemuda, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan Peningkatan Upaya-upaya Pemberdayaan Pemuda, dengan fokus Penanganan Masalah kenakalan remaja (geng motor dan tawuran antar pemuda dan pelajar), Pembinaan mental Pemuda dan		Ketahanan Pangan; 26. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 27. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 28. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 29. Program Pelayanan Keluarga Berencana; 30. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 31. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial 32. Program Pemberdayaan Sosial 33. Program Perlindungan Sosial 34. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 35. Program Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 36. Program Pengembangan Nilai Budaya; 37. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya; 38. Program
--	--	--	--	--

		Menggalakan gerakan disiplin nasional, Penanaman wawasan kebangsaan, Optimalisasi Peran dan Fungsi Organisasi Kepemudaan, Re strukturisasi dan revitalisasi Karang Taruna, Penyediaan Anggaran untuk pengelolaan organisasi kepemudaan, Kewirausahaan pemuda melalui pemberian bantuan modal dengan pola pra koperasi pemuda penyediaan sarana dan prasarana olah raga, Advokasi KB, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan kampung KB, pembangunan kampung KS, pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, peningkatan program PEKKA, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan. 4) Bidang ketenagakerjaan Dengan strategi Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan melalui informasi dan recruitment tenaga kerja satu pintu, penempatan dan perluasan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga		Pengembangan Budidaya Perikanan; 39. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 40. Peningkatan Produksi Pertanian 41. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 42. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan; 43. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan; 44. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 45. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 46. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 47. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; 48. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 49. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
--	--	---	--	---

		ketenagakerjaan, tata kelola layanan TKI satu pintu (one stop service), pelatihan dan orientasi penempatan tenaga kerja di perusahaan, dan pembangunan gedung BLK di 6 enam lokasi. 5) Bidang Ekonomi Masyarakat dengan straregi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta dan Kebijakan Investasi serta CSR, Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata melalui ; Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata, penurunan angka kemiskinan, Penguatan Modal Usaha Koperasi, UKM dan BUMDes melalui Penjaminan PEMDA, Meningkatkan Daya Saing KUMK/UKM, Koperasi dan BUMDes, Revitalisasi desa pertanian, Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis), Pengembangan IKM, Pengembangan pasar, Penguatan kapasitas usaha KUMKM, Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwataan daerah, Pengembangan sarana dan		Perdagangan; 50. Program Pengembangan Destinasi Wisata; 51. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
--	--	---	--	---

		prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW), Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif, Optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian, Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable, Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian, Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang, Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian, Fasilitasi Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan, Peningkatan sarana dan prasarana TPI, Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable, Fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis), Penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan menuju One village one product desa industry, fasilitasi kemitraan IKM, Penataan pasar milik pemerintah, Fasilitasi pengembangan pasar desa,		
--	--	--	--	--

		Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras), Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang, Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM, Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM, Pemantapan manajemen perencanaan ODTW, Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang karawang , Peningkatan sarana dan prasarana ODTW Karawang Selatan termasuk pembangunan kawasan agro wisata dan pembangunan hutan kota.		
--	--	---	--	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;	1. Pengembangan kerukunan Kehidupan antar umat Beragama Yang Harmonis ; 2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, parpol dan ormas 3. Penegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif 4. Peningkatan profesionalisme POL PP dan Revitalisasi LINMAS.	Memperkuat kerukunan umat beragama, Meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, Menegakkan produk hukum daerah melalui Peningkatan Kerukunan hidup antar dan inter umat beragama Pembinaan dan fasilitasi kegiatan social keagamaan dengan focus Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama, Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, Peningkatan Peran dan Fungsi Kalanagan Agamawan, Penguatan Peran dan Fungsi Organisasi Kerukunan Umat Beragama, Pengalokasian Anggaran untuk pengelolaan organisasi Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan kelembagaan social keagamaan, Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, Penegakan peraturan daerah, Penyusunan produk hukum daerah, Peningkatan kapasitas lembaga legislatif, Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya..	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 4. program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 5. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

			Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	--	--	--

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri dan Lestari	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi 3. Meningkatkan penataan ruang wilayah kabupaten berbasis keberlanjutan pembangunan dan kebencanaan 4. Meningkatkan cakupan layanan air minum, air limbah, drainase dan pelayanan persampahan. 5. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 6. Penataan kota yang manusiawi dan ramah anak 7. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 8. Penyediaan ruang publik dan RTH	Peningkatan kualitas infrastruktur , Peningkatan kualitas ruang hidup kawasan perkotaan, Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Sistem moda transportasi, Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum, Penataan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik, perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, Pengembangan system prasarana pengendalian banjir dan Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan, Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten, Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Program Pengelola an Kawasan Lindung 4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 6. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 7. Program Rehabilitasi dan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

		jalan poros desa penghubung kecamatan dengan desa, Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis, Jalan antar kawasan, Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten, Pembangunan moda transportasi massal Trans Karawang, Pembangunan fasilitas transportasi (CCTV dan rambu serta marka jalan), Pembangunan Terminal Tipe C, Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan), Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Penataan Taman Kota, pembangunan hutan kota, Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup, Peningkatan Kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH), Penegakan peraturan bidang LH, Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara serta Penyediaan ruang terbuka hijau, Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (Green belt dan silvo fishery), Penanganan lahan kritis	Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	Danau dan Sumberdaya Air lainnya; 12. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai; 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 14. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 15. Program Penataan Ruang; 16. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 17. Program Perencanaan Tata Ruang 18. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 19. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 20. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 21. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 23. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;
--	--	---	--	--

		(vegetasi DAS), Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat, Perlindungan sumber daya air, Penyusunan masterplan mitigasi bencana, Penanganan abrasi pantai, Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan system sanitary landfill), Pengembangan system pengelolaan sampah 3R (Recycle, Reduce, Reuse) berbasis masyarakat.		
--	--	---	--	--

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karawang

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	9.818,38	10,800.22	11,880.24	13,068.26	14,375.09	15,812.60	17,393.86
1.1.2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	73.475.655,2	80,823,220.72	88,905,542.79	88,905,542.79	97,796,097.07	107,575,706.78	118,333,277.46
1.2	Kesehatan								
1.2.1	AHH	Tahun	71,50	71.53	71.56	71.59	71.62	71.65	71.68
1.3	Pertanian								
1.3.1	Indeks Nilai Tukar Petani	Point	103	103	103	103	103	103	104
1.4	Ketahanan Pangan								
1.4.1	Skor Pola Pangan Harapan	Point	70	71	72	74	76	78	79

1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Ketenagakerjaan								
1.2.1.1	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	Jiwa	1.069.036	1,175,939	1,234,736	1,296,473	1,361,297	1,429,361	1,500,830
1.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50
1.2.2	Sosial								
1.2.2.1	Kemiskinan	%	10,15	10	10	10	10	10	9
2	Aspek Pelayanan Umum								
2.1.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Angka Melek Huruf	%	94	95	95	96	97	97	97
2.1.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7.39	7.69	7.99	8.29	8.59	8.89
2.1.1.3	APK Sekolah Menengah	%	68,36	71.78	75.37	79.14	83.09	87.25	91.61
2.1.2	Koperasi dan UMKM								
	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	Orang	38.904	42,794	44,934	47,180	49,539	52,016	54,617
2.1.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
2.1.3.1	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintahan	Skala 1 - 4	3	3	3	3	3	4	4
2.1.3.2	Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan	Skala 1-7	5	6	6	6	6	7	7
2.1.3.3	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	%	60	65	70	75	75	80	80

2.1.3.4	Indeks Persepsi Korupsi	Point	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	Indeks Kebahagiaan	Point	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Pekerjaan Umum								
2.1.4.1	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Jalan	%	60	65	70	75	80	85	90
2.1.4.2	Volume Sampah Terangkut	M3	732	805.20	845.46	887.73	932.12	978.73	1,027.66
2.1.4.3	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	%	20,31	22.34	23.46	24.63	25.86	27.16	28.51
2.1.4.4	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.1.5.1	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	0-1	0,13	0,15	0,20	0,50	0,70	0,90	1,00
2.1.6	Sosial								
2.1.6.1	Jumlah PMKS yang Ditangani	Orang	176.503	170.000	169.000	168.000	167.000	166.000	165.000
2.1.6.2	Jumlah Anak Jalanan	Orang	301	280	270	260	250	240	230
3	Aspek Daya Saing								
3.1	Fokus kemampuan Ekonomi								
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67,60	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1	70.6
3.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/tahun	4,62	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
3.1.3	Laju Pertumbuhan Eksport	%	2	3	3	3	3	3	3
3.1.4	Inflasi	%	3,2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
3.2	Penanaman Modal								

3.2.1	Nilai PMA	Trilyun Rupiah	17,814	18,704.70	19,639.94	20,621.93	21,653.03	22,735.68	23,872.46
3.2.1	Nilai Investasi/PMTB adhb (BPMPT)	Trilyun Rupiah	25,454	26.730	28.060	29.470	30.940	32.490	34.110
3.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.3.1	Jumlah Penerbitan Ijin	Izin	12.672	13,305	13,970	14,669	15,402	16,173	16,981
3.3.2	Indeks Demokrasi	Point	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1.056.381	943.596	965.901	1.052.539	1.114.831	1.485.748	1.700.000
3.4	Kependudukan dan Catatan Sipil								
3.4.1	Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	Jiwa	2.079.742	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488	
3.5	Lingkungan Hidup								
3.5.1	Capaian Fungsi Kawasan RTH	%	11	12	12	12	13	14	14
3.6	Pekerjaan Umum								
3.6.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (kondisi baik & sedang)	%	65	70	75	80	85	90	95
3.7	Pariwisata								
3.7.1	Jumlah Kunjungan Pariwisata	Orang	4.427.348	4,870,082	5,113,586	5,369,266	5,637,729	5,919,616	6,215,596

3.8	Kebudayaan								
3.8.1	Jumlah sanggar budaya	Buah	19	30	60	120	240	309	309
3.8.2	Jumlah Pelaku Budaya	Orang	12.629	13.891	15.281	16.809	18.490	20.339	22.373
3.8.3	Jumlah Grup kesenian	Buah	604	614	624	634	644	654	674
3.9	Pemuda dan Olahraga								
3.9.1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	Kelompok	65	65	65	65	65	65	65
3.10	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak								
3.10.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	Point	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Misi	Sasaran Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa	1. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa; 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa; 3. Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa 4. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa; 5. Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya 6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa 7. Peningkatan peran aktif masyarakat desa 8. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa 9. Pengembangan usaha ekonomi desa 10. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa	1) Bidang Pemerintahan Desa dengan strategi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan fokus Pengembangan system dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan perangkat kelembagaan dan adminsitasi desa, Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, Pengawasan dan pengendalian bantuan keuangan desa yang berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD kabupaten, Pendidikan dan pelatihan berkarakter bagi Kepala Desa dan perangkatnya, Pendirian BUMDES berdasarkan kearifan local dan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dibidang informasi dan teknologi.	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan (C5,CG1, CG2) 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa; (C2, C3,C4, CG10) 3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan (C5, C8, C9, CG7, CG8) 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR;(C5, C7, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9) 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota (C3,C7, CG3) 6. Peningkatan Upaya	1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; 2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 3. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 4. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

			Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; (C7, CG3, CG6) 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; (C1, C8, C9, CG9) 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; (C8,C9, CG7)	
--	--	--	--	--